

masyarakat transisi

Meleburnya batas-batas desa kota

Masyarakat transisi merupakan masyarakat yang mengalami perubahan bentuk dan isi dari kondisi sebelumnya. Fenomena yang paling sering terjadi, masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah perkotaan yang ditandai perubahan mata pencaharian, kemudian diikuti dengan relasi sosial dan gaya hidup. Masyarakat transisi lahir karena beberapa sebab, pertama, secara geografis wilayahnya berdekatan dengan pusat kota sehingga mobilitas masyarakat cenderung tinggi. Kedua, terbukanya akses pedesaan yang melahirkan interaksi sosial antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, sebagai salah satu akibat dari kebijakan pemerintah tentang dana desa yang melahirkan inovasi-inovasi (desa wisata yang menciptakan lapangan pekerjaan baru selain sektor pertanian). Ketiga, adanya interaksi sosial antara desa dan kota akibat dari urbanisasi.

Tentang Penulis



Dr. Muryanti, M.A. merupakan Sosiolog dengan fokus studi kajian pedesaan dan perkotaan, terutama kajian ekonomi. Beberapa publikasi, diantaranya: *Pedesaan dalam Putaran Zaman: Kajian Petani, Pertanian dan Pedesaan (2018)*; *1 The Role of the Entrepreneurship Mindset and Spirit in Building a Tourism Business in Indonesia Post COVID-19 (2022)*; *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Covid-19 (2022)*; *Perempuan Pedesaan: Kajian Sosiologis Pekerja Rumah Tangga; Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan (2013)*.

Selain mengajar dan publikasi penelitian juga aktif di berbagai kegiatan ilmiah dan anggota *Rural Sociological Society*(*).

AdipuraBooks

Anggota IKAPI No. 134/DIY/2021
Karangkajen Kota Yogyakarta 55153
www.adipurabooks.com
Instagram @adipurabooks

Sosiologi

ISBN 978-6 3-94594-1-3



9 786239 459413

Harga P. Jawa Rp. xx.xxx

Dr. Muryanti, M.A.

masyarakat transisi

AdipuraBooks

Dr. Muryanti, M.A.

masyarakat transisi

Meleburnya batas-batas desa kota



Dr. Muryanti, M.A.

masyarakat transisi

Meleburnya batas-batas desa kota

 AdipuraBooks

Masyarakat Transisi Meleburnya Batas-Batas Desa Kota

Penulis : Dr. Muryanti, M.A.
Editor : Tri Muryani, S.Sos.
Desain Cover : Lisa Aditya Putra, S.Sos.
Setting Lay Out : Nugraha Hilyas
Diterbitkan Oleh : Adipura Book Centre (IKAPI No. 134/DIY/2021)
Karangkajen, Yogyakarta
(0274) 379634 / Fax (0274) 373019
redaksiadipurabooks@gmail.com
Instagram @Adipurabooks
Website adipurabooks.com

ISBN : 978-623-881-440-4
Edisi : Pertama
Cetakan Pertama : Agustus 2022

Hak cipta pada penulis, Hak penerbitan pada penerbit. Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72: Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 9 Tahun 2002)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR (PROF. DR. RILUS KINSENG)

Buku karya Dr. Muryanti, M.A. yang diberi judul Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-batas Desa Kota ini penting untuk dibaca. Ketika membaca judul buku ini, pertanyaan pertama yang mungkin muncul dalam benak pembaca adalah: apa yang dimaksud dengan “masyarakat transisi”? Jika kata “transisi” itu sendiri dimaknai sebagai peralihan, maka pertanyaan selanjutnya adalah “masyarakat transisi” ini sedang beralih dari mana dan menuju ke mana? Jawaban atas dua pertanyaan ini tentu saja kita jumpai dalam buku ini. Di dalam buku ini Dr. Muryanti menjelaskan pertamanya bahwa secara “generik” yang dimaksud dengan masyarakat transisi adalah “masyarakat yang sedang mengalami perubahan bentuk dan isi dari suatu masyarakat ke masyarakat lain” (hal 105). Secara lebih spesifik, buku ini menguraikan masyarakat transisi yang dimaksud adalah masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat pedesaan menuju masyarakat perkotaan.

Menentukan mana masyarakat yang termasuk kategori “masyarakat transisi” dari masyarakat desa menuju masyarakat kota ini sebenarnya tidaklah mudah. Dari segi wilayah dan administrasi, kita hanya mengenal dua kategori satuan wilayah dan administrasi, yaitu desa dan kelurahan. Kelurahan merupakan satuan wilayah administrasi yang setingkat dengan desa, namun lokasinya berada di wilayah kota. Dari segi administrasi ini, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah.

Dr. Muryanti, M.A.

Sejalan dengan itu, umumnya kita juga mengenal dua kategori masyarakatnya, yaitu masyarakat desa/pedesaan dan masyarakat kota/perkotaan. Tidak mengherankan ketika berbicara tentang tingkat kemiskinan, misalnya, maka kita menemukan data tingkat kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan. Demikian juga dengan data jumlah penduduk dan berbagai data lainnya.

Secara akademis, dalam Ilmu Sosiologi misalnya, kita juga mengenal adanya Sosiologi Perkotaan (*Urban Sociology*) yang mempelajari kehidupan masyarakat di kota/perkotaan dan Sosiologi Pedesaan (*Rural Sociology*) yang merupakan cabang sosiologi yang mempelajari kehidupan masyarakat di desa/pedesaan. Hingga kini kita belum mengenal adanya cabang sosiologi yang disebut dengan “Sosiologi Transisi Desa-Kota”. Buku “Masyarakat Transisi” yang ditulis oleh Dr. Muryanti ini barangkali bisa dianggap sebagai bagian dari kelompok “pioneer” dalam membangun “Sosiologi Transisi Desa-Kota” tersebut. Dalam hal ini, “Sosiologi Transisi Desa-Kota” adalah cabang sosiologi yang mempelajari kehidupan masyarakat yang berada di wilayah sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang tidak bisa lagi dikategorikan sebagai desa, namun belum bisa juga dikategorikan sebagai kota. Secara konkrit, dari segi geografis wilayah transisi desa-kota ini nampaknya lebih banyak berada di sekitar “pinggiran” kota; jadi bisa disamakan dengan wilayah *sub-urban*.

Untuk memahami karakteristik masyarakat transisi, Dr. Muryanti melakukan semacam “pemetaan” dengan membahas masyarakat pedesaan, perkotaan, dan kemudian baru membahas masyarakat transisi itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan para pembaca dapat melihat dengan jelas apa kekhasan masyarakat transisi itu, baik dibandingkan dengan karakteristik masyarakat desa yang sudah mulai ditinggalkan maupun karakteristik masyarakat kota yang sedang dituju.

Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Dr. Muryanti yang berhasil menulis buku “Masyarakat Transisi” ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya

Dr. Muryanti, M.A.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya “masyarakat transisi” itu sendiri. Dari segi akademis, semoga buku ini memicu perdebatan yang bermanfaat bagi perkembangan sosiologi, bahkan mendorong lahirnya cabang sosiologi yang baru, yakni “Sosiologi Transisi Desa-Kota”.

Bogor, Agustus 2022

Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA

Dr. Muryanti, M.A.

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil 'alamin, Buku Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-Batas Desa dan Kota dapat saya selesaikan untuk dipublikasikan, walaupun dalam proses penyelesaiannya membutuhkan waktu panjang. Kajian masyarakat transisi ini menjadi sangat penting bagi saya sebagai muara dari kajian masyarakat pedesaan dan perkotaan, yang pada saat ini memiliki identitas unik yang dibungkus dengan perkembangan teknologi.

Masyarakat transisi secara sosial, ekonomi, politik dan budaya memiliki perbedaan antara masyarakat desa sebagai akarnya dan masyarakat kota sebagai bentuk perkembangan masyarakat yang lebih maju. Identitas tersebut berakulturasi untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Seberapa kuat pengaruh desa atau kota, tentunya dipengaruhi oleh aktor, kondisi geografis, perkembangan sarana komunikasi dan teknologi. Sehingga tahap perkembangan masyarakat transisi berbeda, dari satu daerah dengan daerah lain.

Masyarakat Indonesia secara umum merupakan bagian dari masyarakat transisi yang akan terus berubah dengan mengikuti perubahan yang terjadi secara global. Perubahan yang terjadi secara terus menerus, menyebabkan terjadinya masyarakat transisi juga berlangsung lebih lama. Tentunya masa transisi tersebut harus diikuti dengan adanya masyarakat yang bisa adaptif dengan perubahan. Beberapa permasalahan dalam masyarakat transisi ini adalah gaya hidup dan kemiskinan yang berjalan beriringan. Menjadi tanggung jawab semua stake holder terkait dengan dilema yang dihadapi pada masa transisi ini.

Dr. Muryanti, M.A.

Dalam penyusunan buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga kecil saya: Pak Rokhiman, Ellan dan Kenzie yang memberikan kesempatan setinggi-tingginya kepada penulis untuk selalu maju dan mengejar impian yang tidak pernah berhenti.

Ucapan terima kasih dan salam hormat, saya sampaikan kepada Prof. Rilus Kinseng yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengantar di buku ini. Terkait dengan keilmuannya di bidang Sosiologi Pedesaan.

Yogyakarta, Januari 2022

Muryanti

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR (PROF. DR. RILUS KINSENG) ... | iii |
| PRAKATA | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR BAGAN..... | xii |
| BAB I. PEDESAAN DALAM PUTARAN ZAMAN..... | 1 |
| Desa di Indonesia..... | 6 |
| Sistem Ekonomi Masyarakat Desa | 8 |
| Pertanian Subsisten | 12 |
| Sistem Politik-Hukum Masyarakat Desa..... | 24 |
| Sistem Sosial Pedesaan..... | 31 |
| Masyarakat Digital di Pedesaan | 40 |
| Perubahan Sosial di Pedesaan..... | 44 |
| BAB II. GERAK PENDUDUK DI DESA DAN KOTA | 47 |
| Migrasi..... | 47 |
| Pembagian Migrasi | 52 |
| Solusi Permasalahan Kota (Dampak Migrasi)..... | 66 |
| Solusi Permasalahan Desa Sebagai Dampak Migrasi..... | 67 |

Dr. Muryanti, M.A.

BAB III. DINAMIKA MASYARAKAT KOTA..... 73

| | |
|--------------------------------------|----|
| Potret Umum Kota..... | 73 |
| Sejarah Kota di Indonesia | 81 |
| Kota di Asia Tenggara | 94 |
| Masyarakat Digital di Perkotaan..... | 98 |

BAB IV. DILEMA MASYARAKAT TRANSISI..... 103

| | |
|---------------------------------|-----|
| Aspek Politik | 107 |
| Aspek Ekonomi..... | 108 |
| Aspek Sosial | 113 |
| Aspek Budaya..... | 117 |
| Kemiskinan dan Gaya Hidup | 118 |

DAFTAR PUSTAKA..... 123

TENTANG PENULIS.....

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Pengeluaran Bulanan Petani | 14 |
| Tabel 2. Jumlah Penduduk di Perkotaan dibandingkan Jumlah Penduduk Keseluruhan | 62 |
| Tabel 3. Pengertian Kota dari Perspektif Sosiologi..... | 81 |
| Tabel 4. Perbedaan Pendekatan antara Kultural dan Struktural | 81 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 1. Stratifikasi Sosial di Pedesaan berdasarkan Kepemilikan Lahan..... | 37 |
| Bagan 2. Stratifikasi Sosial Pedesaan Berdasarkan Kepemilikan Asset (Ekonomi)..... | 40 |

BAB I

PEDESAAN DALAM PUTARAN ZAMAN

Perkembangan masyarakat modern menjadi masyarakat digital saat ini menyebabkan definisi desa, bagaimana kondisi desa secara komprehensif serta apa yang membedakan desa dengan kota menjadi sangat bias. Pada era pasca modernisasi, (jika posmodernisme didefinisikan sebagai masa setelah modernisme atau bukan anti modernisme, mengingat modernisme merupakan kritik terhadap masa tradisional yang diidentikan dengan masa yang penuh kekacauan, ketidaksejahteraan dan adanya hierarki) seperti saat ini, perkembangan fisik desa tidak mampu mengikuti perkembangan kebudayaan dan gaya hidup yang mengkondisikan masyarakat untuk mengikutinya. Bahkan sebaliknya, kondisi fisik cenderung stagnan dan semakin menurun tingkat kualitas dan kuantitas kontribusinya terhadap sektor pertanian. Jika didefinisikan bahwa desa identik dan didominasi dengan sektor pertanian sebagai salah satu mata pencaharian utama masyarakat.

Dr. Muryanti, M.A.

Kondisi tersebut semakin lama sudah berkurang dengan drastis, sebagai akibat laju modernitas yang sudah bergeser dari kota ke desa yang dilakukan dengan berbagai macam kebijakan yang menggelontorkan dana ke desa dalam bentuk dana desa. Implikasinya perumahan semakin berjubel yang menggeser lahan produktif yang disertai dengan adanya konversi lahan mendera setiap relung dan sudut fisik pedesaan untuk berbagai macam keperluan pembangunan desa. Disamping faktor “gerudukan” budaya yang mengubah watak agraris masyarakat pedesaan sebagai akibat adanya urbanisasi yang meningkat pesat. Situasi ini semakin sulit untuk membedakan desa dengan kota.

Definisi desa secara fisik banyak dikaji dengan menggunakan perspektif sosiologi klasik dan berbeda jauh dengan perspektif modern, posmodern dan masyarakat digital. Menurut literatur klasik yang ada, beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan pemahaman tentang pedesaan, antara lain: *rural*, *urban*, *sub urban*, *village*, *town* dan *city*. *Rural* yang diterjemahkan menjadi seperti desa, secara umum disebut pedesaan bukanlah *village* (desa). Sementara *urban* diterjemahkan perkotaan, bukan kota (*town, city*). Akan tetapi kondisi disebut *village* ataupun *urban* memiliki perbedaan di masing-masing negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Secara umum, di tengah sulitnya mendefinisikannya, patokan yang paling mudah digunakan sebagai kriteria pedesaan adalah pertanian. Sehingga konsep *suburban* atau *rurban* diterjemahkan dengan “pinggiran kota”, yaitu bentuk antara (*in between*) antara *rural* dan *urban*, maka daerah *sub urban* merupakan daerah yang berada di tengah-tengah daerah rural dan urban.

Desa menurut Bergel didefinisikan sebagai berikut: (1). pemukiman para petani, terlepas ukuran besar kecilnya: (2). terdapat desa-desa perdagangan, artinya sebagian ada yang bertani dan sebagian ada yang berdagang. Menurutnya, kota kecil (*town*) adalah pemukiman perkotaan yang mendominasi lingkungan pedesaan dalam berbagai segi. Kota kecil memiliki pengaruh-pengaruh itu

terhadap desa-desa di wilayah sekitarnya. Fungsi kota kecil adalah pasar bagi produk pertanian maupun industri rumah tangga di pedesaan. Hubungan antara kota kecil dan desa pada dasarnya bersifat timbal balik. Desa mempengaruhi kota dan kota mempengaruhi pedesaan, baik pada level budaya, politik ataupun ekonomi. Dalam arti yang lain, adanya interaksi antara desa dan kota. Masalah pokok yang sering dihadapi kota kecil pada umumnya adalah: kurangnya kesempatan-kesempatan yang tersedia dan konservatisme yang ekstrem. Kota besar (*city*) menurut Bergel adalah suatu pemukiman perkotaan yang mendominasi sebuah kawasan (*region*), baik pedesaan ataupun perkotaan. Sedangkan yang membedakan kota kecil dan kota besar adalah kompleksitasnya. Kota besar lebih kompleks dibandingkan dengan kota kecil (Rahardjo,1999).

Pemikiran lain terkait dengan pedesaan, meletakkan kerangka pemikiran tentang desa sebagai masyarakat yang masih bersahaja dan kota adalah wakil dari masyarakat yang sudah maju dan kompleks sehingga memiliki karakteristik yang kontras satu sama lain. Karakteristik yang kontras ini dikaitkan dengan teori Durkheim (solidaritas organik dan solidaritas mekanik), Ferdinand Tönnies (*gemeinschaft-gesellschaft*), Charles Cooley (*primary and secondary group*). Masyarakat pedesaan identik dengan solidaritas mekanik, *gemeinschaft* dan *primary group* (Rahardjo,1999).

Sementara itu menurut Roucek and Warren (1962), masyarakat desa memiliki karakter sebagai berikut:

1. besarnya peranan kelompok primer
2. faktor geografik yang menentukan dasar pembentukan kelompok (asosiasi)
3. hubungan lebih bersifat intim dan awet
4. homogen
5. mobilitas sosial yang rendah
6. keluarga lebih ditekankan sebagai unit ekonomi
7. populasi anak dalam proporsi yang lebih besar.

Dr. Muryanti, M.A.

Dalam pengertian yang lain, Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa yang membedakan karakteristik desa dan kota adalah: mata pencaharian, ukuran komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan solidaritas sosial. Menurutnya, mata pencaharian merupakan faktor pembeda yang pokok antara pedesaan dan perkotaan. Pertanian dan usaha-usaha kolektif merupakan ciri kehidupan ekonomi pedesaan. Istilah *countryman* setara dengan *farmer*, *agriculturist*, menunjukkan eratnya hubungan pertanian dan desa atau pedesaan dan sektor pertanian (Rahardjo,1999).

Mengenai lingkungan sebagai penentu karakteristik desa, Smith (1970) mengatakan ada 3 jenis lingkungan: lingkungan fisik (*unorganic*), lingkungan biologik (*organic*), lingkungan sosio kultural. Secara umum, masyarakat desa lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan fisik ini dibandingkan dengan kota. Mengenai diferensiasi sosial, desa memiliki diferensiasi yang rendah dibandingkan dengan kota, misalnya pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat, baik dalam jumlah, variasi, ataupun kompleksitasnya tanpa menempatkan susunan yang hierarkis. Kesatuan masyarakat desa lebih didasarkan pada kesamaan-kesamaan (similiaritas) dan bukannya saling ketergantungan yang lahir karena adanya diferensiasi. Pelapisan sosial, di desa lebih sederhana, jarak sosial antara masyarakat desa yang tidak begitu jauh, dasar-dasar pembeda lapisan agak kaku dibandingkan dengan masyarakat perkotaan (Rahardjo, 1999).

Dalam pengertian yang berbeda, Kingsley Davis (1960) menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat kota sebagai berikut, yang merupakan kebalikan dari masyarakat desa:

1. heterogenitas sosial, yakni heterogenitas masyarakat kota sangat tinggi
2. asosiasi sekunder, masyarakat kota disebabkan oleh banyaknya penduduk tidak mungkin hidup dalam kelompok primer

3. toleransi sosial, yakni toleransi yang tinggi bagi masyarakat kota
4. pengawasan sekunder, sistem pengawasan sekunder lebih efektif
5. mobilitas sosial di kota sangat tinggi
6. asosiasi sukarela yang lebih tinggi, lebih memiliki kebebasan dalam menentukan keanggotaan, masuk-keluar
7. individualisasi, yakni masyarakat kota cenderung melepaskan diri dari kolektivitas
8. segregasi spasial, kelompok sosial yang berbeda cenderung memisahkan diri secara fisik (Rahardjo,1999).

Dalam bukunya Masyarakat Asia Pra Kapitalis, J.H. Boeke (1948), menyebutkan ciri-ciri pokok masyarakat desa agraris sebagai berikut:

1. kegiatan ekonomi dibawah kegiatan sosial, terkandung maksud bahwa masyarakat pedesaan merasakan suatu hal yang tabu, jika harus bekerja untuk aktivitas ekonomi yang mendatangkan penghasilan. Kondisi itu disebabkan karena kepentingan atau kegiatan sosial dianggap lebih penting daripada aktivitas di sektor perekonomian. Seseorang yang lebih mementingkan kegiatan ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan sosial (masyarakat).
2. keluarga dalam masyarakat desa merupakan unit swasembada secara ekonomis, keluarga merupakan unit sosial bukan unit ekonomi
3. tradisi lebih bisa dipertahankan karena adanya unit ekonomi ini
4. desa cenderung menatap ke belakang, tidak ke depan
5. dalam masyarakat desa prakapitalis, setiap orang merasa menjadi bagian dari keseluruhan, menerima tradisi dan moral kelompok sebagai pedomannya

DESA DI INDONESIA

Nama desa berasal dari istilah adat masyarakat Jawa, Bali dan Madura, yang artinya tanah kelahiran, tanah air atau pun tanah asal (Rahardjo,1999). Sedangkan wilayah atau provinsi lain yang memiliki perbedaan adat, memiliki penyebutan berbeda terhadap desa. Misalnya: marga atau nagari di wilayah Sumatera atau kampung di Kalimantan. Jika kita mengkaji sejarah desa di Jawa, desa tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kerajaan yang pertumbuhannya berasal dari masyarakat agraris. Kesatuan teritorial yang terkecil dari Kerajaan di Jawa ialah desa (*wanua karaman*) dan mungkin juga dukuh (*anak in wanua*). Pemerintah desa dijalankan oleh para rama (kepala desa) dan kabayan, yang dipilih untuk masa tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya istilah *rama mageman* atau *managam kon* dan *rata marata* yang berarti para rama yang telah berakhir masa jabatannya dan tidak dipilih lagi, tetapi masih diikutsertakan dalam kerapatan desa. Para rama itu mendapat tanah bengkok (*lemah karaman* atau sawah *karaman*). Pada konteks saat ini, disamping kepala desa ada juga kepala kelurahan yang mendapatkan gaji (dianggap seperti pegawai), walaupun mereka tidak dipilih.¹

Beberapa jabatan yang familiar pada zaman kuno tersebut: gusti, *kalan* atau *tuba kalan*, *winkas*, *tuba banua*, *parajar*, *bulair*, *wariga*, *tubalas*, *tuba wereh* dan *hulu wras*. Dengan penjelasan sebagai berikut: (1) arti istilah gusti hingga saat ini belum jelas: (2) *Kalan* atau *tuba kalan*, yaitu orang yang mengerjakan kayu hutan, akan tetapi *kalan* dan *kalan* ada hubungannya dengan lingkaran, yakni suatu tempat untuk menyambung (ayam, babi hutan, kambing) atau adu ketangkasan antara para warga desa atau untuk upacara tertentu, sehingga *kalan* untuk tukang kayu perlu dikaji lagi: (3) *Winkas*

1 Berdasarkan UU No.5/1979 tentang Pemerintahan dan Administrasi Desa. Aturan tersebut dikenal dengan sebutan formalisasi desa. Keberadaannya semakin membatasi ruang gerak desa dan menjadikan desa kehilangan otonominya, yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda dengan IGO/IGOB Desa Otonomie. Desa menjadi semakin tergantung pada pemerintahan pusat dan desa menjadi kepanjangan tangan pusat.

yang berasal dari kata *wekas* belum diketahui secara pasti: (4) *Tuba banua*, orang yang dianggap tetua desa, tetapi bukan kepala desa karena di dalam satu desa sering dijumpai lebih dari satu *tuba banua*, bisa jadi disebut dengan sesepuh desa: (5) *Parujar* dijumpai sejak zaman pusat kerajaan sebagai pembantu dari para pejabat tinggi, juga di daerah *watak* kita menjumpai *parujar* sebagai pembantu para penguasa daerah (*rakai* atau *pangal*). Artinya jabatan juru bicara amat penting di setiap kesatuan wilayah: (6) *Hulair* merupakan kontraksi dari hulu dan air, artinya jabatan yang mengurus pengairan sawah-sawah di desa (*panhulu banu*): (7) *Wariga* adalah semacam kitab primbon untuk mengetahui hari baik bulan baik, termasuk hari-hari kurang baik bagi permulaan suatu pekerjaan. Dalam hal ini jabatan *wariga* adalah orang yang memahami kitab primbon: (8) *Tuba alas*, orang yang ditugasi mengurus hasil perburuan di hutan dan mungkin mengurus hasil hutan yang lain: (9) *Tuba weroh*, petugas yang mengurus para pemuda-pemudi: (10) *Hulu wras*, petugas yang mengurus hasil panen padi atau mengurus lumbung padi: (11) *Makalankan* belum dijelaskan secara detil dalam beberapa prasasti (Buchari, 2012).

Kompleksitas desa nampak jika dalam desa tersebut memiliki ke 10 jabatan tersebut. Akan tetapi desa yang tidak memiliki wilayah hutan tentu tidak memiliki seorang tuha alas dan tuha buru: desa yang tidak dilalui sungai dan karenanya tidak mengurus jembatan tentu tidak memiliki hulu wuattan: sedang desa di daerah dataran rendah yang luas daerah persawahannya dan tergantung dari pengairan sering mempunyai lebih dari seorang hulu air. Jumlah rama di suatu desa juga tidak sama satu sama lain, tergantung dari luas desanya dan jumlah penduduknya (Buchari, 2012). Sebagai satuan kecil dari wilayah kerajaan tentunya desa memiliki kewajiban memberikan pajak kepada raja dan pejabatnya. Pada situasi tertentu, jika desa tersebut memiliki prestasi dan pejabatnya memohon kepada raja, desa tersebut bisa dibebaskan dari pajak. Desa tersebut kemudian disebut dengan “*desa perdikan (sima)*”.

Dr. Muryanti, M.A.

Beberapa jenis desa lain yang dikenal di Indonesia antara lain:

1. Desa tambangan (desa yang dikenal karena kegiatan penyeberangan orang dan barang dimana terdapat sungai besar)
2. Desa nelayan (desa yang mayoritas mata pencaharian penduduknya dari usaha perikanan laut)
3. Desa pelabuhan (desa yang memiliki hubungan dekat dengan mancanegara, antar pulau, pertahanan)
4. Desa penghasil usaha pertanian, kegiatan perdagangan, industri, pertambangan
5. Desa-desa perintis (desa yang muncul akibat program transmigrasi)
6. Desa pariwisata (Rahardjo,1999)

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.77 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Indonesia memiliki desa dengan berbagai macam penyebutannya (desa, kampung, kelurahan atau pun nama lokal) sebanyak 8.490 kelurahan dan 74.957 desa yang tersebar di seluruh Provinsi. Pada konteks masyarakat digital saat ini, kesepuluh jabatan kuno yang sebelumnya eksis di desa tentunya bergeser sehingga lebih efisien.

SISTEM EKONOMI MASYARAKAT DESA

Sejak masa Kolonialisme Belanda sampai dengan masyarakat digital saat ini, pertumbuhan ekonomi pedesaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Terutama berkaitan dengan basis ekonomi di pedesaan, yang bertumpu pada sektor pertanian. Dalam bahasa yang vulgar, menurut pandangan Clifford Geertz, desa-desa di Jawa khususnya tidak mengalami perkembangan alias mandek dan hanya berputar-putar di tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemandegan atau kemacetan pola pertanian ditunjukkan dengan tiadanya kemajuan yang hakiki. Jikapun ada gerak misalnya

orang berjalan, berlari atau berenang di air, namun tidak ada gerakan yang menghasilkan kemajuan. Orang tetap berada di tempat yang sama tidak mengalami perpindahan, hanya berdiam diri di tempat yang sama (Geertz,1976).

Dalam bukunya yang berjudul “*Involusi Pertanian*” Geertz menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi pertanian dan pedesaan yang mengalami kemandegan tersebut, yang diberi istilah “*involusi*”. Dalam usaha tani, kondisi tersebut digambarkan dengan adanya taraf produktivitas yang tidak menaik, dimana produktivitas per orang (tenaga kerja) yang dipakai ukuran. Kenaikan hasil per hektar memang dapat dicapai, akan tetapi kenaikan tersebut hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan subsisten sebuah rumah tangga petani. Produktivitas yang rendah juga diukur dari banyaknya tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi pertanian, sehingga hasil produksinya hanya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan tenaga kerja. Artinya hasil produksi impas dengan biaya produksi sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan. Masyarakat petani mengalami kehidupan yang statis.

Istilah *involusi* tersebut diambil Geertz dari Alexander Goldenweiser, seorang antropolog Amerika untuk melukiskan pola-pola kebudayaan yang mencapai bentuk pasti tidak berhasil menstabilisasinya atau mengubahnya menjadi suatu pola baru, tetapi terus berkembang ke dalam sehingga semakin rumit. Situasi ini dapat dilihat dari penggunaan sawah dan ladang sebagai alat produksi utama pertanian. Persawahan dengan kemampuan produksinya tetap berhasil mempekerjakan petani tanpa menyebabkan kemerosotan pendapatan perkapita bagi masyarakat desa. Satu hal yang menarik mengenai sawah sebagai ekosistem disebabkan oleh kondisinya yang sangat stabil dan tahan lama, untuk dapat menghasilkan panen yang tetap dari tahun ke tahun, bahkan petani selalu mengupayakan bisa panen 2-4 kali dalam setahun (Geertz,1976).

Dr. Muryanti, M.A.

Involusi merasuki keseluruhan ekonomi pedesaan yang ditandai dengan: sistem hak milik yang rumit, hubungan sewa menyewa tanah yang makin ruwet dan pengaturan kerja gotong royong yang makin kompleks sebagai akibat dari stratifikasi sosial. Dalam bahasan yang lain, James C. Scotts mengatakan karakter petani bersifat subsisten, yakni memproduksi hanya untuk mencukupi kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri, tidak untuk dipasarkan. Pada saat ini kerumitan tersebut masih ada dengan pengelolaan atau sistem yang mulai rapi dalam hal kepemilikan dan sewa menyewa tanah.

Selain Geertz dan Scotts, kajian masyarakat pedesaan di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Boeke dengan analisisnya tentang ekonomi ganda (dualisme ekonomi) atau ekonomi dunia timur. Boeke menekankan ciri khas pedesaan Jawa tidak dapat diungkapkan dengan prinsip teori ekonomi klasik Barat. Karakter perilaku ekonomi masyarakat Jawa berlawanan dengan sifat *homo economicus*, dengan dikenalnya pemenuhan kebutuhan hidup yang terbatas, dimana kebutuhan itu tidak berciri ekonomi tetapi berciri lebih bersifat sosial. Oleh sebab itu, kecenderungannya tindakan ekonomi masyarakat pedesaan tidak serta merta hanya untuk mencari keuntungan atau mengumpulkan modal, akan tetapi mereka menjauhkan diri dari setiap tindakan yang mengandung resiko dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta bersifat sosial.

Ciri sentral desa timur yakni dasar komunal yang melandasi kehidupan sosialnya. Desa adalah suatu masyarakat yang terdiri dari penduduk yang berderajat sama. Menurut Boeke siapa pun yang melarat dapat mengharapkan pertolongan, inilah kekuatan dari hubungan yang bersifat komunal. Tetapi itu mengandung kelemahan, setiap orang yang berkelebihan harus berbagi dengan kiri kanannya, setiap rezeki harus didistribusikan. Masyarakat desa tidak mentolerir adanya diferensiasi ekonomi dan rezeki itu harus dibagi rata karena setiap individu dianggap sebagai bagian dari masyarakatnya.

Pengenalan ekonomi modern tentunya sangat dipengaruhi oleh adanya ekspansi kolonial yang melakukan penetrasi ekonomi berdasarkan kapitalisme dan eksploitasi masyarakat pedesaan untuk kepentingan Barat. Penetrasi Barat dengan bentuk perkebunan menyebabkan ekonomi desa terdampar pada jalan buntu, yakni pada kondisi: tidak mengalami pemusnahan, akan tetapi tetap eksis dengan menjadi 2 bentuk yang berbeda. Dua bentuk berbeda akan tetapi keduanya masih eksis tersebut, disebut Boeke dengan “*dualisme ekonomi*” yang tidak terselesaikan sehingga kehidupan mereka tergantung dari kekuatan dari luar. Tiga hal yang menyebabkan perbedaan kedua dualistik ekonomi tersebut, yaitu :

1. motivasi spiritual masyarakat ada yang bersifat kolektif dan ada yang komersial
2. organisasi sosial produksi (berbasiskan kapital atau tanah, hubungan buruh, hubungan manusia dengan tanah dan hubungan manusia dengan alam)
3. tingkat penggunaan mesin dan teknologi yang masih rendah (Evers,1980).

Dualisme ekonomi yang dimaksud dalam konteks ini yaitu sistem ekonomi yang heterogen, bukan kesatuan ekonomi saja. Namun, keselarasan sosial dan sistem ekonomi berjalan seiring sejalan. Masyarakat pedesaan mengalami pergulatan ekonomi yang mempertahankan ekonomi tradisional dan satu sisi mendapatkan tekanan kapitalisme. Boeke menyatakan kedua proses tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi ke dalam yang menyebabkan ekspansi statis. Proses produksi tidak berkembang, sedangkan lahan tanaman terus bertambah, meliputi daerah yang semakin luas atau berkembang dengan melakukan intensifikasi produksi melalui irigasi, kolonialisasi, pembukaan daerah baru, memperluas tanaman palawija dan memanfaatkan halaman rumah (Husken, 1998).

Dr. Muryanti, M.A.

Menurut Boeke ciri ekonomi pedesaan sebagai berikut:

1. kegiatan sosial lebih utama dibandingkan dengan kegiatan ekonomi
2. keluarga dalam masyarakat desa merupakan unit swasembada secara ekonomis, keluarga merupakan unit sosial bukan unit ekonomi
3. tradisi lebih bisa dipertahankan karena adanya unit ekonomi, sehingga memposisikan pedesaan dalam konteks pembangunan ekonomi mempunyai fungsi: (1) secara tradisional, peranan desa (pertanian) dalam ekonomi dipandang sebagai penunjang pasif; (2) pembangunan ekonomi bertransformasi pada struktural ekonomi kapitalis yang berorientasi kegiatan di luar sektor pertanian, yakni industri dan jasa; dan (3) peranan desa merupakan penyedia pangan dan tenaga kerja cukup dengan harga murah.

Modernisasi pedesaan sebagai akibat dari ekspansi ekonomi kapitalis dapat dilihat dengan adanya : (1) golongan pemilik tanah komersial dan (2) golongan massa pekerja penerima upah. Dua golongan masyarakat ini membentuk hubungan produksi yang bersifat kapitalisme. Sebagaimana ciri khas ekonomi kapitalis, “dimana ada diferensiasi kerja dan upah kerja, disitu ada kapitalisme”. Modernisasi pertanian itu, merupakan transformasi dari pertanian subsisten dan campuran (subsisten dan modern).

PERTANIAN SUBSISTEN

Komoditas hasil pertanian terutama beras merupakan bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga dalam penyediaannya di pasar mendapatkan perhatian pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas harga di pasar. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Berbeda dengan penjualan komoditas perdagangan lain dengan menggunakan prinsip ekonomi, “menjalankan usaha dengan modal

sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya”. Tentunya harga jual barang dengan memperhitungkan komponen dasar yang diperlukan untuk menjalankan usaha produksi yaitu: modal investasi dan hasil produksi untuk mendapatkan keuntungan. Petani padi tidak bisa menentukan harga jual produksi beras, sehingga keuntungan yang diperoleh sesuai dengan harga pasar yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya besar pasak daripada tiang, pendapatan lebih rendah daripada pengeluaran.

Hasil produksi pertanian selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di luar makan.² Kebutuhan primer: sandang dan papan dipenuhi oleh petani secara minimal dan memerlukan waktu lama atau *mboko sithik*.³ Membangun rumah gedong bagi petani yang rumahnya sebagian besar terbuat dari bahan gedek dilakukan dengan cara mencicil sedikit demi sedikit. Mereka membeli batu kali dulu, batu bata dulu, pasir dulu dan setelah bahan-bahan terkumpul mulai membangun rumah. Proses pembangunan rumah berprinsip *mboko sithik*, yang terpenting bisa untuk berteduh dari panas dan hujan. Suatu saat ada kelebihan uang, digunakan untuk mencicil menghaluskan lantai tanah, nglepo (menghaluskan dinding rumah), mengecat, membuat teras dan membeli perabotan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan di Desa Palihan⁴, kebutuhan subsisten yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah tangga petani, mencakup kebutuhan makan dan sosial selama sebulan, sebagai berikut:⁵

2 Ungkapan Pak Untung dalam wawancara mendalam, Palihan, 6 Januari 2008

3 Istilah di Jawa untuk mengartikan kondisi mengangsur atau mencicil untuk mengerjakan sesuatu hal (sedikit demi sedikit)

4 Salah satu desa di Kecamatan Temon, Kulonprogo, DI.Yogyakarta

5 Wawancara mendalam dengan rumah tangga petani di Mlangsen dan Ngringgit, Palihan, Kulonprogo 5-26 Januari 2008 dan Januari 2022

Tabel 1 Pengeluaran Bulanan Petani

| No | Komponen | Frekuensi | Harga (2008) | Total | Harga (2022) | Total | Keterangan |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|------------------|---|------------------|--|
| 1. | Beras | 31 hari | 5.000 | 155.000 | 10.000 | 310.000 | Asumsi untuk 3 anggota keluarga |
| 2. | Sayur, buah dan lauk | 31 hari | 10.000 | 310.000 | 10.000 | 310.000 | Lauknya: tahu, tempe, telur |
| 3. | Minyak goreng | 4 liter | 9.500 | 38.000 | 25.000 | 100.000 | Harga minyak goreng naik signifikan |
| 4. | Minyak tanah | 10 liter | 3.000 | 30.000 | Saat ini, masyarakat tidak menggunakan minyak tanah, konversi menggunakan gas | | Asumsi masak menggunakan kompor minyak tanah |
| 5. | Belanja bulanan | 1 kali | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | Pembelian: sabun, odol, sikat dll |
| 6. | Biaya listrik | 1 kali | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | Termasuk untuk air |
| 7. | Kegiatan sosial | 5 kali | 25.000 | 125.000 | 50.000 | 250.000 | Nyumbang |
| 8. | Jimpitan dan ronda | 31 hari | 1.000 | 31.000 | 5.000 | 155.000 | Tidak termasuk arisan |
| 9. | Uang saku anak | 31 hari | 5.000 | 155.000 | 10.000 | 310.000 | Rincian: sekolah, main, ngaji |
| 10. | Lain-lain | 1 kali | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 200.000 | Menjenguk tetangga sakit |
| TOTAL | | | | 1.094.000 | | 2,035,000 | |

Sumber : Wawancara mendalam dengan beberapa informan di Mlangsen dan Ngringgit, Paliban, Temon, Kulonprogo, DIY, 2008/2022

Berdasarkan data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga petani yang paling besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dibandingkan dengan kegiatan sosial dan pendidikan. Sementara itu kebutuhan kesehatan belum bisa dipenuhi dengan jaminan kesehatan melalui program pemerintah. Itu artinya bahwa hasil produksi pertanian hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan, kegiatan sosial dan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan di luar pangan dan sosial dicukupi dengan cara berhutang. Itulah ciri utama kehidupan masyarakat subsisten.

Kondisi subsistensi diartikan sebagai cara hidup cenderung minimalis dengan melakukan usaha-usaha bertujuan untuk sekedar

hidup (Rahardjo,1999). Upaya bertahan hidup merupakan suatu kehidupan erat dengan garis batas kemiskinan, yang ditandai kekhawatiran karena mengalami kekurangan pangan. Bagi rumah tangga petani gagal panen tidak hanya berarti kurang makan, tetapi penyebab kelaparan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan di luar makan. Untuk dapat makan, rumah tangga petani mengorbankan harga diri dan menjadi beban orang lain atau menjual sebagian dari tanah atau ternak untuk memperkecil kemungkinan bisa subsisten (bertahan hidup).

Subsistensi rumah tangga petani merupakan fenomena struktural dan kultural. Subsistensi sebagai fenomena struktural ditandai dengan sempitnya kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian, kemiskinan, struktur ekonomi dan politik yang kurang mendukung perkembangan sektor pertanian (khususnya) dan masyarakat desa (umumnya). Di sisi lain, pandangan subsistensi rumah tangga petani sebagai fenomena kultural dapat dilihat dari kondisi subsistensi menjadi *way of life*, eksistensinya terlekat pada sistem feodalisme, merupakan tahap perkembangan masyarakat selepas zaman masyarakat pra-industri menuju zaman masyarakat industri (Scotts,1981).

Subsistensi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat pedesaan tersebut merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi tradisional. Dikenal dengan ciri autarki atau sistem ekonomi tertutup. Masyarakat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan untuk bisa bertahan hidup, baik pada level pribadi atau komunitas. Baik untuk kepentingan ekonomi, sosial atau kebudayaan (misalnya kegiatan upacara adat). Salah satu hal yang khas dari sistem ini yaitu mempertahankan tingkat kemakmuran (kebutuhan subsisten) saja sudah cukup, sehingga meminimalkan hasrat untuk mengejar materi yang berlebihan (Tjondronegoro,2008).

Menurut James Scotts yang melakukan studi tentang masyarakat subsisten ini di Thailand menyatakan bahwa krisis-krisis

Dr. Muryanti, M.A.

subsistensi dan masa-masa kekurangan petani di Asia Tenggara banyak dialami oleh petani-petani pada skala kecil. Di kebanyakan petani agraris, kekhawatiran akan mengalami kekurangan pangan telah menyebabkan timbulnya apa yang mungkin dapat dinamakan sebagai suatu etika subsistensi. Satu panen yang buruk mungkin terpaksa mengorbankan rasa harga dirinya dan menjadi beban orang lain, atau menjual sebagian dari tanahnya atau ternaknya sehingga memperkecil kemungkinan baginya mencapai subsistensi yang memadai. Secara kasarnya dapat dikatakan bahwa masalah yang dihadapi keluarga petani yaitu bagaimana dapat menghasilkan beras yang cukup untuk makan sekeluarga, untuk membeli beberapa barang kebutuhan seperti garam dan pakaian, serta untuk memenuhi tagihan-tagihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pihak-pihak luar.

Perilaku ekonomis yang khas dari keluarga petani yang berorientasi subsistensi merupakan akibat dari kenyataan bahwa, ekonomi petani sangat berbeda dengan perusahaan kapitalis. Perusahaan merupakan unit produksi dan konsumsi sekaligus. Untuk bisa bertahan sebagai satu unit, maka keluarga tersebut pertama-tama harus memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen subsistensi yang boleh dikatakan tidak dapat dikurangi lagi dan tergantung kepada besar-kecilnya keluarga. Bagi keluarga petani yang berada pada garis subsistensi ini, akibat dari suatu kegagalan menjadi kehancuran ekonomi rumah tangga, sehingga mereka lebih mengutamakan rasa aman dan dapat diandalkan, daripada memperoleh keuntungan besar.

Salah satu yang menjadi ciri khas mereka dalam hal bercocok tanam selalu berusaha menghindari kegagalan panen. Kecenderungannya, mereka tidak mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam bahasa pemasaran, tingkah laku tersebut disebut enggan mengambil resiko (*risk averse*). Mereka meminimumkan kerugian maksimum.

Dengan adanya realitas sosial dari tingkat krisis subsistensi bagi kebanyakan petani-penanam, maka sangat masuk akal apabila mereka menganut prinsip *safety first* atau mendahulukan selamat⁶. Dalam konteks memilih jenis bibit dan cara-cara bertanam, maka hal itu hanya berarti bahwa petani lebih suka meminimumkan kemungkinan terjadinya satu bencana daripada memaksimumkan penghasilan rata-ratanya. Strategi ini mengesampingkan pilihan-pilihan yang meskipun memberikan harapan akan mendatangkan hasil bersih rata-rata yang lebih tinggi, akan tetapi mengandung resiko-resiko kerugian yang besar yang dapat membahayakan subsistensinya. Prinsip ini yang melatarbelakangi pengaturan teknis, sosial dan moral dalam tatanan masyarakat agraris.

Banyaknya padi yang dihasilkan petani dipengaruhi oleh tradisi setempat dalam mengelola jenis bibit, cara menanam dan penetapan waktu tanam berdasarkan pengalaman selama berabad-abad. Tujuannya untuk menghasilkan panen yang melimpah. Menurut Chayanov dalam studinya tentang petani kecil di Rusia, situasi yang terbatas memaksa petani untuk melakukan pilihan tidak masuk akal berdasarkan ekonomi modern. Kondisi ini dinamakannya *self exploitation*, sementara Geertz menyebutnya involusi pertanian, bahwa hasil pertanian yang marginal kecil itu tidak masalah baginya asal mereka bisa menghidupi keluarganya. Mengingat hanya tenaga kerja melimpah yang dimiliki oleh petani, maka yang akan diusahakannya bagaimana mendapatkan pekerjaan lebih banyak lagi untuk bisa menutupi subsistensi dirinya. Pekerjaan yang bisa dilakukan petani, diantaranya: perubahan tanaman atau pola bercocok tanam, memanfaatkan waktu-waktu senggang untuk membuat kerajinan tangan, menjadi tukang atau berjualan di pasar dengan hasil yang kecil (Scotts,1981).

Kondisi subsistensi petani diperparah dengan adanya pungutan-pungutan dan pengaturan sosial yang dibebankan kepada seluruh

6 Istilah yang pertama kali digunakan oleh James Roumasset, *Risk and Choice of Technique for Peasant Agriculture*

Dr. Muryanti, M.A.

masyarakat, pola-pola resiprositas (tindakan yang bersifat saling), kedermawanan sosial, saling tolong menolong dalam pekerjaan, membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak terelakkan sebagai salah satu kewajiban masyarakat komunal. Nilai-nilai dan pola-pola sosial yang sudah terbentuk tersebut membentuk petani bersikukuh dengan pola yang dimilikinya dan sukar untuk melakukan transformasi diri. Moral ekonomi petani dimaknainya sebagai keadilan ekonomi dan definisi kerja mereka tentang eksploitasi, pandangan-pandangan tentang pungutan-pungutan terhadap hasil produksinya yang bisa ditolerir dan tidak bisa ditolerir. Petani tidak mempunyai ilmu hitung keuntungan maksimal sebagaimana ilmu ekonomi.

Pada saat terjadi gagal panen padi, petani mengkonsumsi makanan pengganti berupa umbi-umbian. Untuk mencegah terjadinya gagal panen, petani menganut prinsip dahulukan selamat. Mereka lebih meminimalkan resiko gagal panen daripada memaksimalkan penghasilan. Strategi ini mengesampingkan pilihan yang memberikan harapan penghasilan tinggi, tetapi mengandung resiko kerugian besar. Petani subsisten enggan mengambil resiko sebagai alasan mengapa mereka lebih memilih menanam padi daripada bukan padi (cabe, buah atau sayur) dengan hasil untuk dijual. Pilihan ini disebut sebagai pilihan rasional.

Keputusan menanam tanaman *cash crop* (tanaman komersil) atau tidak merupakan keputusan berat. Peralihan dari produksi subsistensi ke produksi komersil memperbesar resiko. Hasil produksi padi dapat menjamin persediaan pangan keluarga, sedangkan harga tanaman komersil tergantung pada harga pasar dan harga bahan-bahan kebutuhan konsumen dan biaya produksi yang lebih tinggi. Satu kali panen tanaman komersil belum tentu menjamin persediaan pangan keluarga.

Pertanian subsisten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Mereka yang terpengaruh dengan cara bertani modern akan menggabungkan cara bertani subsisten dan modern.

Sebagian lahan sawah untuk menggarap tanaman pangan dan sebagian untuk menanam tanaman komersil. Mereka mempunyai prioritas tanaman beras. Setelah ada kepastian stok beras, mereka baru menanam tanaman komersil. Rasionalitas mereka tidak mengizinkan bertanam yang membahayakan keamanan subsistensinya.

Kehidupan petani subsisten sangat tergantung kepada alam. Ketika terjadi gagal panen padi selain mengkonsumsi umbi-umbian, mereka berupaya : (1) mengencangkan ikat pinggang dari kebutuhan-kebutuhan dan (2) melakukan ekonomi swadaya: berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas, buruh pabrik, atau migrasi (pekerjaan-pekerjaan sampingan). Pekerjaan sampingan ini merupakan lembaga dan jaringan sebagai penolong.

Kondisi subsisten yang dialami oleh petani penggarap (petani dikategorikan menjadi 2, yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap/buruh, yang tidak memiliki lahan) lebih berada pada ambang batas dibandingkan dengan petani pemilik, terkait dengan taraf hidup, resiprositas atau pertukaran sepadan, harga yang adil dan legitimasi. Petani penggarap mengalami kondisi ekstraksi atau eksploitasi surplus dari pekerjaan petani pemilik, terkait dengan sewa tanah serta bagi hasil yang tidak adil. Sisi yang lain, petani mengalami kondisi yang sama dalam hal tingginya tanggungan sosial, inflasi dan harga produk pertanian yang rendah dibanding produk industri lain.

Namun demikian, kecilnya pendapatan petani dipergunakan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Terdapat input keluar rumah tangga yang harus dipenuhi. Menurut Husken berbagai macam pengeluaran petani diantaranya: (1) penguasaan tanah secara perorangan, yang menyebabkan petani penggarap membayar sewa lahan ataupun bagi hasil ; (2) pasar: pasar tenaga kerja, pasar barang dagangan maupun pasar uang dan (3) melalui pemerintah (pungutan pajak) dan *pajak sosial* (Husken,1997). Tingginya biaya operasional pengerjaan sawah, semakin meningkatnya harga benih dan pupuk, tingginya upah tenaga kerja untuk mengolah lahan menyebabkan

Dr. Muryanti, M.A.

tidak adanya surplus pendapatan pertanian. Bisa dipastikan, setiap musim panen, petani mengalami defisit.

Menurut James Scotts, petani mengalami eksploitasi di tingkat individu, kelompok, kelas secara tidak adil atau tidak wajar dengan adanya tarikan keuntungan dari kerja orang lain. Pengertian ini mencakup dua ciri eksploitasi, yakni: (1) eksploitasi sebagai satu tata-hubungan antara perorangan, kelompok atau lembaga, adanya pihak yang dieksploitasi dan mengeksploitasi. Ke (2) eksploitasi merupakan distribusi tidak wajar dari usaha dan hasilnya yang memerlukan ukuran keadilan distribusi untuk mengatur tata hubungan (Scotts,1981). Dalam konteks petani di Indonesia terdapat tata hubungan antara: (1) petani penggarap dengan pemilik lahan; (2) petani penggarap dan pemilik lahan dengan pemerintah sebagai pemungut pajak dan pengambil kebijakan atas keberlangsungan negara dan (3) petani pemilik dan petani penggarap dalam tata sosial kemasyarakatan.

Geertz menganalisis relasi antara petani penggarap dengan pemilik lahan berbentuk hubungan patron-klien yang melahirkan kultur paternalisme. Pada konteks ini, petani penggarap sebagai klien dan petani pemilik sawah sebagai patron. Petani penggarap lebih “rentan”⁷ dan berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan petani pemilik lahan. Posisi lemah atau terjadinya eksploitasi pada petani penggarap didukung dengan kebijakan negara berupa Undang-Undang Bagi Hasil No. 2 Tahun 1960,⁸ yang menyebutkan bagi hasil antara petani pemilik lahan dan petani penggarap atas hasil dengan pembagian 50:50 yang dikenal sistem *maro*. Pemilik lahan mempunyai kontribusi atas biaya produksi dan terlibat pada kerja pertanian.

7 Walaupun ada perjanjian tidak tertulis bagi hasil antara kedua belah pihak, tetapi rumah tangga petani penggarap sering mendapatkan perlakuan tidak adil terkait sarana dan faktor produksi pertanian, terutama pada situasi hasil panen tidak mencapai hasil maksimal

8 lihat UUPBH 1960

Petani subsisten yang menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Jawa menjadi sebuah bom waktu yang mengakibatkan kemandegan ekonomi pedesaan. Seberapa besar pun mereka berusaha, tidak akan mampu memberikan perubahan yang maksimal terhadap ekonomi pedesaan. Petani subsisten berada pada kondisi kemandegan ekonomi dan sosial, yang dikenal dengan istilah involusi pertanian. Kemandegan dan kemacetan pola pertanian ditunjukkan oleh tidak adanya kemajuan yang hakiki dalam proses dan hasil produksi pertanian

Involusi merupakan istilah pola-pola kebudayaan yang mencapai bentuk pasti tidak berhasil untuk menstabilisasi atau mengubah menjadi suatu pola baru, tetapi terus berkembang ke dalam sehingga semakin rumit (Goldenweiser, 1976). Involusi pertanian dilihat dari fungsi persawahan untuk mempertahankan tingkat produktivitas dan menyerap tenaga kerja berlimpah. Ciri-ciri umum involusi merupakan ciri khas dari pertanian sawah sesudah kira-kira pertengahan abad kesembilan belas hingga saat ini, dapat dilihat dari adanya: keuletan pola dasar yang meningkat, penggarapan intern yang teliti, penuh hiasan, penjelimitan teknis dan keahlian teknis yang terus menerus. Dalam konteks pertanian dapat dilihat dari adanya : sistem hak milik semakin rumit, hubungan sewa menyewa tanah semakin ruwet, pengaturan kerja gotong royong semakin kompleks (Geertz,1976).

Usaha tani yang mengalami involusi itu digambarkan dengan produktivitas tidak menaik, diukur dari produktivitas per orang (tenaga kerja). Kenaikan hasil per hektar bisa dicapai tetapi tingginya hasil hanya cukup untuk mempertahankan taraf penyediaan pangan per orang. Bagi pemilik lahan, usaha padi sawah lebih sarat menanggung beban tenaga kerja dan lebih besar (47%) bagian pendapatan diberikan kepada tenaga kerja. Berkaitan pemilikan tanah, Geertz membagi pola kesempatan bekerja usaha tani yang sangat sempit semakin menambah pola yang disebut “kemiskinan bersama”. Ciri involusi “tumbuh ke dalam”, bukan mekar dan mengubah diri

Dr. Muryanti, M.A.

yang berlaku dalam bidang lain, misalnya : pelapisan masyarakat di desa, hubungan keluarga dan pola kepercayaan (Geertz,1976).

Pola produksi pertanian yang dilakukan di Jawa khususnya berdasarkan satuan keluarga inti. Sehingga pada prosesnya sangat tergantung pada tenaga keluarga (suami-istri dan anak), sesekali juga menggunakan tenaga ternak. Sementara itu penggarapan kolektif muncul karena adanya tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda.⁹ Dengan bentuk produksi sebelumnya dilakukan dengan sistem perladangan, dimana proses produksi dilakukan dengan menggarap tanah, membuka atau membakar hutan (Tjondronegoro, 2008).

Pemerataan hasil padi diselenggarakan masyarakat pedesaan dalam bentuk bawon atau derep (Tjondronegoro,2008). Nilai bawon yang diberikan berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain. Hubungan timbal balik antara yang panen (pemberi bawon) dengan penderep (penerima bawon) disebut dengan imbalan natura, terjadi pada saat panen atau lembaga sosial dan dekat dengan nilai gotong royong. Bawon ini merupakan salah satu bentuk dari nilai kesamarataan. Pada masyarakat Jawa nilai ini merupakan salah satu upaya bertahan petani gurem ditengah kelangkaan sumber daya, akan tetapi kebutuhan hidup semakin meningkat. Sistem pemerataan ini disebut Geertz dengan “pemerataan kemiskinan” (*sharing poverty*). Menjelang tahun 1970an, sistem nilai ini mulai bergeser digantikan dengan sistem tebasan (cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, di mana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen). Dengan adanya sistem ini mulai mengubah pola pemerataan masyarakat menjadi relasi yang bersifat kontraktual (Tjondronegoro, 2008).

Pandangan Scotts dan Boeke mendapat kritik dan tambahan dari Popkin. Menurutnya, pemikiran Scotts tentang kehidupan petani dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi moral. Dengan berpandangan bahwa pemikiran tentang desa, hubungan

⁹ Penggarapan lahan secara kolektif akan memudahkan Belanda untuk menanam jenis tanaman yang diinginkannya (kopi, teh, indigo dan rempah jenis lain).

patron-klien ataupun aktivitas pasar didasarkan pada asumsi-asumsi tentang tujuan petani serta perilakunya (Popkin,1986). Terkait dengan petani menurut pandangan ekonomi moral, mereka enggan mengambil resiko dalam mengevaluasi strategi ekonominya. Dengan memilih strategi-strategi kecil tapi mendatangkan hasil-hasil yang pasti daripada strategi dengan hasil banyak, tetapi mengandung resiko yang lebih besar berupa kegagalan panen. Akan tetapi pada kenyataan di wilayah Asia Tenggara, walaupun para petani tersebut sangat miskin dan dekat dengan garis bahaya, akan tetapi masih banyak petani memiliki kelebihan dan mau melakukan tindakan-tindakan investasi yang beresiko. Dengan demikian mereka melakukan investasi yang beresiko ataupun aman, baik dalam jangka panjang-pendek, umum-pribadi. Bentuk-bentuk investasinya: anak-anak, hewan ternak, tanah, benda-benda milik pribadi, benda-benda milik keluarga, surplus produksi di desa, program asuransi atau kesejahteraan atau perbaikan-perbaikan di desa (Popkin, 1986).

Termasuk dengan relasi di desa yang komunal dan adanya kebutuhan yang didukung oleh desa menurut saat ini mulai bergeser. Tidak semua kebutuhan individu disupport oleh desa secara penuh. Lembaga-lembaga di desa serba tidak pasti dalam mendukung asuransi dan kesejahteraan masa depan. Implikasinya petani tidak mengandalkan dukungan dari desa (komunitas), akan tetapi lebih memilih melakukan investasi untuk kepentingan pribadi keluarganya. Adanya pertumbuhan ekonomi pada pemerintah pusat, tidak serta merta menjadikan petani mengalami kemunduran. Elite desa akan mampu menjalin relasi dengan orang di luar dari desa untuk pertumbuhan ekonomi desa. Artinya akan menambah keuntungan petani. Dengan demikian beberapa kritik yang disampaikan oleh Popkin tersebut menunjukkan bahwa petani di level pedesaan, pada masa agraris atau kapitalis sudah semakin bersifat rasional dalam mengambil sikap lebih mementingkan kepentingan diri pribadi dan keluarga, dibandingkan komunitas.

SISTEM POLITIK-HUKUM MASYARAKAT DESA

Desa merupakan suatu masyarakat yang tumbuh secara alami dan bukan buatan, sehingga tidak dibutuhkan batasan yang jelas untuk konstitusi serta kewenangan badan pemerintahnya. Masyarakat desa memiliki tradisi musyawarah. Jika ada permasalahan yang muncul di desa, kesepakatan diputuskan terutama oleh orang yang paling mengetahui tentang tradisi di desa melalui mekanisme rembug desa atau istilah lainnya (Boeke,1983). Dalam situasi tersebut desa memiliki otonomi yang sangat luas. Akan tetapi ketika negara turut serta mengatur desa, maka muncul fenomena baru dalam sistem kelembagaan di desa. Situasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Terutama dengan adanya pengaturan pemerintah melalui UU No.5/1979, yang mengatur pemerintahan tingkat yang paling rendah, kecamatan dan desa. Hal paling kentara dari kebijakan ini adalah penyeragaman penyebutan desa bagi desa-desa yang memiliki nama yang berbeda dengan Jawa.

Partisipasi politik masyarakat di pedesaan sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan alam pedesaan itu sendiri, dimana basis ekonomi masyarakat pedesaan yang masih tergantung pada keberadaan tanah. Artinya sektor yang menjadi penopang kehidupan pokoknya yakni pertanian, terutama pertanian yang bersifat subsisten. Kalau pun ada warga yang mengkonversi pekerjaan bertani menjadi sektor jasa, perdagangan ataupun industri rumah tangga, mereka tidak meninggalkan pekerjaan bertani dan pekerjaan di luar pertanian hanya sebatas tambahan. Tetapi secara umum, pekerjaan pokok mereka sangat tergantung pada sektor pertanian. Faktanya, faktor produksi pertanian terutama tanah sebagai penopang utama pertanian dimonopoli oleh pihak-pihak luar (tuan tanah) sebagai penyebab mereka tergantung pada pihak luar. Atau-pun juga berlaku sebaliknya, bahwa masyarakat pedesaan sudah banyak yang bekerja di luar sektor pertanian (*non farm*). Akan tetapi masih menggarap lahan untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Seberapa pun luasnya, mungkin 100-200 m² atau bahkan kurang

dari jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama beras. Perubahan pekerjaan tersebut belum bisa mengubah sikap politiknya yang tergantung kepada pemilik modal.

Ketergantungan kepada pihak luar tersebut menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi aktif warga yang menjadi ujung tombak demokrasi. Masyarakat desa memiliki kecenderungan politik mengikuti pihak luar yang memberikan modal kepadanya. Akibatnya partisipasi aktif masyarakat desa bisa dikategorikan pada tingkat yang rendah. Partisipasi yang dimaksud merupakan upaya terorganisir untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadilan sosial tertentu, oleh berbagai kelompok dan gerakan sosial masyarakat. Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan bahwa partisipasi sebagai proses dimana para pemilik kepentingan (*stakeholder*) mempengaruhi dan berbagai pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak bagi mereka (Muryanti,2010). Dalam hal ini berhubungan dengan partisipasi masyarakat desa dalam berbagai macam aktivitas dan kegiatan di pedesaan sebagai upaya untuk mengembangkan desa menuju desa yang dinamis.

Berkaitan hubungan antara warga negara dan negara, partisipasi politik melibatkan relasi keduanya. Partisipasi politik didefinisikan secara luas atau sempit oleh berbagai penulis tergantung dari pendekatannya. Kajian klasik partisipasi politik oleh Nie dan Verba (1972) didefinisikan sebagai kegiatan legal oleh warga negara (perorangan) yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan mereka. Definisi yang luas diberikan oleh Parry, Mosley dan Day (1992) yang menyebutkan sebagai keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah (Muryanti,2010). Definisi ini bisa kita lihat dalam bentuk partisipasi masyarakat desa dalam setiap aktivitas politik, baik di level desa sampai nasional.

Dalam aspek struktur politik, ada tiga pilar yang berpengaruh dalam dinamika politik pedesaan saat ini, yaitu: (1) tokoh agama (toga); (2) tokoh masyarakat (tomas) dan (3) tokoh pemerintah. Ketiga pilar tersebut memiliki posisi dan peran yang berbeda dalam masyarakat yang saling bertautan. Dalam praktiknya seseorang bisa menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah saja, akan tetapi ada juga seseorang yang bisa menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintah sekaligus. Dalam struktur masyarakat ada pembagian kekuasaan terhadap fungsi dari ketiga tokoh tersebut. Tokoh agama memobilisasi massa melalui kegiatan yang bersifat keagamaan, tokoh masyarakat pada ranah kegiatan sosial kemasyarakatan, sementara tokoh pemerintah melalui kegiatan formal yang menjadi agenda pemerintah atau kepanjangan tangan pemerintah atasnya. Berkaitan dengan perkembangan demokrasi di desa, ketiga pilar tersebut bisa menjadi faktor penghambat atau justru pendukung partisipasi masyarakat. Peran apa yang mereka jalankan di desa dipengaruhi oleh kualitas dan pemahaman demokrasi dari ketiga tokoh tersebut.

Pada masyarakat Jawa, disamping pemimpin formal (ketiga tokoh masyarakat tersebut), terdapat pimpinan yang tidak formal yang disegani masyarakat. Pemimpin ini menjadi tokoh masyarakat secara tidak langsung. Dalam bahasanya Weber, masyarakat Jawa memiliki rasionalitas kharismatik. Otoritas ini muncul karena adanya kualitas luar biasa atau daya tarik seorang pemimpin secara pribadi yang mampu memberikan inspirasi kepada para pengikutnya (Johnson,1986). Pemimpin golongan ini pun juga mempunyai peranan yang signifikan dalam perkembangan demokrasi di desa. Akan tetapi, ada beberapa kasus di pedesaan yang menunjukkan bahwa beberapa pimpinan dalam masyarakat ini terkadang bersifat tumpang tindih. Misalnya seorang ulama menjadi tokoh agama, tabib dan sekaligus tokoh masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat yang dikenal di Jawa pada masa pra kemerdekaan, khususnya di pedesaan yang disebut sebagai tokoh masyarakat dikenal dengan istilah: Orang

kuat (*jago*), yakni: kelompok dalam masyarakat pada masa Kolonial dan di wilayah kendali birokrasi-militer tidak memadai dan *Jago* memberikan perlindungan terbatas kepada masyarakat desa yang dilayaninya, sementara mereka merampok di desa yang lainnya. Pada masa kemerdekaan disebut istilah *Jawara*. Saat ini, sebagai contoh di daerah Banten, masih dikenal istilah *Jawara*, yang menggambarkan status masyarakat kelas preman, yang berdampingan dengan ulama dalam komunitas masyarakat setempat.

Pada awalnya paradigma politik di Indonesia memiliki kecenderungan bahwa pusat selalu mengintervensi daerah, termasuk desa didalamnya. Dalam perkembangannya, paradigma tersebut diantitesa, sehingga muncul aturan daerah atau desa memiliki potensi sehingga tidak tergantung pada pusat. Maka muncul wacana yang kemudian bergulir menjadi aturan tentang desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999 dengan adanya UU no. 25 tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Adanya otonomi daerah ini menjadi salah satu upaya penguatan demokrasi dan *civil society* di daerah yang selama ini terpinggirkan. Kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan vertikal antara pusat dan daerah. Dengan adanya kebijakan ini, spirit pembangunan desa yaitu spirit otonomi daerah dan pembangunan wilayah pedesaan. Salah satunya terkait dengan keuangan desa. Pemerintah desa mempunyai sumber-sumber keuangan sebagai berikut yang diatur dengan ketentuan lain: (1) Pendapatan Asli Desa (PAD), (2) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota, (3) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, (4) bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kota, (5) hibah dan sumbangan pihak ketiga. Selain itu desa juga memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD atau BUMDes).

Pelaksanaan otonomi desa ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang

Dr. Muryanti, M.A.

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa oleh pusat ke desa setiap tahun untuk mengefektifkan program-program yang berbasis di desa. Adapun jumlah dana desa yang diberikan kepada desa dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kemahalan konstruksi. Fokus dari penggunaan anggaran ini diperuntukkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan, yang difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sisi yang lain, kebijakan ini justru menimbulkan ketidakseimbangan horizontal antar daerah karena ada daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah, di sisi lain ada daerah yang minus. Tentunya akan memunculkan perekonomian baru, dimana daerah yang kaya akan mengembangkan kekayaannya dengan jaringan transnasional. Penggeraknya dari berbagai kerjasama tersebut yaitu elite lokal. Dimana keberadaannya semakin menguat dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Hal ini disebabkan mereka yang pada akhirnya menjadi penguasa di daerah. Identifikasi elite lokal tersebut (termasuk di desa), diantaranya sebagai berikut: (1) keluarga-keluarga birokrat yang berhasil bertahan hidup melewati berbagai macam rezim sejak periode kolonial akhir; (2) birokrat daerah dan para aktivis partai yang pernah menjadi pelaksana lokal rezim sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru) yang menjalin kerjasama dengan preman dan birokrat setempat (3) para politikus daerah yang berasal dari elite setempat yang ingin membentuk kabupaten sendiri (Harris, 1988). Para tokoh lokal ini yang aktif dalam menggerakkan aktivitas politik di pedesaan.

Kebijakan otonomi daerah ini menjadikan kepentingan politik antara pusat dan daerah terbelah. Langgengnya keterbelahan masyarakat terjadi semenjak masa kolonial Belanda. Belanda mengatur kelompok-kelompok etnis atau komunitas adat melalui elite setempat. Termasuk di kalangan elit sendiri tidak luput dari politik *divide et empire* yang menjadikan mereka juga tidak saling percaya satu sama lain. Menjelang revolusi kemerdekaan, *founding father*

berupaya menyatukan berbagai macam kekuatan yang berbeda untuk menggapai satu kata merdeka.

Kritik atas situasi desa saat ini diantaranya: (1) mengaburnya semangat nasionalisme dalam elite dan masyarakat desa, yang mengacu pada pandangan Benedict Anderson bahwa bangsa merupakan komunitas terbayang karena semua warga negara dan simbol-simbol yang digunakan tidak pernah bertemu, mendengar di dalam pikiran atau kehidupan nyata. Imajinasi bangsa hanyalah milik kelompok tertentu, bukan mayoritas warga negara (Anderson, 1999). Kritik yang ke (2) semakin menguatnya konflik horizontal antar sesama desa (desa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin).

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas pada daerah, termasuk desa untuk menjalin relasi dengan pihak luar secara bebas, terutama dalam mengakses pendanaan dari luar. Bentuk kerjasama dengan pemerintah luar dalam bentuk pembangunan fisik desa ataupun sumbangan ide yang bisa ditempuh oleh desa itu sendiri seharusnya tidak tergantung dan adanya intervensi dari pemerintah pusat, kabupaten/kota. Namun, keterbukaan yang dimiliki desa terhadap dunia luar ini pun, desa masih memiliki intervensi dari pemerintah pusat. Hal itu bisa dilihat dari adanya pasal lain yang menyebutkan bahwa sekretaris desa (sekdes) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengakomodir kebijakan pemerintah pusat.

Selain permasalahan otonomi desa, bagaimana proses pengambilan keputusan pada masyarakat desa pun menjadi indikator pelaksanaan demokrasi di desa. Berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di pedesaan, tahun 2005, Bank Dunia melaporkan hasil risetnya tentang "*Village Justice in Indonesia*" dan Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal. Laporan tersebut membahas tentang bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahan dan konflik di tingkat pedesaan. Dalam konteks ini, masyarakat dan tokoh masyarakat di pedesaan

Dr. Muryanti, M.A.

an cenderung memakai mekanisme informal untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang muncul karena beberapa alasan.

Pertama, mekanisme informal dianggap lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan dengan mekanisme hukum formal. Sistem hukum formal yang dimaksud melibatkan: kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Waktu penyelesaian, jarak geografis dan biaya merupakan hambatan utama bila mereka ingin menggunakan jalur hukum formal. *Kedua*, mekanisme informal dianggap lebih sesuai dengan semangat kerukunan masyarakat dibanding bila menempuh jalur hukum formal. Alasan ini menunjukkan fakta bahwa realitas kehidupan masyarakat desa yang masih saling tergantung dengan pihak lain dan masyarakat yang bersifat komunal, diakibatkan kekhawatiran pihak yang lemah akan adanya aksi balas dendam dari kelompok pelaku kejahatan atau menjadi alasan bagi para elit desa untuk menghindar dari sorotan atasan atau cemooh dari desa yang lain. *Ketiga*, masyarakat desa pada umumnya mengaku tidak terlalu mengerti aturan formal sekaligus tidak percaya pada aparat. Apabila ada masyarakat yang menyerahkan penyelesaian pada jalur formal dianggap mengurangi daya kontrol mereka atas proses dan hasilnya (World Bank, 2005).

Mekanisme informal tetap digunakan walaupun masyarakat desa menyadari bahwa ada permasalahan yang ditimbulkan dengan mekanisme tersebut. Proses penyelesaian yang cenderung didominasi elite daripada masyarakat secara bersama-sama. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, warga masyarakat enggan terlibat dalam atau mendorong upaya penyelesaian bila menyangkut kasus publik (korupsi, kejahatan yang lain). *Kedua*, masyarakat desa lebih suka mewakilkan kepentingan mereka pada orang-orang atau tokoh yang sudah ditunjuk yang dianggap lebih mengerti masalah, mempunyai jaringan dan akses yang lebih luas. Dan *ketiga*, rendahnya partisipasi masyarakat karena maraknya kelemahan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di tingkat Nasional.

Dengan demikian mekanisme informal cenderung kurang berhasil untuk penyelesaian permasalahan secara adil bagi masyarakat miskin di pedesaan. Terutama bila terdapat kesenjangan posisi tawar yang besar antara koruptor dan warga miskin yang menjadi korban. Akan lebih sulit lagi jika pelaku kejahatan tersebut merupakan pejabat pemerintah atau memiliki hubungan yang dekat dengan pejabat pemerintah atau memiliki hubungan yang dekat pemerintah setempat, sehingga mekanisme informal tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan adanya kesenjangan posisi tawar tersebut, pelaku kejahatan biasanya bersikap abai terhadap berbagai ancaman sanksi sosial maupun sanksi hukum. Pada akhirnya, bagaimanapun persepsi mereka terhadap mekanisme hukum formal, dalam beberapa situasi masyarakat desa masih mau memakai jalur hukum formal sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan haknya (World Bank, 2005). Apalagi saat ini, situasinya sudah mulai berubah, dimana rasionalitas masyarakat desa lebih meningkat dibandingkan masa sebelumnya yang lebih mengutamakan solidaritas. Hal ini menyebabkan masyarakat desa sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan secara formal.

SISTEM SOSIAL PEDESAAN

Sejarah relasi sosial masyarakat pedesaan dipengaruhi oleh ketergantungan masyarakat desa terhadap tanah sebagai basis produksi di sektor pertanian. Ada sebagian kecil masyarakat desa yang memiliki jumlah lahan sangat luas (tuan tanah), sementara di sisi lain ada mayoritas masyarakat desa yang tidak memiliki lahan (gurem) ataupun memiliki dalam jumlah yang sangat minim, hanya sebatas untuk bisa bertahan hidup (*survive*). Kondisi ini melahirkan relasi sosial masyarakat yang bersifat timpang antara warga yang memiliki lahan sempit dengan yang berlahan luas. Ketimpangan tersebut melahirkan relasi yang bersifat saling ketergantungan dan mutualisme dan satu membutuhkan yang lain. Pada situasi kesenjangan ekonomi tersebut, pemilik lahan luas (tuan tanah)

Dr. Muryanti, M.A.

enggan menggarap lahan. Sementara sisi lain petani gurem yang tidak memiliki lahan sangat membutuhkan lahan untuk bertanam agar bisa bertahan hidup.

Relasi yang terjalin diantara pemilik dan penggarap lahan disebut dengan relasi patron-klien. Patron diperankan oleh pemilik lahan luas (tuan tanah), sedangkan klien diperankan oleh buruh tani atau pemilik lahan sempit. Patron (pelindung) merupakan orang yang berada pada posisi mampu dan berlebih untuk membantu klien-klien. Patron mempunyai sumber daya melimpah yang diandalkan oleh klien untuk bertahan hidup. Begitu bernilainya seorang patron terhadap kliennya, ada yang mengartikan peran sebagai patron sebagai suri tauladan sedangkan klien hanyalah pengikut (KBBI, 1989), yang berada pada posisi lemah terhadap sumber daya patron dan berusaha mendapatkannya, dengan menjalin hubungan dengan patron. Ikatan antara patron dan klien merupakan salah satu bentuk konsep *resiprositas* (saling menguntungkan kepentingan kedua belah pihak). Keduanya mempunyai “asuransi sosial”. Seorang patron ibaratnya mempunyai simpanan di bank, dalam konteks hubungan ini diinvestasikan kepada rumah tangga petani yang berbentuk: sawah, makanan, lahan tegalan, uang dan hasil pertanian yang digunakan ketika pada suatu saat mereka berada pada kondisi kesulitan. Sedangkan klien sewaktu-waktu harus menyediakan tenaga, menjadi abdi setia dan siap mengerjakan setiap pekerjaan patron. Patron ini bisa sanak saudara dekat, tuan tanah, pejabat desa, pedagang dan negara (Scotts, 1981).

Kedudukan patron berperan besar membantu klien ketika terjadi kekurangan. Bantuan yang diberikan patron disertai tuntutan-tuntutan atas sumber daya klien yang mayoritas bekerja sebagai petani. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi bahkan menggunakan paksaan baik secara langsung ataupun tidak, kalau tidak dipenuhi patron dengan mudah bisa menghentikan aliran bantuan. Legitimasi yang dimiliki oleh patron terhadap klien bisa dilihat dari ketepatan waktu, besar dan lingkup sumbangan patron serta adanya tuntutan-

tuntutan mereka atas sumber daya petani (Scotts, 1981). Hubungan antara patron dan klien merupakan hubungan luas dari hubungan majikan dan buruh dan terpenting mencakup hubungan antara “bapak” dan “pendukung”. Tinjauan hubungan ini lebih pada ikatan komunal atau unsur budaya dalam konteks “organisasi” dan kesatuan pola budaya. Tingkat produktivitas tidak menaik (atau bahkan menurun) yang mendorong pembagian rezeki rendah bagi patron dan klien. Jika pembagian itu diteliti pada usaha tani, pemilik tanah dan buruh tani, nyatalah pemilik tanah lebih beruntung dibandingkan dengan buruh tani karena modal tanah miliknya (Scotts, 1981).

Analisis patron-klien di pedesaan ini tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Scotts tentang moral ekonomi petani. Prinsip dasar dari relasi ini, menunjukkan adanya:

1. kolaborasi antar kelas (tidak pada posisi kelas yang sama)
2. basis relasi patron-klien ini adalah moral dan kelas
3. pertukaran yang seimbang
4. adanya diferensiasi sosial
5. elemen dari relasi patron-klien adalah arus yang seimbang antara patron ke klien dan klien ke patron.

Bentuk relasi patron-klien di pedesaan sangat tampak dalam budaya Jawa, dengan adanya istilah yang disebut *ngenger*, budak, abdi, *batur* dan *bediende*. *Ngenger* adalah suatu kebiasaan dimana klien tinggal di rumah orang lain. Secara umum, klien berasal dari keluarga kurang mampu (miskin) dan patron akan memberikan bantuan keuangan secara maksimal kepada klien. Sebagai balas jasa klien terhadap patronnya, mereka mengerjakan semua pekerjaan yang diinstruksikan oleh patron. Sementara itu kemunculan budak terkait dengan sejarah peperangan atau penaklukan suatu wilayah (tanah), pihak yang kalah harus menyerahkan segenap harta milik dan sekaligus mengabdikan diri pada kelompok pemenang. Dalam sejarah awal, ditemukan fenomena suatu keluarga mempekerjakan orang-orang tertentu (yaitu para budak) di rumah mereka. Para

Dr. Muryanti, M.A.

budak ini terdiri dari beberapa klasifikasi, yang diantaranya pekerja rumah tangga (PRT) (Purwanto,2000).

Fenomena abdi muncul pada masa kerajaan (feodal) terutama kerajaan di Jawa. Kemunculan tersebut muncul dalam sistem sosial budaya antara raja dan rakyatnya. Bagi rakyat jelata, raja merupakan sosok yang dianggap luhur, suci, sakti dan dekat dengan Tuhan. Rakyat mempunyai keyakinan bahwa hubungan dekat dengan raja akan membawa keberuntungan bahkan keselamatan dalam kehidupan. Untuk itu kesempatan menjadi abdi di kerajaan merupakan sebuah anugerah yang besar. Rakyat jelata memperebutkan jabatan ini. Bahkan mereka tidak mempunyai keinginan selain kedekatan dengan raja. Dengan menjadi abdi, rakyat akan hidup tentram. Terpenuhinya kebutuhan psikologis membuat mereka tidak lagi menginginkan pemenuhan kebutuhan materiil. Mereka tidak dibayar pun tidak mengapa karena motivasinya untuk mendapat ketenangan dan pengayoman dari raja. Namun, ada juga diantara mereka mengabdikan karena tidak mampu membayar upeti kepada raja. Sementara itu babu, *maid* atau *bedinde* muncul bersamaan dengan masuknya budaya kolonial. Sebagai konfigurasi dari fenomena emban dan pembantu keluarga berupah, yang mengabdikan bukan saja kepada tuan-tuan Belanda (manca negara lain) tetapi juga pada golongan elit pribumi. Pada masa itu, babu dihargai secara materiil dengan upah(Purwanto,2000).

Adanya relasi budaya patron dan klien ini menyebabkan relasi sosial, ekonomi dan politik yang tidak berimbang di masyarakat. Hal itu tampak dalam kehidupan ekonomi masyarakat dalam mengelola asset ekonomi (tanah, usaha, industri), dalam relasi politik, ada orang yang bisa dipercaya atau dikenal dengan tangan kanan yang melanggengkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Relasi patron-klien merupakan relasi yang bersimbiosis mutualisme, satu sisi saling menguntungkan untuk mencapai tujuan, sedangkan sisi lain ada pihak yang dirugikan ketika tidak ada kesepakatan pada hubungan kerja yang jelas diantara kedua belah pihak.

Pada masa industri sebagai tahap perkembangan masyarakat agraris, hubungan patron klien masyarakat pedesaan mengalami perubahan. Jika pada awalnya masyarakat yang dianggap patron itu hanya satu orang, terutama pemilik lahan yang luas, akan tetapi saat ini patronnya bukan hanya pemilik lahan saja. Patron mereka beraneka ragam profesi, belum tentu memiliki lahan yang luas. Lahan luas sudah tergantikan dengan kepemilikan uang, usaha, properti dan berbagai jenis bisnis yang lain. Dengan adanya berbagai modal yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan kepatuhan seseorang pun menjadi transaksional sesuai dengan kepentingannya. Seseorang tidak hanya memiliki satu patron ataupun satu klien yang terikat, akan tetapi sangat fleksibel sifatnya.

Kondisi ekonomi masyarakat pedesaan dengan basis produksi pertanian di pedesaan, kelas sosial yang terbentuk sebagai berikut:

1. pemilik lahan luas (tuan tanah, *apanage*)/*farmer* (jumlahnya sangat sedikit)
2. pemilik lahan sedang, sikep
3. buruh tani (tidak memiliki lahan)/*peasant* (mayoritas petani di Indonesia)

Stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan tanah ini terbentuk semenjak abad ke 18, pada masa kerajaan Jawa, masuknya Kolonialisme Belanda dan pada masa awal modernisasi. Hal itu disebabkan basis struktur atau mata pencaharian masyarakat bertumpu pada sektor pertanian. Kelas sosial semata-mata hanya berdasarkan pada kepemilikan tanah. Semakin luas tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka akan menempatkannya pada status kelas yang tinggi di masyarakat. Begitu pun sebaliknya, yang memiliki tanah yang sempit atau bahkan tidak memiliki menempati status atau kelas rendah.

Bagan 1: Stratifikasi Sosial di Pedesaan berdasarkan Kepemilikan Lahan



Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2009

Jika kita tinjau lebih jauh, pemilik tanah luas yaitu penguasa dan tuan tanah, sementara masyarakat secara umum tidak memilikinya dan hanya memiliki hak guna atau pakai saja. Kalaupun memiliki disebabkan kebaikan hati penguasa atau pengabdian rakyat tanpa batas. Kepemilikan tanah di masyarakat belum ada pengaturan pembatasan kepemilikan, sehingga menyebabkan tingginya kesenjangan sosial antara penguasa dan rakyat. Kesenjangan ini berlangsung hingga saat ini.

Stratifikasi sosial berdasarkan kepemilikan tanah ini dikenal sebagai sistem feodalisme. Feodalisme adalah suatu sistem ekonomi dimana raja, keluarga raja dan para bangsawan serta pejabat daerah merupakan penguasa atau pemilik tanah, sedangkan petani sebagai abdi. Dalam sistem ini ditekankan bahwa alat produksi (dalam konteks ini tanah) merupakan milik raja dan para bangsawan. Rakyat menjadi milik raja yang dikerahkan tenaganya untuk kepentingan

penguasa. Masyarakat hanya berhak menggarap atau menggunakan, akan tetapi mereka tidak berhak memiliki atau menguasai. Petani wajib menyerahkan separo hasil buminya kepada raja sebagai upeti berupa buah-buahan, padi, barang-barang mentah atau yang sudah jadi, dan bahan-bahan kayu gelondongan. Pun mereka harus bekerja untuk raja atau para penguasa daerah (Fauzi, 2000).

Sistem feodalisme di Kerajaan Jawa nampak dari struktur hubungan antara raja dan hamba kerajaan (priyayi) sebagai *rulling elit* di satu pihak dan yang lainnya adalah wong cilik sebagai kelompok masyarakat yang berada di bawah kekuasaan elit. Kaum priyayi mendapatkan lungguh (*apanage*) memiliki kekuasaan atas sejumlah petani. Petani yang mendapatkan kekuasaan atas tanah dari priyayi ini disebut sebagai *sikep*, yang mempunyai sejumlah kramanan/pengindon (buruh tani) yang bekerja pada sikep. Itu yang menjadi landasan stratifikasi sosial di masyarakat. Hak atas tanah pada masa itu, tidak ada kejelasannya, antara posisi hak kepemilikan atau hak guna usaha. Ada tanah yang masih milik perseorangan (yoso atau yasa, yang pertama kali membuka lahan) tetapi di satu sisi, desa lain yang tidak ada lagi lahan kosong, maka posisi tanah ini semakin langka dan menimbulkan kelas baru, yakni masyarakat yang tidak memiliki lahan.

Perubahan struktur ekonomi pedesaan di Indonesia mulai nampak ketika masa Deandels, kemudian Raffles yang dilanjutkan oleh Van Den Bosch. Kalau sebelumnya para pedagang Belanda memanfaatkan sistem ekonomi tradisional untuk mendapatkan penarikan upeti dari para raja di Indonesia, maka sejak Deandels, Raffles dan Van Den Bosch, melakukan proses penetrasi ekonomi modern yang mempengaruhi struktur sosial pedesaan di Indonesia.

Sistem tanam paksa semakin mengukuhkan *komunalisasi* kepemilikan tanah. Hal ini terjadi karena petani harus menyerahkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Perubahan ini telah menyebabkan pergeseran sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang dipergunakan untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah. Ada

Dr. Muryanti, M.A.

kecenderungan tanah petani yang tadinya luas berubah menjadi kecil-kecil dan tanah perseorangan menjadi tanah komunal (Fauzi, 2000). Pada masa ini, mulai muncul keterbatasan tanah. Keterbatasan di masa kolonial diakibatkan oleh perluasan tanam paksa, sedang pada abad ke-20, tanah menjadi komoditas sehingga petani semakin terbatas untuk bisa membelinya.

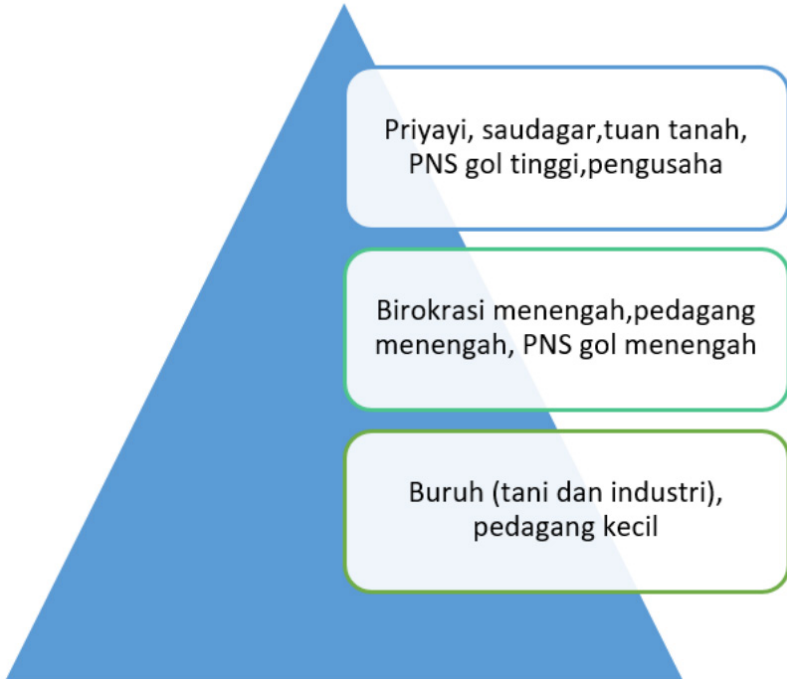
Pada saat masyarakat desa semakin menyempit kepemilikan lahannya, bahkan mayoritas tidak memiliki lahan (buruh tani) dan penetrasi pasar semakin besar, menyebabkan masyarakat pedesaan tidak semata-mata tergantung pada sektor pertanian, tetapi bergeser pada bentuk-bentuk usaha ekonomi lain. Bentuk usaha ekonomi di luar pertanian, yakni: industri, jasa, perdagangan menjadi pekerjaan pokok bagi masyarakat desa. Bahkan pada perkembangannya, semakin menyempitnya usaha di bidang pertanian, menyebabkan sektor pertanian hanya sebagai penyedia bahan pangan saja, bukan untuk pekerjaan utama. Kondisi tersebut dipengaruhi juga pada era modernisasi, mulai terjadi pergeseran orientasi ekonomi, dari agraris menjadi industri.

Pada masyarakat agraris, sarana produksi (tanah) menjadi tumpuan pekerjaan utama. Dalam perkembangannya, pedesaan menjadi bagian dari pertumbuhan industri, menyebabkan kapital (uang) lebih dominan pengaruhnya dalam menentukan stratifikasi sosial di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mensyaratkan adanya pergerakan ekonomi yang serba cepat yang bisa dipenuhi dengan uang dibandingkan dengan kepemilikan tanah. Masyarakat pun mendapat pengaruh dari kebijakan tersebut, sehingga masyarakat beramai-ramai mengakumulasi kapital. Fenomena ini melahirkan kelas sosial baru berdasarkan kepemilikan kapital (uang) dan aset (sumber daya ekonomi selain tanah). Kelas sosial baru yang terbentuk sebagai berikut:

1. kelas pemilik modal (tuan tanah, saudagar, pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang besar)

2. kelas menengah (birokrat menengah, pemilik lahan menengah, PNS golongan rendah, pedagang menengah)
3. kelas buruh (industri, tani dan pedagang kecil)

Bagan 2: Stratifikasi Sosial Pedesaan Berdasarkan Kepemilikan Asset (Ekonomi)



Sumber: Disarikan dari berbagai Sumber, 2009

Sampai saat ini, sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi petani untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan. Secara umum, pengaturan terhadap sektor pertanian, terkait pengelolaan sarana produksi pertanian dan peningkatan hasil produksi pertanian belum begitu massif, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi masih nampak di masyarakat. Kesenjangan ekonomi ini berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Bagi masyarakat miskin cenderung berkelompok untuk bertahan hidup. Setiap orang merasa menjadi

Dr. Muryanti, M.A.

bagian dari keseluruhan, menerima tradisi dan moral kelompok sebagai pedomannya (kehidupan komunal), termasuk saling menghargai dan toleransi. Sistem ekonomi pun dijalankan secara berkelompok, sehingga berbagai macam kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi dengan adanya kekuatan kelompok.

MASYARAKAT DIGITAL DI PEDESAAN

Perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi di pedesaan tidak kalah pesatnya dengan akses yang dimiliki masyarakat kota. Penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat penghubung dan telepon genggam yang diiringi dengan pengunduhan aplikasi media sosial menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat pedesaan. Proses digitalisasi atau perkembangan masyarakat digital di desa dan kota berjalan beriringan. Hal yang membedakan hanyalah terkait kekuatan sinyal di desa yang lebih lemah dibandingkan di kota. Dalam tinjauan sosiologi komunikasi, muara masyarakat berkembang pada masyarakat digital yang tidak membedakan desa atau kota. Desa pun berkembang menjadi desa digital.

Desa digital tidak jauh berbeda dengan kota digital yang membentuk masyarakat *cyber* atau masyarakat digital. Paradigma yang berkembang dalam masyarakat digital dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi mengubah masyarakat dunia lokal menjadi dunia global (dunia yang transparan terhadap informasi dan dinamika yang bergerak dengan cepat) yang dikenal dengan *the big global village*, sehingga memungkinkan membentuk budaya/produk industri/pasar/mata uang/militer/ peperangan secara bersama, tanpa melalui hubungan inderawi secara langsung. Interaksi sosial yang dibangun dalam masyarakat *cyber* dengan membangun kontak sosial dan komunikasi. Tidak adanya komunikasi yang dilakukan secara langsung menyebabkan tumbuhnya budaya pencitraan dan tingginya pertukaran makna dalam ruang yang serba simbolis dalam masyarakat digital. Kepercayaan diri dan eksistensi bekerja beriringan

untuk tumbuh dengan pesat karena tidak adanya sentuhan secara langsung (Bungin, 2019)

Perkembangan teknologi yang semakin cepat menjadikan media sosial menyediakan berbagai macam fitur dan aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat *cyber*. Sehingga pertumbuhan masyarakat *cyber* pun semakin cepat yang ditandai dengan penggunaan internet yang meningkat setiap tahunnya. Pada awal tahun 2022 ini, pengguna internet di Indonesia sejumlah 202,35 juta pengguna atau sekitar 77% dari total penduduk Indonesia (cnbcindonesia, 2022). Sebagaimana karakter dari pengguna media massa yang mendekatkan yang jauh, pada ujungnya media massa dapat membentuk budaya massa yang bersifat universal. Media sosial memunculkan dunia baru, dimana realitas itu sendiri (eksistensi simbolik/material seseorang) seluruhnya ditangkap dan dibenamkan dalam imaji virtual yang muncul di layar dan pengalaman. Pengguna media sosial terjebak dalam ruang simulasi sebagai representasikan realitas yang diolah dengan teknologi. Hal itu menyebabkan batas antara realitas dan imajinasi sangat tipis karena keduanya menjadi setara, imajinasi berada di dalam realitas itu sendiri (Ritzer, 2004). Pengguna media sosial sangat menyadari bahwa semua informasi yang sudah diupload di media sosial merupakan milik publik yang sudah bukan milik pribadi lagi dan menjadi bagian dari simulasi. Namun demikian, masyarakat *cyber* juga memiliki pranata yang dibangun sesuai dengan kesepakatan bersama terkait dengan privasi ataupun tidak menyebarkan kebencian di media massa.

Menurut Castells, masyarakat *cyber* disebut juga dengan masyarakat informasi yang muncul bersamaan dengan kapitalisme informasional, dimana sumber produktivitas merupakan kombinasi dan penggunaan faktor-faktor produksi berdasarkan pengetahuan dan informasi. Dalam perkembangannya, masyarakat didominasi oleh jaringan (seperangkat node yang saling terhubung) yang menyebabkan kapitalisme informasi ini semakin mengglobal. Bagi masyarakat global, teknologi yang berkembang berbasiskan

Dr. Muryanti, M.A.

informasi sebagai aktivitas manusia yang bersifat menyebar. Semua informasi menggunakan jaringan yang memiliki efek menyebar (pervasif), teknologi baru yang fleksibel dan terintegrasi dalam sistem (Ritzer, 2004).

Basis utama untuk mewujudkan masyarakat *cyber* melalui desa digital dilakukan dengan pembangunan infrastruktur digital, yaitu pengembangan koneksi internet di pedesaan. Pemerintah memberikan bantuan dan dukungan dalam pengembangan digitalisasi di pedesaan. Dalam praktiknya, beberapa desa yang mendapatkan prioritas dalam pengembangan desa digital sudah siap untuk proses digitalisasi (Fardani, 2022). Kebijakan pemerintah itu merupakan hal yang penting, mengingat proses digitalisasi di pedesaan dapat mempercepat kemajuan desa. Digitalisasi merupakan salah satu cara untuk dapat mempublikasikan potensi lokal desa melalui berbagai macam informasi, terkait dengan profil desa, kependudukan, potensi desa, pelayanan publik, berita dan informasi kontak (Ainiyah, 2010). Termasuk informasi yang berisikan data kegiatan dan pembangunan desa (Fardani, 2022). Teknologi digital di pedesaan juga dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan desa pada bidang kelembagaan desa, keamanan, kesehatan, ekonomi (unit usaha berbasis teknologi digital, mengembangkan toko online yang berbasis UMKM) dan pendidikan (Nurchim, 2018).

Digitalisasi desa dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya :

1. Pengembangan aplikasi mobile android dalam pembuatan surat menyurat untuk masyarakat. Pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan cara menghubungkan website Desa Digital dengan aplikasi android menggunakan sistem android webview (Pangemanan, 2021)
2. Pengembangan digitalisasi desa berbasis website dengan melakukan pendampingan komunitas jurnalis desa sebagai media komunikasi desa. Proses pendampingan dilakukan dengan metode pengabdian melalui beberapa tahapan yaitu *Preliminary*

Survey, Focused Group Discussion (FGD), pendampingan komunitas, konsultasi dan evaluasi. Pendampingan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan perangkat desa mengenai digitalisasi desa dengan website sebagai wadah penyelenggaraan sistem informasi desa. Pengelolaannya dapat dilakukan secara kolektif berbasis komunitas desa (Wahid dan Hartati, 2021).

3. Pelatihan pembuatan platform *e-commerce* pasar desa digital berbasis web (fungsi dan fitur media berbasis web) dan penggunaannya. Dengan adanya pelatihan tersebut, terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pembuatan, pemanfaatan media berbasis web dengan indikator telah terwujudnya media online serta diuji coba untuk kegiatan promosi dan pemasaran produk (Samodra dkk, 2019).
4. Pengembangan secara sistematis dan berurutan, mulai dari tahap *requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance*. Dengan adanya web berhasil memfasilitasi pemerintah desa dalam distribusi informasi yaitu dengan adanya fitur fungsionalitas distribusi informasi, berhasil memberikan fungsionalitas untuk input informasi yang terdiri dari informasi berkala dan setiap saat, serta berhasil dalam mengelola permohonan informasi publik (Putri, 2020).
5. Pelatihan penggunaan EC-Resolver sebagai sarana pengelolaan dan pendokumentasian komplain secara digital sehingga data lebih baik dan efisien (Mahendra dan Nugraha, 2021).

Gagasan desa digital ini bisa lebih dikembangkan secara partisipatif responsif terhadap dinamika digitalisasi, pembangunan inklusif, antisipasi bencana dan kelestarian lingkungan berbasis digital (Manoby, 2021). Untuk memacu peningkatan jumlah desa digital ini, pemerintah membuat kompetisi desa yang berhasil dalam pengembangan ekonomi, dengan cara meningkatkan kewirausahaan

Dr. Muryanti, M.A.

desa melalui teknologi digital, desa tersebut telah berhasil mewujudkan program desa pintar¹⁰ (Nurchim, 2018).

PERUBAHAN SOSIAL DI PEDESAAN

Jaringan internet yang sudah menyebar luas di wilayah pedesaan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat, terkait dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial tersebut diartikan sebagai kondisi masyarakat yang mengalami perbedaan struktur sosial dan pola budaya secara terus menerus yang disebabkan oleh faktor intern (adanya invasi dan inovasi, perubahan jumlah dan struktur penduduk, gerakan sosial dan konflik sosial) dan ekstern (adanya peperangan, perubahan iklim, infiltrasi budaya asing dan perkembangan teknologi) (Suryono, 2019). Penggunaan teknologi yang dilakukan secara massif tentunya mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dalam tahap perkembangannya batas-batas antara masyarakat pedesaan dan perkotaan menjadi tidak terlihat (Manullang, 2021). Jika secara umum, sumber ekonomi masyarakat desa bersifat agraris, saat ini mengalami pergeseran menjadi lebih familiar dengan penggunaan teknologi menjadi masyarakat perkotaan. Salah satu sarana untuk mengembangkan masyarakat desa melalui juga dengan aktivitas BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) (Waluyo dan Herviyanti, 2021).

Masyarakat desa belajar menggunakan internet secara otodidak, melalui berbagai tutorial yang dengan mudah diperoleh di google atau pun youtube. Penggunaan yang intensif dari internet untuk berbagai macam keperluan menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap internet, sehingga mereka sering mengatakan tidak bisa hidup tanpa internet. Penggunaan internet masyarakat desa tidak berbeda dengan masyarakat kota, yaitu :

¹⁰ Desa pintar atau desa punya internet merupakan salah satu program pelayanan internet di pedesaan dari pemerintah Indonesia.

1. Aplikasi media sosial,
2. Belanja secara online yang dilakukan dengan beberapa metode yaitu media sosial, *personal website* dan *online shop*, dengan metode belanja online: *visiting (search)*, *purchasing* dan *multi channel shopping*. Masifnya penggunaan media online menyebabkan peningkatan belanja *online* pada ibu-ibu rumah tangga, karena tergiur dengan tawaran barang yang diiklankan dan banyaknya diskon (Rahayu dan Syam,2021)
3. Transportasi online
4. Aktivitas pendidikan untuk pencarian informasi (*browsing*), pembelajaran jarak jauh dengan zoom atau gmeet (Rizki Setiawan, 2021)
5. Pemasaran hasil produksi pertanian dan SDA yang digunakan untuk mengembangkan potensi desa sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan pembangunan desa (As'ad dkk, 2021)
6. Internet dan website dalam kehidupan sehari-hari secara efektif dimanfaatkan untuk bisnis, pengembangan pendidikan, mendapatkan informasi, kesehatan, sosial dan hiburan. Pemanfaatan website di era *new normal* untuk mengatasi masalah *physical distancing* meliputi bekerja secara *real-time*, meningkatkan kredibilitas, menghemat pengeluaran promosi (Maharani dkk., 2021)

Penggunaan teknologi di pedesaan pun tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Massifnya teknologi dapat merenggangkan solidaritas mekanik yang kental karena masyarakat desa lebih asyik menikmati kesendiriannya sehingga kurang bersosialisasi dengan lingkungannya dan mudahnya situs pornografi dan *game* diakses oleh anak-anak sehingga mengurangi waktu belajar. Antisipasi dampak negatif penggunaan internet perlu dilakukan dengan peningkatan kedisiplinan, keagamaan (Oktaviani dkk,2022) dan pendidikan media sosial sesuai untuk anak-anak sesuai dengan level usianya (Khairani dkk, 2021).

BAB II

GERAK PENDUDUK DI DESA DAN KOTA

Penduduk yang berada di perkotaan atau pun pedesaan jumlahnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah jumlahnya. Jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah dipengaruhi oleh 3 faktor demografi, yaitu : fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi.

MIGRASI

Istilah gerak penduduk disebut dengan *population mobility* atau *territorial mobility*, yang bermakna gerak spasial, fisik dan geografis, baik secara permanen atau tidak permanen. Gerak penduduk permanen dikenal dengan migrasi. Sedangkan gerak penduduk yang tidak permanen, bisa disebut dengan sirkulasi dan komutasi. Sirkulasi merupakan gerak penduduk dalam jangka waktu pendek, repetitif atau siklikal dimana memiliki kesamaan dalam hal tidak nampak atau gerak berselang antara tempat

Dr. Muryanti, M.A.

tinggal dan tujuan baik untuk bekerja atau tujuan lain. Dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan komutasi merupakan gerak penduduk harian yang merupakan gerak berulang hampir setiap hari antara tempat tinggal dan tempat tujuan (tidak berencana menginap/ menetap ditempat tujuan). Migrasi merupakan pergerakan penduduk yang terjadi dengan melintasi waktu dan wilayah tertentu yang bertujuan untuk menetap di wilayah yang dituju tersebut. Migrasi mencakup tiga aspek, yaitu : waktu, ruang dan tujuan yang ditetapkan dalam melakukan perpindahan tersebut. Waktu dan ruang terkait dengan berapa lama waktu yang diperlukan seseorang tinggal di wilayah tertentu yang tercatat dalam wilayah kabupaten/provinsi/ desa/kota atau pun negara. Sedangkan tujuan berhubungan dengan alasan utama seseorang melakukan perpindahan secara berturut-turut yang membentuk pola tertentu dengan waktu minimal selama 6 bulan (Sudibia, 2010), baik secara permanen atau pun tidak permanen.

Menurut Martin migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Sedangkan dalam arti luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen (Cahya,2016). Berapa jumlah penduduk yang bermigrasi bisa dilihat dari data migrasi neto, yaitu selisih jumlah penduduk yang masuk dan penduduk yang keluar.

Proses terjadinya migrasi bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satu teori yang bisa menjelaskan terjadinya migrasi dikenal dengan teori gerak penduduk. Pada teori gerak penduduk ini disebutkan bahwa migrasi terjadi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu :

1. *Ravenstein*

Ada kaidah-kaidah yang terjadi dalam proses migrasi yang menyebabkan terjadinya migrasi. Terjadinya migrasi dipengaruhi oleh faktor jarak, adanya tahap-tahap dalam proses

terjadinya migrasi, perbedaan yang ekstrem antara desa-kota sebagai penyebab utama kecenderungan migrasi (yang pada saat ini pemaknaan ini mulai bergeser dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan desa tidak jauh berbeda dengan kota), lebih dominannya perempuan dalam migrasi jarak dekat, perkembangan teknologi yang mengubah pola migrasi dan dominannya motivasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya migrasi.

2. Teori dorong dan teori tarik (*push-pull theory*)
 - Teori dorong menjelaskan faktor pendorong yang menyebabkan para migran meninggalkan daerah asalnya menuju daerah tujuan. Berbagai macam faktor pendorong terjadinya migrasi diantaranya: adanya permasalahan atau konflik keluarga, alasan ekonomi atau pun di daerah asal tidak memberikan harapan untuk berkembang.
 - Teori penarik menjelaskan tentang alasan-alasan yang menyebabkan para migran memilih daerah tujuan sebagai tujuan bermigrasi. Faktor penarik beraneka ragam, terkait dengan sumber ekonomi di tempat baru, kenyamanan dalam bekerja atau sebagai tempat tinggal serta adanya harapan baru di tempat yang baru. Sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong menuju ke tempat tersebut.
3. Modernisasi di suatu negara
Pembangunan di suatu negara tidak bisa dipisahkan dengan gelombang modernisasi yang menyapu keseluruhan negara. Menurut Zellinky modernisasi mampu menggerakkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan pembangunan sebagai bagian dari modernisasi itu sendiri. Pergerakan masyarakat tersebut mengalami fase yang disebut dengan transisi mobilitas. Tahapan transisi mobilitas tersebut dibagi menjadi beberapa fase:

1. Masyarakat Tradisional Modern

Pada fase ini migrasi terjadi di wilayah lokal yang hanya terbatas pada praktik kebiasaan atau budaya yang berkembang di masing-masing wilayah. Pergerakan penduduk terkait dengan: pemanfaatan lahan, kunjungan sosial, komersial, peperangan atau ziarah religius.

2. Masyarakat Transisi Awal

Pada masa masyarakat transisi awal ini beberapa pola gerakan yang terjadi yaitu:

1. Gerakan massif dari desa menuju kota, baik kota yang lama ataupun kota baru sebagai akibat urbanisasi
2. Gerakan yang signifikan dari masyarakat desa ke wilayah yang tepat untuk dijadikan kawasan pembangunan ekonomi
3. Mayoritas migrasi terjadi dalam bentuk arus keluar (emigrasi) menuju tujuan yang lebih menarik dan ada peluang untuk dikembangkan
4. Migrasi terjadi di lingkungan kecil, yang dilakukan oleh tenaga kerja terdidik, teknisi dan profesional ke bagian dunia yang memberikan peluang terbaik
5. Pertumbuhan signifikan di wilayah yang arus sirkulasinya tinggi

3. Masyarakat Transisi Akhir

Pada masa ini, migrasi memiliki beberapa pola yang berbeda dengan gerak penduduk sebelumnya. Pada fase ini,

1. Terjadi pelambatan migrasi, akan tetapi migrasi dari desa ke kota masih terjadi secara massif
2. Arus migran mengalami penurunan di wilayah perbatasan
3. Emigrasi menurun dan cenderung berhenti
4. Terjadi peningkatan sirkulasi, dengan pertumbuhan yang sangat kompleks

4. Masyarakat Maju

Masyarakat maju dalam konteks ini sebagai kelanjutan dari masyarakat transisi akhir. Pada fase ini, beberapa gerak penduduk yang terjadi :

1. Mobilitas bertujuan untuk mendapatkan tempat tinggal pada masa ini terhenti dan bergerak ke berbagai arah
2. Terjadi gerakan penduduk dari desa ke kota yang kemudian berkurang secara absolute dan relative
3. Adanya gerakan yang penuh semangat dari migran dari kota ke kota dan individu yang berada dalam pengelompokan perkotaan
4. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan tidak mengalami pergerakan atau stagnan.
5. Signifikan total imigrasi yang tidak memiliki dan semi skill sebagai pekerja dari lahan yang relatif di negara berkembang
6. Banyak terdapat migran Internasional atau sirkulasi yang penting terkait pekerja dan pekerja profesional, akan tetapi kepemimpinan dan jumlah dari arus tergantung dari kondisi yang spesifik
7. Akselerasi sirkulasi yang penuh semangat, bagian dari orientasi ekonomi dan kesenangan tetapi variasi yang lain sama baiknya

5. Masyarakat Masa Depan Supermaju

Masyarakat masa depan supermaju menurut pandangan Zellynky merupakan tahap tertinggi masyarakat, yang memiliki karakter gerak penduduk sebagai berikut:

1. Berhentinya mobilitas tempat tinggal dan pergerakannya tidak tentu arah
2. Gerakan penduduk dari desa ke kota masih berlanjut, akan tetapi kemudian berkurang secara absolute dan relative

3. Gerakan yang penuh semangat dari migran dari kota ke kota dan individu berada dalam pengelompokan masyarakat perkotaan
4. Masyarakat yang tempat tinggal di perbatasan antara desa dan kota pergerakannya menjadi stagnan.
5. Rata-rata migran tidak memiliki dan semi skill sebagai pekerja
6. Banyak terdapat migran Internasional atau sirkulasi yang berasal dari kelas pekerja dan pekerja profesional, akan tetapi kepemimpinan dan jumlah dari arus tergantung dari kondisi masing-masing lokasi
7. Meningkatnya akselerasi sirkulasi yang berorientasi ekonomi dan kesenangan(Massey, 2003)

PEMBAGIAN MIGRASI

Migrasi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu :

1. Migrasi Internal

- Migrasi Internal merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dari daerah asal penduduk menuju ke daerah yang belum pernah didatangi oleh penduduk tersebut dan masih dalam satu Negara (Aningtyas, 2016)
- Migrasi internal terjadi antar unit-unit geografis (provinsi, kota, desa, kabupaten atau kampung) dalam suatu negara
- Dalam konteks migrasi internal ini, seseorang yang melakukan migrasi, ditinjau dari daerah tujuan (**migrasi masuk**) dan ditinjau dari daerah asal (**migrasi keluar**)
- Migrasi internal terjadi sepanjang waktu, sehingga jumlah migran dihitung pada jangka waktu tertentu atau dengan interval migrasi (1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya) sesuai dengan waktu berlangsungnya migrasi.

- Penghitungan jumlah migran atau migrasi dihitung dengan mempertimbangkan “tempat domisili di luar tempat kelahirannya” yang disebut migran semasa hidup
- Migrasi masuk neto terjadi jika jumlah migrasi masuk lebih banyak daripada migrasi keluar
- Migrasi ke luar neto terjadi jika jumlah migrasi keluar lebih banyak daripada migrasi masuk
- Migran di suatu wilayah dapat diidentifikasi berdasarkan tempat tinggal terakhir dan tempat tinggal periode tahun belakangan migran tersebut. Semua migran yang berbeda antara tempat tinggal lahir dan tempat tinggal sekarang disebut **migran total** (*total migrant*).
- Migran yang tempat tinggalnya dalam tahun-tahun belakangan (5 tahun terakhir) berbeda dari tempat tinggal sekarang disebut **migran risen** (*recent migrant*)
- Migran yang tempat tinggal sekarang sama dengan tempat lahir, tetapi dalam jangka waktu tertentu pernah tinggal di luar tempat kelahirannya, berarti migran tersebut mengalami -- > **migrasi kembali** (*return migrant*)
- Beberapa kategori yang termasuk migrasi internal ini dikenal dalam bentuk sirkulasi dan komutasi

Sirkulasi

- Gerak penduduk dalam jangka waktu pendek, repetitif atau siklikal dimana memiliki kesamaan dalam hal tidak nampak niat yang pasti untuk mengubah tempat tinggal permanen
- Sirkulasi tidak mengubah tempat tinggal permanen dari pelaku (tempat tinggalnya tetap)
- Selama proses migrasi, terjadi gerak berselang antara tempat tinggal dan tujuan, baik untuk bekerja atau tujuan yang lain

- Seorang **sirkulator**, tinggal di tempat tujuan untuk periode waktu tertentu (1,2,3 minggu, sebulan) dengan pola waktu tinggal yang membentuk pola tertentu.
- Biasanya, sirkulator menginap di tempat tujuan untuk jangka waktu tertentu
- Contoh sirkulator yang banyak terjadi di masyarakat misalnya, seluruh keluarga tinggal di Yogyakarta, akan tetapi suami atau istri bekerja di Jakarta. Migran ke Jakarta akan pulang seminggu sekali.

Komutasi

- Komutasi merupakan gerak penduduk harian yang berulang hampir setiap hari antara tempat tinggal dan tempat tujuan.
- Seorang **komuter**, tidak berencana menginap di tempat tujuan. Mereka hanya berpindah tempat untuk melakukan aktivitas, bisnis atau pun bekerja di tempat tertentu.
- Komuter biasanya disebut *penglaju*
- Contoh dari gerak komuter yang banyak terjadi di masyarakat, tinggal di Klaten, bekerja di Yogyakarta, sehingga penglaju akan berpindah setiap hari dari satu kota ke kota lain.

Urbanisasi

Urbanisasi dalam konteks gerak penduduk ini diartikan sebagai perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di desa. Terjadinya urbanisasi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor yang disebutkan sebelumnya, terkait dengan faktor pendorong dan penarik. Terjadinya urbanisasi menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk bagi daerah tujuan, sehingga pengertian urbanisasi menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah suatu

proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (Harahap, 2013).

Kajian urbanisasi dapat ditinjau dari berbagai macam pengetahuan. Secara demografi, urbanisasi adalah suatu proses yang ditunjukkan melalui perubahan penyebaran penduduk dan jumlah penduduk dalam satu wilayah (berakibat pada masalah pangan, pemukiman dan pekerjaan). Dari segi ekonomi, urbanisasi adalah perubahan struktural dalam sektor mata pencaharian (adanya peralihan pekerjaan dari agraris ke non agraris). Secara sosiologis, urbanisasi dikaitkan dengan sikap hidup penduduk dalam lingkungan pedesaan yang mendapat pengaruh dari kehidupan kota atau bisa disebut proses pengkotaan (kegagalan penyesuaian diri urbanit/orang yang melakukan urbanisasi menimbulkan lapisan sosial baru di kota, gelandangan, slum atau hunian liar).

Pengertian urbanisasi dalam perspektif sosiologis lebih menekankan pada sifatnya lebih mengarah pada sosial kultural. Gist dan Fava menegaskan lagi bahwa arti urbanisasi tidak terlepas dari konsep akulturasi, difusi, asimilasi dan bahkan amalgamasi. Sehingga pengertian semacam itu menjadikan urbanisasi sebagai bagian dari proses modernisasi, yang menurut Toynbee sebagai akibat “westernisasi dunia” (Rahardjo, 1983). Berkaitan konsep akulturasi, bahwa proses urbanisasi menunjukkan dominasi kebudayaan kota terhadap desa. Proses difusi (penyebaran) bukan hanya kebudayaan kota terhadap desa, tetapi juga terhadap masyarakat kota sendiri. Hal ini tampak dari adanya “desa-desa” di dalam kota. Sebagaimana pernyataan Gist dan Fava bahwa para urbanisan di negara-negara yang belum maju, tinggal di tempat-tempat yang mereka asing selama di kota-kota, dan hal itu semakin menambah tekanan psikis. Akibatnya mereka membutuhkan teman-teman yang berasal dari kerabat, desa atau daerah yang sama. Ia bekerja dengan orang-orang yang seasal dan sekerabat. Akibat yang lebih lanjut mereka tidak dapat melepaskan diri dari pola kehidupan desa tempat asal mereka. (Rahardjo, 2004)

Urbanisasi sebagai sebuah proses dapat diamati dari gejala; penggelambungan atau pembengkakan kota-kota, perpindahan penduduk dari desa dan kota dan perubahan suasana desa (*rural sphere*) menjadi suasana kota (*urban sphere*) menuju tercapainya urbanisme, yaitu cara hidup kota atau *urban way of life*. Pandangan ini berdasarkan konsep suatu sistem keruangan yang lengkap, yang melihat pusat dan tepi sebagai suatu sistem. Wilayah pusat diartikan sebagai suatu teritorial tertentu dengan subsistem masyarakat teratur yang memiliki kapasitas tinggi untuk memacu pembaharuan dan menyerap perubahan inovatif, sedangkan daerah tepi merupakan sistem yang jalur perkembangannya terutama dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang ada di pusat, sehingga daerah mempunyai ketergantungan yang substansial (Bintarto, 1983).

Secara umum, urbanisasi di Indonesia berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, pemukiman dan politik, baik di kota dan desa. Sebab-sebab tersebut diantaranya; penambahan penduduk alami di kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota dan berkembangnya daerah tepian. Perpindahan penduduk dari desa ke kota karena adanya daya dorong dari desa; rendahnya penghasilan per kapita, pengangguran yang nyata atau tersembunyi, tidak adanya kepemilikan lahan. Sementara faktor penarik di kota; kesempatan kerja yang luas dan upah yang menarik, daya beli penduduk, kesempatan mendapatkan pendidikan lebih luas (Bintarto, 1983), pusat kegiatan hiburan dan pariwisata, administrasi pemerintahan dan kegiatan politik.

Urbanisasi memberikan energi positif di kota dalam kegiatan ekonomi. Struktur ekonomi menjadi lebih bervariasi karena banyaknya berbagai macam usaha kegiatan jasa, perdagangan dan transportasi dari yang tanpa modal sampai modal besar. Sektor perdagangan yang marak adalah sektor informal sebagai penyangga sektor ekonomi yang lain. Pertumbuhan ekonomi sebagai akibat urbanisasi tersebut harus dibayar mahal dengan kesemrawutan dalam tata guna lahan; harga lahan yang tidak terkendali serta

pemanfaatan lahan untuk industri dan pemukiman. Pemukiman bagi urbanit yang tidak mampu menyesuaikan kehidupan kota membentuk pemukiman liar (slum) sebagai akibat dari harga tanah yang melambung dan juga bahan-bahan bangunan yang tidak terbeli. Secara sosiologis, pemukiman miskin tersebut menjadi “stasiun-stasiun antara” atau jembatan-jembatan yang menghubungkan gaya hidup desa dan kota. Ketiadaan perencanaan menjadikan stasiun-stasiun antara itu menjadi permanen.

Selain masalah agraria, permasalahan lingkungan juga perlu mendapat perhatian sebagai akibat perkembangan ekonomi, industri, perdagangan dan jasa. Tata ruang kota menjadi tidak terkendali karena bercampurnya pemukiman dengan kegiatan ekonomi masyarakat, pencemaran udara karena semakin banyaknya kendaraan bermotor yang diikuti dengan pencemaran suara. Polusi udara, suara ditambah dengan air semakin parah karena adanya sisa-sisa produksi dari industri. Berbagai macam pencemaran tersebut menyebabkan terkontaminasinya atmosfer dan menyebabkan *global warming*, yang ditandai dengan meningkatnya suhu di bumi, cuaca yang tidak menentu dan terjadinya perubahan iklim.

Pangan menjadi permasalahan pelik juga di kota saat ini. Kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang bias industri selama ini, mengabaikan pengembangan potensi pangan lokal dan pemenuhan kebutuhan warga. Solusi praktis yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah pangan ini adalah impor. Ketergantungan terhadap pangan impor ini menjadikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok menjadi fluktuatif. Ketika terjadi krisis kedelai pada tahun 2007 menyebabkan terjadi gejolak sosial, terutama di perkotaan karena harga tahu dan tempe sebagai bahan makanan yang paling murah mengalami kenaikan harga hampir 100 persen.

Dr. Muryanti, M.A.

Faktor Penarik urbanisasi diantaranya:

- Terjadinya sebuah perpindahan tren dari ekonomi agrikultur menjadi wilayah industrialisasi yang menandakan sebuah kemajuan dan perkembangan zaman. Sistem ekonomi industrialis yang menarik penduduk desa untuk mengikuti perubahan dan mencari peluang pekerjaan yang baru.
- Tersedianya pelayanan sosial dan kesehatan yang lebih baik di kota-kota besar yang menyebabkan masyarakat lebih memilih pindah untuk mendapatkan akses dan jaminan kesehatan yang terjamin.
- Di wilayah kota-kota besar cenderung lebih banyak pilihan lapangan pekerjaan. Penduduk desa ingin mengadu peruntungan dan ingin memperbaiki kehidupan mereka.
- Tersedianya transportasi dari desa ke kota yang memudahkan akses bagi siapa saja yang ingin melakukan perjalanan

Faktor Pendorong migran meninggalkan desa, diantaranya:

- Keadaan desa yang umumnya mempunyai kehidupan yang statis (mengalami perubahan yang sangat lambat). Hal ini bisa terjadi karena adat istiadat yang masih kuat atau pun pengaruh agama)
- Keadaan kemiskinan desa
- Lapangan kerja yang hampir tidak ada karena sebagian besar hidup penduduknya hanya bergantung dari hasil pertanian
- Pendapatan yang rendah di desa
- Keamanan kurang terjamin
- Fasilitas pendidikan sekolah atau pun perguruan tinggi yang kurang berkualitas
- Minimnya fasilitas hiburan(rumah.com.,2022).

Beberapa ciri khas dari gerak penduduk dari desa ke kota ini diantaranya :

- Gerak penduduk dapat diidentifikasi : dari desa ke desa, dari desa ke kota, dari kota ke desa dan dari kota ke kota.

- Keempatnya dalam bentuk migrasi, sirkulasi dan komutasi
- Gerak penduduk dari desa ke kota menyebabkan terjadinya kepadatan kota karena kota pun juga memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan kerja dan fasilitas di perkotaan. Banyaknya migran, komuter dan sirkulator ini menyebabkan susahny proses pencatatan. Banyaknya penduduk yang tinggal di kota, menyebabkan adanya fenomena Jakarta yang dikenal dengan penduduk siang dan penduduk malam

Kepadatan jumlah penduduk wilayah perkotaan di Indonesia merupakan dampak adanya urbanisasi dapat dilihat pada tabel dibandingkan dengan jumlah penduduk total.

Tabel 2 Jumlah Penduduk di Perkotaan dibandingkan Jumlah Penduduk Keseluruhan

| Tahun | Penduduk Total | Penduduk Perkotaan | |
|-------|----------------|--------------------|------|
| | | Jumlah (Jiwa) | % |
| 1961 | 97.018.829 | 14.358.372 | 14,8 |
| 1971 | 118.367.850 | 20.465.377 | 17,3 |
| 1980 | 146.776.473 | 32.845.769 | 22,4 |
| 1985 | 164.046.988 | 43.029.526 | 26,2 |
| 1990 | 179.247.783 | 55.433.790 | 30,9 |
| 1995 | 194.754.805 | 69.93 7.110 | 35,9 |
| 2000 | 201.241.999 | 85.380.627 | 42,4 |
| 2005 | 213.357.287 | 92.005.069 | 43,1 |
| 2010 | 237.641.326 | 118.345.380 | 49,8 |
| 2015 | 255.182.144 | 136.012.083 | 53,3 |
| 2020 | 270.203.917 | 153.205.621 | 56,7 |

Sumber: BPS, 2022

Data-data statistik jumlah penduduk di perkotaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi (orang pindah ke kota) sangat tinggi jumlahnya, baik di Indonesia atau pun di dunia. Berdasarkan

Dr. Muryanti, M.A.

tabel menunjukkan, sampai dengan tahun 2000, penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat dengan pesat, dibandingkan perkembangan penduduk di daerah pedesaan, faktor penting penyebabnya yaitu banyaknya daerah-daerah di pedesaan di beberapa daerah yang berubah menjadi perkotaan (urbanisasi). Di sisi lain kota besar seperti Jakarta dan beberapa kota besar lainnya mengalami penurunan jumlah urbanisasi (2000-2005)

Secara umum perkotaan global telah tumbuh secara signifikan dari 0,75 miliar pada 1950 menjadi 4,22 miliar pada 2018. Perkiraan yang diproyeksikan menunjukkan bahwa pada pertengahan abad kedua puluh satu, 68% populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan. Trend pertumbuhan penduduk global menunjukkan peningkatan yang konsisten pada penduduk perkotaan selama tahun 1950–2025, kemudian diproyeksikan akan melambat pada tahun 2025–2050.

Pola spasial urbanisasi menunjukkan bahwa episentrum urbanisasi telah bergeser dari global utara ke global selatan. Kota-kota di Asia dan Afrika saat ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain, dan perkiraan masa depan menunjukkan bahwa kota-kota di Afrika akan memimpin secara global selama 2015–2050 dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat. Jumlah kota mega dan kota besar terbanyak semakin menjamur di Asia dan Afrika. Proyeksi ini menunjukkan akan berlanjut di masa mendatang. Konsentrasi kota kecil dan menengah di kedua wilayah ini meningkat dari waktu ke waktu disebabkan oleh proses urbanisasi yang menguat. Dua negara Asia yakni China dan India menjadi rumah bagi beberapa kota terbesar di dunia di abad kedua puluh satu. Populasi perkotaan global masa depan akan terkonsentrasi terutama di Asia dan Afrika. Sebaliknya, beberapa kota di Amerika Utara dan Eropa menyusut (Kundu, 2020). Hasil evaluasi tentang gelembung urbanisasi China dengan menggunakan metode integral Hierarchical - Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (SMAA) untuk menyoroiti disparitas regional menunjukkan bahwa peringkat gelembung

urbanisasi berhubungan positif dengan tingkat pembangunan daerah. Studi ini memberikan kontribusi untuk evaluasi urbanisasi regional dan pembangunan berkelanjutan yang terjadi secara massif di China (Xing Gao, 2019).

Tantangan perubahan iklim berdampak di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang mengalami proses urbanisasi. Dengan meningkatnya tingkat urbanisasi, kota-kota di belahan bumi selatan menghadapi berbagai tantangan ketahanan pangan, kemiskinan, akses ke perumahan dan fasilitas dasar, terutama yang berkaitan dengan masyarakat miskin perkotaan. Dalam konteks ini, penting digarisbawahi bahwa kebijakan perkotaan nasional di negara-negara Asia dan Afrika, yang saat ini belum siap untuk menghadapi tantangan urbanisasi, perlu mengatasi masalah ini dengan cara merancang konsep pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan adanya tantangan globalisasi, pertumbuhan pendapatan dan munculnya kesenjangan spasial serta bonus demografi. Kebijakan perkotaan nasional dapat berperan dalam membimbing negara-negara ini menuju masa depan yang berkelanjutan dan tangguh.

Urbanisasi yang terjadi di beberapa wilayah kota-kota besar di Indonesia memiliki **dampak positif**, diantaranya :

- Urbanisasi merupakan faktor penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- Urbanisasi merupakan suatu cara untuk menyerap pengetahuan dan kemajuan
- Urbanisasi yang menyebabkan terjadinya perkembangan kota, selanjutnya memberikan getaran (resonansi) perkembangan bagi daerah-daerah perdesaan sekitarnya.

Sedangkan **dampak negatif** urbanisasi diantaranya:

- Urbanisasi dapat menimbulkan masalah “*over urbanization*” dan “*urban primacy*”. “*Over urbanization*” yaitu kelebihan penduduk sehingga melebihi daya tampung kota. Hal ini merupakan gejala makin meningkatnya daya tarik kota besar yang

Dr. Muryanti, M.A.

menimbulkan *dysfunctional condition* yang dapat dilihat karena adanya ketimpangan antar daerah dan semakin beratnya beban pemerintah kota.

- *Urban primacy* merupakan sebuah fenomena timbulnya dominasi kota besar terhadap kota-kota kecil sehingga kota-kota kecil kurang bisa berkembang. Dominasi tersebut dapat dilihat dari konsentrasi ekonomi, alokasi sumber daya, pusat pemasaran, pusat pemerintahan dan nilai-nilai sosial politik. *Over urbanization* dan *urban primacy* merupakan masalah yang dirasakan kota dimana dapat menimbulkan masalah-masalah yang mempengaruhi perkembangan suatu kota. Adapun masalah-masalah yang dapat ditimbulkan diantaranya: kejahatan, pengangguran dan permukiman kumuh.
- Saat ini, semakin minim lahan kosong di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan adanya ledakan penduduk kota akibat adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Saat ini lahan kosong di daerah perkotaan sangat jarang ditemui akibat banyaknya berdirinya bangunan perumahan atau bangunan liar yang didirikan oleh para penduduk migran.
- Menambah polusi dan kemacetan di daerah perkotaan akibat banyaknya penduduk yang lalu lalang bekerja, aktivitas pendidikan, hobi dan bisnis yang menyebabkan pencemaran udara dari asap sepeda motor atau mobil yang berdampak pada kesehatan lingkungan.
- Keterbatasan hunian di kawasan Perkotaan
 - Munculnya daerah kumuh
 - Mudahnya penyebaran penyakit berbahaya
 - Terjadinya kemacetan
 - Berkurangnya penduduk usia produktif di desa

Urbanisasi yang berjalan dengan cepat bisa agak dikendalikan dengan berbagai cara, diantaranya :

- Perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan seperti menyediakan berbagai sarana kesehatan, pendidikan hingga fasilitas transportasi yang memadai.
- Menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada. Sebagai contoh, pemerintah bisa melakukan edukasi mengenai sistem pemasaran secara daring untuk membantu penduduk desa dalam memasarkan dan menjual produk hasil pangan, sandang dan papan yang dimilikinya dengan mudah. Saat ini program ini bisa dikatakan berhasil dengan adanya dana desa.
- Membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama.

2. **Migrasi Internasional**

Migrasi Internasional merupakan perpindahan penduduk baik secara individu maupun kelompok dari Negara asal ke Negara lainnya (Rusli, 2012). Migrasi ini terjadi antar negara. Migrasi Internasional dikategorikan menjadi 2 yaitu : (1) **emigrasi** merupakan migrasi internasional yang dipandang dari negara pengirim atau asal (pelakunya emigran) – Negara ASAL dan (2) **imigrasi** merupakan migrasi internasional yang dipandang dari negara penerima (pelakunya imigran) – Negara TUJUAN.

Migrasi internasional merupakan fenomena yang semakin menguat pada abad 20 menuju abad 21. Masey menjelaskan bahwa pada akhir abad ke-20, semua negara-negara maju telah menjadi negara imigrasi. Pengakuan negara – negara atas fenomena ini sangat penting karena munculnya arus migrasi cukup besar di seluruh dunia, sementara itu kebijakan yang mengatur jumlah, karakteristik, dan syarat-syarat orang – orang luar yang masuk ke negara bangsa dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi politik masing-masing negara.

Dr. Muryanti, M.A.

Sejarah migrasi Internasional berlangsung sudah sangat lama, seiring dengan terjadinya proses kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara Barat ke negara lain dengan tujuan ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya. Pada masa itu arus migrasi terjadi dari Eropa ke negara-negara lain. Sebaliknya pada abad ke-21, hampir semua Negara Maju, termasuk Eropa menjadi tujuan (negara imigran) migran dari negara-negara berkembang. Terkait dengan migrasi, setiap negara memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur imigran yang datang ke negaranya (kajian ekonomi-politik).

Dalam sejarah migrasi, tahapan-tahapan migrasi terjadi melalui beberapa fase :

- (1) Tradisional dan Pramodern tidak terdapat migrasi desa-kota, sedikit terjadi sirkulasi
- (2) Transisi Awal; migrasi desa-kota dan migrasi desa-desa (antar desa) meningkat, sirkulasi meningkat
- (3) Transisi Akhir, migrasi desa-kota dan migrasi (antar desa) berkurang, adanya sirkulasi
- (4) Industri Maju (modern), terjadi migrasi kota-kota (antar daerah perkotaan) dalam jumlah besar, dan sirkulasi meningkat. Migrasi desa-kota dan migrasi antar desa menurun. Dominasi migrasi antar atau dalam perkotaan dan sirkulasi dalam jumlah besar

Dalam perkembangannya (fase migrasi industri maju), migrasi Internasional terbagi menjadi 5 periode perkembangan, yaitu :

Pertama dikenal dengan periode dagang, dari sekitar 1500-1800. Pada saat ini, imigrasi dunia didominasi oleh arus keluar Eropa dan berasal dari proses kolonisasi dan pertumbuhan ekonomi di bawah pedagang kapitalisme. Selama 300 tahun, Eropa datang menghuni sebagian besar dari Amerika, Afrika, Asia, dan Oseania (Tinker 1995; Lucassen 1995, Altman 1995; Heffernan 1995). Meskipun jumlah pasti imigran kolonial tidak diketahui, arus itu cukup untuk membangun kekuasaan Eropa di sebagian besar dunia.

Selama periode ini, emigran umumnya jatuh ke dalam empat kelas: pemukim agraris, administrator dan pengrajin, pengusaha yang mendirikan perkebunan untuk memproduksi bahan baku bagi pertumbuhan ekonomi merkantilis Eropa dan migran narapidana yang dikirim ke koloni pidana di luar negeri.

Periode **kedua**; terjadi pada awal abad ke-19 sebagai dampak dari pembangunan industri di Eropa dan penyebaran kapitalisme ke bekas koloni di Dunia Baru (Hatton dan Williamson 1998). Migrasi dalam periode ini merupakan imigran antarbenua dari Eropa dan Jepang selama tahun 1846-1924. Awal industrialisasi, sejumlah 48 juta emigran meninggalkan benua Eropa, jumlah yang mewakili sekitar 12% dari penduduk Eropa pada pergantian abad.

Periode **ketiga**; terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20, merupakan periode pertama dari globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan arus besar modal, bahan baku dan sirkulasi barang antara Eropa, Amerika, Asia dan Pasifik. Ekonomi global memperluas gerak penduduk dalam jumlah banyak, berakar pada transformasi struktural yang melampaui negara-negara Eropa, karena industri mereka masuk ke dalam rezim perdagangan global. Selama era pertama globalisasi, emigran Eropa pergi ke sebagian wilayah bekas koloni Eropa yang mengalami pergolakan industrialisasi dan pembangunan yang pesat.

Periode **keempat**; dikenal dengan migrasi pasca-industri yang muncul selama pertengahan tahun 1960-an. Periode ini tidak lagi didominasi oleh arus keluar dari Eropa ke beberapa wilayah, imigrasi menjadi benar-benar dalam lingkup global. Jumlah dan keragaman negara sebagai pengirim dan penerima meningkat, dengan pasokan imigran global bergeser dari Eropa ke negara-negara berkembang dari Dunia Ketiga (Castles dan Miller 1993). Periode ini Eropa mengalami penurunan jumlah arus imigran dunia. Tahun 1970-an di Eropa, negara yang semula sebagai negara emigrasi (Italia, Spanyol, dan Portugal) mulai menerima imigran dari Timur Tengah dan Afrika (Fakiolas 1995, Sole 1995), situasi yang sama di negara –

Dr. Muryanti, M.A.

negara Teluk Persia pasca kenaikan harga minyak tahun 1973, telah menjadi bagian dari negara imigrasi tenaga kerja (Birks dan Sinclair 1980; Abella 1995). Pada 1980-an, migrasi internasional menyebar ke Asia, tidak hanya ke Jepang, tetapi juga ke Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Thailand (Loiskandl 1995, Bun 1995, Fee 1995, Hugo 1995).

Periode **kelima**; dikenal dengan sebutan migrasi abad ke-21. Pada masa ini terdapat kestabilan ekonomi, kelimpahan modal yang mempercepat terjadinya perdagangan bebas di negara maju. Kestabilan politik Internasional mempengaruhi terjadinya arus migrasi, modal dan informasi. Proses migrasi terjadi secara global yang mengikuti perkembangan pasar bebas. Negara-negara Eropa bermigrasi ke negara lain, sedangkan negara-negara Koloni juga sudah terbiasa bermigrasi ke Eropa dan Amerika.

SOLUSI PERMASALAHAN KOTA (DAMPAK MIGRASI)

Permasalahan utama yang muncul di perkotaan sebagai dampak migrasi dari pedesaan tidak dapat dipisahkan dari beberapa hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat, terkait dengan faktor lingkungan, pangan dan kepadatan penduduk yang meningkat dengan pesat. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat kota dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah memberlakukan program Keluarga Berencana (KB).
2. Menciptakan lapangan kerja di perkotaan pada sektor industri kreatif.
3. Melakukan program transmigrasi, sehingga penduduk tidak menumpuk di wilayah kota tertentu
4. Melaksanakan program perbaikan gizi, melalui berbagai macam program pemerintah (posyandu) atau kerjasama dengan perusahaan

5. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit.
6. Penyediaan air bersih.
7. Penyediaan rumah layak huni
8. Menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan, seperti gedung, perpustakaan, taman, laboratorium dan alat keterampilan.
9. Meningkatkan fasilitas ruang publik untuk berbagai macam aktivitas.
10. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
11. Melakukan pengelolaan sampah.
12. Merapikan lay out perkotaan sehingga lebih menarik.
13. Melakukan penataan kota yang berwawasan lingkungan (detik.com, 2022).

SOLUSI PERMASALAHAN DESA SEBAGAI DAMPAK MIGRASI

Kota merupakan tujuan tempat dalam proses migrasi. Berbagai macam penyebab dan faktor pendorong yang menyebabkan masyarakat bergerak ke kota dan meninggalkan desa. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara masyarakat yang tinggal di kota dan desa oleh karena pergerakan penduduk yang tidak merata. Desa yang ditinggalkan oleh warganya sebagai akibat dari migrasi ini muncul berbagai macam persoalan sebagai akibat dari berkurangnya tenaga produktif di desa. Beberapa upaya yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diantaranya:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan
Adanya jumlah penduduk yang tidak merata menyebabkan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi penduduk desa agar para penduduk desa tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang belum tentu ada hasilnya. Dengan adanya lapangan pekerjaan di desa ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa. Pemerintah

Dr. Muryanti, M.A.

Presiden Jokowi saat ini membuat kebijakan menciptakan lapangan pekerjaan di desa dengan menggelontorkan dana desa. Dana desa tersebut diperuntukan untuk pembangunan desa, salah satu yang nampak yaitu pembangunan infrastruktur dan desa wisata.

2. Pembangunan infrastruktur

Dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa-desa diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat membantu masyarakat desa untuk semakin maju dan tidak tertinggal karena adanya akses yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat desa.

3. Peningkatan dan Inovasi Pembangunan Pertanian

Dengan adanya peningkatan pembangunan sarana produksi pertanian di desa dapat membantu masyarakat desa meningkatkan produksi pertanian yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Mulai dari cara bertani dan memilih bibit yang lebih unggul serta penggunaan teknologi yang canggih, hal tersebut setidaknya dapat membantu para petani agar lebih cepat bekerja dan meningkatkan hasil pertanian mereka. Mengingat selama ini berbagai macam kebijakan pertanian kurang memperhatikan kebutuhan petani. Termasuk di dalamnya melakukan inovasi pengembangan produk pertanian, mulai dari awal sampai pengemasan produk.

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Penciptaan ekonomi kreatif merupakan sebuah keniscayaan dikembangkan di pedesaan. Pada era perkembangan teknologi dan informasi saat ini, desa menjadi tempat yang menarik dan unik untuk dikembangkan menjadi sebuah sumber ekonomi kreatif. Dengan berbekal kearifan lokal diharapkan bisa mendongkrak perkembangan ekonomi desa. Dalam berbagai macam bentuk; pengemasan produk, kreativitas pengembangan pariwisata atau pun inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi.

Strategi yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi persoalan migrasi dan kesempatan kerja secara menyeluruh, setidaknya mengandung tujuh elemen utama, yaitu:

1. Penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa dan kota
Keseimbangan kesempatan ekonomi yang lebih layak antara desa dan kota merupakan suatu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam strategi penanggulangan masalah-masalah pengangguran di desa maupun kota di berbagai negara-negara berkembang, serta untuk mengurangi migrasi dari desa ke kota. Titik utama dari usaha tersebut harus diletakkan pada pembangunan sektor pedesaan, perluasan industri kecil ke seluruh negeri, dan peninjauan kembali orientasi kegiatan ekonomi serta investasi sosial yang ditujukan bagi daerah-daerah pedesaan, yang kesemuanya ini harus dilaksanakan secara integratif atau terpadu.
2. Perluasan industri-industri kecil yang padat karya
Komposisi atau bauran output sangat mempengaruhi jangkauan (dalam banyak hal, termasuk juga lokasi) kesempatan kerja karena beberapa produk (terutama barang-barang konsumsi pokok) membutuhkan lebih banyak tenaga kerja bagi setiap unit output dan setiap unit modal daripada produk-produk atau barang lainnya. Perluasan industri ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: secara langsung melalui investasi dan penyediaan insentif oleh pihak pemerintah, terutama bagi kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor informal di perkotaan; dan secara tidak langsung melalui redistribusi pendapatan (yang sudah ada maupun yang berasal dari pertumbuhan ekonomi yang akan datang) kepada orang-orang miskin di desa-desa yang struktur permintaan barang konsumsi bisa dipenuhi oleh produk lokal (lebih mudah dan padat karya) daripada kebutuhan konsumsi orang-orang kaya (yang sebagian bahkan harus diimpor)

3. Penghapusan distorsi harga faktor-faktor produksi
Kita memiliki cukup banyak bukti yang dapat menunjukkan bahwa upaya-upaya penghilangan distorsi harga faktor produksi, terutama melalui penghapusan berbagai subsidi modal dan mengurangi pertumbuhan tingkat upah perkotaan diatas harga pasar, akan mampu meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki penggunaan sumber daya modal langka yang tersedia. Akan tetapi bagaimana dan seberapa cepat kebijakan ini harus diterapkan agar berhasil tidaklah terlalu jelas. Lagi pula, implikasinya terhadap arus migrasi harus diketahui secara pasti. Jelasnya, kebijakan koreksi harga saja tidak akan cukup untuk mengubah secara mendasar situasi lapangan kerja saat ini.
4. Pemilihan teknologi padat karya yang tepat
Salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan setiap program penciptaan kesempatan kerja dalam jangka panjang, baik pada sektor industri di perkotaan maupun pada sektor pertanian di pedesaan, adalah terlalu besarnya ketergantungan teknologi dari negara-negara berkembang terhadap mesin-mesin dan aneka peralatan canggih (biasanya hemat tenaga kerja) yang diimpor dari negara-negara maju. Semua negara-negara berkembang harus melepaskan ketergantungan dan mengalihkan perhatiannya untuk mencari teknologi-teknologi produksi yang tepat guna, sesuai dengan kondisi dasar perekonomian sendiri. Upaya tersebut juga harus dikaitkan dengan program pengembangan perusahaan-perusahaan kecil yang serba padat karya baik di desa maupun di kota.
5. Pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja
Munculnya fenomena “pengangguran berpendidikan” di banyak negara berkembang mengundang berbagai pertanyaan tentang kelayakan pengembangan pendidikan (khususnya pendidikan tinggi/tingkat universitas) secara besar-besaran,

yang terkadang sangat berlebihan. Pendidikan formal kini telah menjadi alat untuk menyeleksi calon pekerja. Karena pekerjaan di sektor modern berkembang lebih lambat daripada jumlah orang yang menyelesaikan pendidikan, maka diperlukan perpanjangan masa penyelesaian studi dan seleksi lebih ketat terhadap para lulusannya.

6. Pengurangan laju pertumbuhan penduduk
Dalam upaya pengentasan kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan, terutama bagi kaum wanita yang disertai dengan penggalakkan program-program keluarga berencana dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah pedesaan. Sudah jelas bahwa setiap upaya pemecahan jangka panjang atas berbagai masalah ketenagakerjaan dan urbanisasi di negara-negara dunia ketiga harus melibatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk.
7. Mendesentralisasikan kewenangan ke kota dan daerah sekitarnya
Pengalaman menunjukkan bahwa desentralisasi kekuasaan ke kabupaten-kabupaten merupakan langkah penting dalam perbaikan kebijakan perkotaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi kota besar sangat berbeda dengan kota kecil, demikian pula kondisi antara kawasan yang berbeda didalam suatu negara, dan kebijakan harus dirancang untuk merefleksikan perbedaan-perbedaan ini (Aningtyas, 2016).

BAB III

DINAMIKA MASYARAKAT KOTA

POTRET UMUM KOTA

Kota identik dengan kemegahan, gemerlapan, pemusatan penduduk, pemusatan kegiatan perdagangan dan administrasi bagi masyarakat. Masyarakat kota pun secara otomatis memiliki karakter yang megah, gemerlap, berelasi dengan orang lain dalam jumlah yang besar dan beraneka ragam, memiliki update informasi perkembangan barang-barang produksi dan kecanggihan sarana dan peralatan komunikasi. Pesatnya dinamika perkembangan masyarakat kota, menjadikan hampir semua masyarakat berkeinginan tinggal di kota atau memiliki gaya dan standard hidup kekotaan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya migrasi ke wilayah perkotaan.

Pencitraan yang ditujukan ke kota sebagai sesuatu yang indah, gemerlap, bersih dan menjanjikan kehidupan masa depan yang lebih baik menjadi impian dari setiap masyarakat saat ini. Imajinasi tentang kaum miskin kota dan krisis

Dr. Muryanti, M.A.

lingkungan di perkotaan tidak pernah ada dalam benak kita. Apalagi dengan adanya perkembangan industri kreatif menjadikan wilayah perkotaan dalam posisi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan dan pemenuhan gaya hidup (kebudayaan) yang cantik dan elegan. Definisi perkotaan sangat beranekaragam tergantung dari fokus studi terhadap perkotaan itu sendiri. Pembahasan permasalahan kota ini dilakukan secara spasial, artinya dikaji dengan memperhatikan dua dimensi dan ruang lingkup yang saling mempengaruhi, yakni lingkungan alam dan lingkungan yang berada di atas lingkungan alam, yakni sosial masyarakat kota (Rahardjo, 1999).

Jika kita cermati tentang perkotaan secara detail, pengertian dan definisi perkotaan dapat kita tinjau secara fisik dan sosial.

1. Definisi Kota Secara Fisik (Bentang Alam)

Menurut Bintarto dalam perspektif geografi, kota diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan daerah lainnya (Bintarto, 1983). Pemusatan penduduk yang *overlapping* menyebabkan kota mengalami pemekaran wilayah secara fisik. Dengan pola-pola pemekaran wilayah yang beraneka ragam polanya. Pemekaran wilayah ini, beberapa kasus di Indonesia terjadi pada provinsi dan kota baru. Berdasarkan jumlah penduduknya, kota-kota dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan:

1. Kota kecil, bila jumlah penduduknya antara 20.000-50.000 jiwa
2. Kota sedang, bila jumlah penduduknya antara 50.000-100.000 jiwa
3. Kota besar, bila jumlah penduduknya antara 100.000-1.000.000 jiwa
4. Kota metropolitan, bila jumlah penduduknya antara 1.000.000-10 juta jiwa

5. Kota megalopolis, bila jumlah penduduknya lebih dari 10 juta jiwa (Pontoh, 2008)

Pengertian kota secara fisik dapat diartikan sebagai kawasan yang terbangun (*built up area*) yang letaknya terkonsentrasi (berdekatan) dengan pola meluas dari pusat sampai ke pinggiran. Dalam konteks fisik, kota terdiri dari : bangunan-bangunan fisik yang berada di permukaan tanah, semua instalasi-instalasi yang berada di bawah tanah dan kegiatan-kegiatan yang berada di luar angkasa. Unsur-unsur yang mempengaruhi kota, diantaranya: topografi tapak, bangunan, struktur (bangunan lain, seperti jembatan, pengilangan minyak, gardu listrik), ruang terbuka, kepadatan perkotaan, iklim, vegetasi dan kualitas estetika.

2. Definisi Kota Secara Sosial-Ekonomi dan Politik

Sebuah kota memiliki struktur sosial dan kultural unik yang membedakan dengan desa. Kota merupakan gabungan dari struktur-struktur sosial yang terpisah-pisah, tersusun secara kebetulan dan memiliki struktur pemerintahan dan jaringan pasar luas (Geertz, 1986). Perkembangan perkotaan sendiri tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat perkotaan yang selalu berubah dalam putaran waktu, ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya. Perubahan dalam waktu cepat tersebut membentuk struktur masyarakat baru, yang pada saat ini sudah tidak ada batasnya relasi antar sesama, tidak ada jarak antara satu wilayah dengan wilayah lain, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Hampir sama dengan pernyataan Geertz, Mayer menjelaskan bahwa kota pada awalnya merupakan tempat bermukim masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Kota bukan hanya wilayah yang terdiri dari rumah-rumah, gedung-gedung, masjid, gereja dan jalan-jalan, tetapi makna kota lebih pada masyarakat yang menghuni dan menciptakan bangunan fisik tersebut. Kota dapat dimaknai sebagai sistem nilai-nilai, perasaan, kenangan, hubungan-hubungan dan keseluruhannya membentuk sistem atau organisasi masyarakat kota.

Dr. Muryanti, M.A.

Wirth merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, yang dihuni oleh orang-orang heterogen kedudukan sosialnya. Menurut Wirth jumlah penduduk dan kepadatan kota termasuk tinggi, tempat tinggal permanen, masyarakat heterogen, yang menyebabkan hubungan sosial masyarakat perkotaan menjadi longgar, acuh dan tidak pribadi (*impersonal realations*) (Rahardjo,1999).

Pandangan Wirth tentang kota tidak jauh berbeda dengan analisa Durkheim tentang solidaritas organik dan mekanik. Solidaritas mekanik terbentuk berdasarkan kesadaran kolektif (*collective conscience*) yang merujuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen bersama pada masyarakat yang sama. Indikator yang paling jelas dalam masyarakat ini yakni berlakunya hukum yang bersifat menekan (*repressif*) bagi masyarakat yang melanggar aturan kolektif. Ciri khas solidaritas mekanik yakni tumbuhnya solidaritas berdasarkan pada tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen. Berlawanan dengan itu, solidaritas organik munculnya pembagian kerja dalam masyarakat. Solidaritas ini berdasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang bertambah sebagai akibat dari bertambahnya spesialisasi pembagian pekerjaan. Pembagian kerja menggeser peran yang sebelumnya tumbuh karena adanya kesadaran kolektif. Kesadaran organik ditandai dengan pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (*restitutif*). Pertumbuhan dalam pembagian kerja tidak menghancurkan kesadaran kolektif, hanya saja mengurangi arti pentingnya pengaturan terperinci daam kehidupan sehari-hari (Johnson, 1976). Karakter masyarakat perkotaan merupakan perwujudan dari solidaritas masyarakat organik.

Max Weber menjelaskan kemunculan kota karena adanya pasar sebagai ciri utamanya. Pada awalnya masyarakat kota dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Komoditas yang diperjualbelikan di pasar lokal tersebut diproduksi oleh penduduk setempat. Keberadaan pasar tersebut mempengaruhi relasi sosial yang membentuk rasionalitas masyarakat kota. Rasionalitas ekonomi

lebih dominan dibandingkan rasionalitas yang lain. Masyarakat memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam setiap relasi. Hal ini yang menjadi dasar dari sifat kosmopolitan yang merupakan hakikat kota.

Marx dan Engels memandang kota sebagai perserikatan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar supaya anggota masing-masing dapat mempertahankan diri. Dalam tahap yang lebih lanjut, gejala tersebut menyebabkan terjadinya alienasi. Masyarakat kota rentan mengalami keterasingan karena pertahanan yang dibentuk oleh masing-masing individu di dalamnya.

Sjoberg mengatakan munculnya kota karena adanya berbagai kelompok atau kategori sosial yang sifatnya khusus. Menurutnya kelompok literasi (golongan intelegensia kuno seperti pujangga, sastrawan dan ahli keagamaan) merupakan cikal bakal terbentuknya kota. Munculnya kota berhubungan erat dengan adanya kelompok khusus non agraris, dimana kelompok yang berpendidikan merupakan bagian penduduk yang penting, yang menjadi titik awal pembagian kerja sebagai ciri khas masyarakat kota (P.J.M Nas, 1979).

Hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan bersifat kosmopolitan (mempunyai wawasan yang luas, terjadi dari orang-orang yang berasal dari penjuru dunia). Hubungan-hubungan sosial di dalam kehidupan kota digambarkan sebagai hubungan yang impersonal, sepintas lalu, terkotak-kotak, dimana seseorang lebih bebas menentukan hubungannya sendiri. Constandse dalam Hoekveld (1973) berpandangan bahwa: (1) kota bersifat besar dan memberikan gambaran yang jelas, sedangkan desa itu kecil dan tidak memberikan gambaran jelas; (2) kota mengenal adanya pembagian kerja yang luas, desa lebih homogen; (3) struktur sosial di kota terdeferensiasi luas, sedangkan di desa lebih sederhana; (4) individualitas memainkan peranan dalam kebudayaan kota, sementara di desa masyarakat hidup dalam kelompok primer; (5)

Dr. Muryanti, M.A.

kota mengarahkan gaya hidup pada kemajuan, sementara desa lebih berorientasi pada tradisi dan cenderung konservatif.

Pembedaan masyarakat desa dan kota tersebut dipengaruhi oleh: (1) pandangan dalam sosiologi ada pembedaan masyarakat; *gemeinschaft dan gessellschaft* (Tonnie's), status dan kontrak (Maine), Solidaritas mekanik dan organik (Durkheim), masyarakat Folk dan Urban (Redfield); (2) gambaran mengenai kehidupan manusia dan masyarakat kota yang diidam-idamkan; rasional, bebas dan mandiri atau masyarakat kota yang heterogen, kosmopolitan dan impersonal (tidak bersifat pribadi); (3) adanya tahap-tahap perkembangan masyarakat desa menuju kota yang dapat digambarkan dari fenomena urbanisasi.

Urbanisasi di negara maju meningkat beriringan dengan kemunculan revolusi industri karena adanya berbagai macam faktor produksi yang saling berkaitan (Johnson, 1972). Pada masa awal revolusi industri, kekuatan pokok perubahan terjadi karena adanya penggantian tenaga angin, air, hewan dan manusia oleh minyak tanah, gas dan batu bara. Terjadi perubahan *subsistence agriculture* ke produksi untuk pasar yang bergandengan dengan peningkatan produksi pertanian. Alat pengangkutan juga diperbaiki dengan dibangun infrastruktur jalan-jalan untuk lalu lintas dan kanal-kanal sebagai syarat untuk mendirikan pabrik dan penjualan hasil produksi. Semakin baiknya pengangkutan ini yang menyebabkan adanya jarak antara tempat pekerjaan dan tempat kediaman. Adanya kota-kota yang berdekatan merupakan dorongan terjadinya perluasan kawasan industri yang menghemat biaya produksi, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja. Adanya kawasan suburban semakin memberikan fasilitas, menyebabkan masyarakat meninggalkan tengah kota yang kebanyakan ditempati oleh masyarakat slum (PJM.Nas, 1979).

Menurut Flanagan (2010), pengertian masyarakat perkotaan menurut perspektif Sosiologi dapat dilihat dari perspektif klasik, pandangan sosiologi dari Jerman dan Amerika.

Tabel 3 Pengertian Kota dari Perspektif Sosiologi

| Tokoh | Pengertian Kota | |
|-------------------------|--|--------------------|
| Perspektif Klasik | | |
| Ferdinand Tonnies | Gemeinsschaft | Gessellschaft |
| Henry Maine | Masyarakat komunal | Individu komersial |
| Emile Durkheim | Status | Kontrak |
| Perspektif dari Jerman | | |
| Max Weber | Tipe ideal, kota adalah pasar, pembatasan otonomi politik, berhubungan kelembagaan | |
| George Simmel | Mental hidup metropolis overstimulasi dan pertukaran uang | |
| Oswald Spengler | Kota adalah jiwa, manusia merasa super terhadap desa | |
| Perspektif dari Amerika | | |
| Robert Park | Kota adalah area ekologi yang masing-masing memiliki kode moral | |
| Louis Wirth | Urbanisme adalah <i>way of life</i> (efek dari ukuran, kepadatan, heterogenitas) | |

Sumber : *Wiliam G. Flanagan, 2010*

Pengertian kota menurut pandangan Sosiologi, yang dapat dilihat dari aspek kultural dan struktural.

Tabel 4 Perbedaan Pendekatan antara Kultural dan Struktural

| Variabel | Pendekatan Kultural | Pendekatan Struktural |
|---------------------------------|---|---|
| Karakteristik masyarakat Urban | Ukuran dan kepadatan kota memberikan perbedaan berpikir, berinteraksi dan berorganisasi | Kota merepresentasikan kekuatan konsentrasi ekonomi-politik dan relasi yang luas dalam lingkungan Internasional |
| Ideologi | Bentuk kota adalah progresif dan merefleksikan modernitas, organisasi modern dan teknologi | Bentuk kota adalah lokus dari kesejahteraan dan keistimewaan dan akumulasi kapital |
| Penekanan kekuatan | Menekankan pada ekologi dan komunitas, lingkungan lokal | Menekankan pada ekonomi politik dan fokus keistimewaan |
| Pembangunan dan Keterbelakangan | Dalam teori modernisasi, kota melakukan pembangunan melalui perluasan dari perilaku modern, teknologi dan bentuk organisasi | Ekonomi politik berpendapat bahwa kota adalah parasit di dunia ketiga yang menunjukkan adanya pembangunan yang tidak seimbang di Internasional. |
| Stratifikasi | Kemiskinan disebabkan oleh faktor budaya | Struktur yang tidak adil mengakar dalam sistem ekonomi dunia dan pertumbuhan regional |

Sumber : *Wiliam G. Flanagan, 2010*

Label-label yang melekat dalam perkotaan :

1. Pendekatan kulturalis yang berakar pada tradisi Tonnie's, Durkheim dan Wirth berdasarkan premis ekologis (Flanagan, 2010). Lingkungan perkotaan menghasilkan budaya yang berbeda (keengganan sosial) (Wirth, 1938) dan kekompakan dan kekayaan subkultur (Fischer, 1982). Kota merupakan lingkungan sosial yang mampu melahirkan perasaan dan cara bertindak baru. Permasalahan kultural diproduksi oleh karakter struktural perkotaan, dimana ukuran dan kepadatan menghasilkan urbanisme, yang diartikan sebagai ekspresi subkultur dari masing-masing ruang di perkotaan dan masyarakat yang lebih luas.
2. Pendekatan strukturalis yang melihat dari kerapatan (Wirth) atau massa kritis (Fischer) merupakan hal yang tidak perlu dirisaukan. Organisasi sosial (ukuran populasi tertentu) akan memproduksi bagaimana seorang individu bertindak dan berinteraksi -tentang kehidupan mental di perkotaan sebagai dampak dari ekologi dan perilaku perkotaan.

J.H. Boeke menyatakan bahwa interaksi desa dan kota menempatkan desa pada posisi obyek. Desa berfungsi sebagai penyedia tenaga kasar, bahan-bahan baku dan bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh warga kota. Disamping itu desa juga harus membeli hasil-hasil industri manufaktur, teknologi dan informasi. Pada perputaran uang yang cepat, desa harus menyewakan atau menjual aset yang dimilikinya kepada masyarakat kota (Boeke, 1983). Kajian postmodern dapat menjelaskan bahwa desa dan kota tidak terelakkan menjadi pasar dari hasil produksi saat ini. Pada awalnya, industrialisasi menempatkan produksi diatas segalanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahap berikutnya, pada saat terjadi over produksi dari produk industri, sehingga perhatian pada konsumsi lebih besar untuk mengurangi over produksi. Baudrillard menyatakan kebutuhan dan konsumsi merupakan perluasan kekuatan produktif yang diorganisir. Konsumsi

bukanlah tambahan kecil bagi perputaran kapital, tetapi merupakan kekuatan produktif yang penting (Ritzer, 2004). Untuk membangkitkan konsumsi dan mengontrol obyek dan individu di masyarakat, maka sistem obyek konsumen dan sistem komunikasi pada periklanan menjadi penentu sebuah kode signifikansi. Obyek menjadi tanda (*sign*) dan nilainya ditentukan oleh sebuah aturan kode (yang ditandai). Kode dalam pengertian umum merupakan sistem aturan-aturan guna menggabungkan seperangkat terma yang lebih stabil dalam pesan. Kode merupakan sistem kontrol terhadap tanda. Dalam terma wacana obyek, setiap orang mampu membaca dan memahami komunikasi seperti itu (Baudrillard, 2005) untuk kemudian mengkonsumsi. Pada era konsumsi, masyarakat merupakan apa yang mereka konsumsi dan berbeda dari tipe masyarakat lain berdasarkan obyek konsumsi, walaupun yang mereka konsumsi itu berupa tanda (Ritzer, 2004). Kondisi ini terjadi pada masyarakat desa dan kota. Masyarakat adalah pasar.

SEJARAH KOTA DI INDONESIA

Kajian perkotaan saat ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan sebuah kota sebelumnya. Menganalisis sebuah kota, menjadi sebuah cerita yang menarik dengan mengetahui sejarah perkembangannya. Pengetahuan sejarah ini menjadikan pemahaman utuh, tidak terpecah-pecah dan terintegrasi dengan konteks kekinian. Terkait dengan tahapan perkembangan kota dari kronologis waktu yang dipergunakan untuk memudahkan melihat tahapan perkembangan masyarakat perkotaan. Tahapan perkembangan masyarakat kota dapat dikategorikan menjadi tahapan; tradisional, transisi dan modern. Kategori ini dapat mempermudah kajian perkotaan dan dapat memetakan wilayah dan masyarakat berada pada kategori yang mana.

Pertumbuhan yang dramatik dalam masyarakat kota, diawali dari masyarakat pedesaan agraris yang mengalami perubahan menjadi

Dr. Muryanti, M.A.

masyarakat industri melalui proses urbanisasi yang kecepataannya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan sarana komunikasi. Pertumbuhan kota pada masa kini, tentunya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kota sebelumnya.

Jika kita kaji sejarah pada masa Suku Maya di Amerika Selatan sudah membentuk peradaban kota selama 1500 SM sampai 1500 M. Sebelum kedatangan bangsa Eropa mereka tidak dikenal sebagai suku Maya, akan tetapi layaknya kehidupan kita, yang memiliki saudara, kekerabatan atau kinship. Keberadaannya di Meksiko, Honduras, Guatemala dan El Salvador. Mereka menggunakan banyak bahasa dan satu sama lain saling bersaing (tidak bersatu), seperti Cikal dan Calakmul. Peninggalannya tersebar di area seluas 325.000 km persegi. Kota-kota Maya, terdiri dari dataran-dataran tinggi atau rendah, hutan hujan, dan pantai. Kota-kota besar, seperti Cikal merupakan peninggalan terbaik bangsa Maya. Piramida-piramida, kuil-kuil dan bangunan-bangunan lainnya yang berdiri di tengah hutan hujan. Orang-orang Maya mengatur keseimbangan antara pusat perkotaan dengan hutan sangat hati-hati. Kota-kota dibuat berkelompok. Semua kota terhubung oleh jalur perdagangan secara global (Nathanal,2007).

Pertumbuhan sebuah wilayah menjadi kota mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya:

1. **Komplek Ekologi;** Komplek ekologi merupakan bagian dari kerangka atau model ekosistem yang menerangkan secara luas tentang perubahan kota. Sistem didefinisikan sebagai unit natural dimana ada interaksi antara sistem lingkungan dan biotik, dalam konteks ini antara komunitas dan habitatnya. Secara ekstrem seluruh bumi ini merupakan bagian habitat dunia. Analisis ekologi sangat relevan digunakan pada masyarakat kota pra industri awal dengan mempelajari wilayah perkotaan dan bentuk pertumbuhan sosial, termasuk perubahan sistem dengan menggunakan analisis ekologi. Empat konsep yang digunakan sebagai variabel yaitu :

Populasi, Organisasi, Environment dan Teknologi (POET). (1) **Populasi** mengacu tidak hanya jumlah penduduk, tetapi juga pertumbuhan atau kontraksi melalui migrasi dan pertumbuhan secara alami. Didalamnya mencakup komposisi penduduk (usia, jenis kelamin dan ras); (2) **Organisasi** atau struktur sosial merupakan cara penduduk kota diorganisasikan menurut stratifikasi sosial, sistem politik dan sistem ekologi; (3) **Environment** mengarah pada lingkungan alam dan pembangunan lingkungan jalan, taman atau pun bangunan dan (4) **Teknologi** mengarah pada alat, penemuan, ide dan teknik yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan bentuk kota. Misalnya penggunaan AC, mobil, struktur bangunan, struktur jalan ataupun (Adiwibowo, 2007).

Komplek ekologi bukan sebuah teori, tetapi hanya sebuah cara sederhana untuk menghubungkan satu hal dengan hal yang lain di kota. Empat variabel saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam pandangan sosiologi, organisasi mempunyai peranan penting yang sangat tergantung dan dipengaruhi oleh variabel lain. Satu keuntungan dari skema ini adalah konsepnya yang sederhana, dengan tujuan utama alasan ekonomi. Selain itu, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan materi dan menunjukkan hubungannya. Walaupun informasi yang disampaikan terlalu global dan kurang relevan untuk kasus yang sangat spesifik.

2. **Model Ekonomi Politik;** Model ekonomi politik melengkapi pemahaman sebelumnya tentang kompleks ekologi yang fokus pada permasalahan fisik. Pandangan ini menekankan pentingnya faktor politik sebagai analisis pertumbuhan kota. Pertumbuhan kota merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalis sebagai akibat dari akumulasi modal, konflik kelas dan eksploitasi ekonomi dari kekuasaan kelompok kaya dan dominan. Moda produksi kapitalis dan akumulasi kapital terlihat dimanipulasi oleh spekulasi dan elit bisnis untuk keuntungan pribadinya. Dengan asumsinya “interaksi

Dr. Muryanti, M.A.

sosial didominasi oleh hubungan sosial yang antagonistik”. Perkembangan sosial tidak menstabilkan masyarakat dengan adanya kepemilikan pribadi yang antagonistik. Kekuatan dari model ekonomi politik karena pengaruh elit politik dan kekuatan bisnis dalam pengambilan keputusan politik.

Sejarah perkotaan di Indonesia menunjukkan bahwa kebanyakan kota terletak pada persilangan jalan raya (pengangkutan) baik darat atau sungai atau persilangan antara dua jalan daratan. Di tempat persilangan tersebut terdapat gudang-gudang, tempat penginapan, rumah makan, kantor-kantor urusan pajak dan pusat kegiatan bisnis (Kartodirjo, 1977). Dalam perkembangannya saat ini, perkembangan suatu kota memang berada pada persilangan jalan, baik darat atau sungai ataukah kawasan perkotaan itu menjadi sebuah wilayah alternatif sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang melakukan penertiban kawasan untuk pembangunan. Sejarah kota banyak dipengaruhi oleh demografi serta ekologi manusiawi. Dengan pusat perhatiannya pada struktur spasial, okupasi dan sosial dari penduduk kota. Sehingga sejarah kota tidak bisa dipisahkan dari sejarah sosial dan politik, yang ditandai dengan uraian mengenai pola-pola stratifikasi sosial, pembagian kekuasaan dan kekayaan, kedudukan etnis dan ras sebagai akibat dari perubahan teknologi (Kartodirjo, 1977).

Pada suatu waktu, kota hanya merupakan semacam awan, tidak lebih besar dari tangan manusia. Tetapi saat ini, sudah menjadi pohon yang melindungi dunia. Perumpamaan ini dengan tepat menyatakan bahwa dalam masa lampau seperti berabad-abad permukaan kota hanya titik yang tidak berarti di tengah paya-paya, hutan rimba dan padang belantara. Pemusatan penduduk di beberapa sungai besar (Indus, Eufrat, Tigris) atau di tepi pantai laut tengah menjadi pusat perdagangan, pemerintahan, kerajinan, peribadahan dan semua kegiatan kebudayaan. Di dalam lingkungan kota, terdapat golongan sosial yang masing-masing mendukung unsur kebudayaan mewujudkan kesatuan yang menjalin ikatan-ikatan yang melampaui

ikatan kerabat, suku atau klan. Organisasi ekonomi dan politik lah yang menjadi landasan kehidupan bersama seluruh warga yang tinggal di lingkungan kota (Kartodirjo,1977).

Keadaan kota-kota di wilayah Asia Tenggara tidak jauh berbeda dengan wilayah lain di Timur Tengah atau India. Kota pelabuhan yang sekaligus menjadi pusat kerajaan merupakan bagian dari pemukiman dari pedagang-pedagang dari etnis yang berasal dari segala penjuru. Tujuan komersil yang memungkinkan kehidupan bersama serta memelihara suasana terbuka, suatu keadaan yang sangat berbeda secara mencolok apabila dibandingkan dengan masyarakat pedalaman. Di dalam kota terdapat pembagian pekerjaan suatu dasar organisasi ekonomis yang secara lambat laun menggantikan organisasi yang berdasar kasta atau klan (Kartodirjo, 1977).

Demikian halnya dengan Batavia, Yogyakarta dan Solo (kota pedalaman). Batavia merupakan kota pelabuhan yang menjadi tempat bertemunya kepentingan ekonomi dari segala penjuru; Cina, Arab, Belanda dan kaum pribumi sendiri. Morfologi kota juga terbentuk berdasarkan struktur sosial dalam masyarakat. Yogyakarta dan Surakarta sebagai ibu kota kerajaan juga menunjukkan bahwa pemilik kekuasaan (secara ekonomi dan politik) yang menentukan perkembangan ibu kota Kerajaannya.

Lewis Mumford dalam bukunya *The Center of Cities* menggambarkan perkembangan kota-kota sebagai berikut: (1) Eopolis (kota yang baru berdiri); (2) Polis (kota); (3) Metropolis (kota besar); (4) Megalopolis (Kota yang sudah menunjukkan tanda-tanda keruntuhan); (5) Tyranopolis (penguasa kota menguasai pedalaman dengan perusahaan-perusahaan raksasa) dan (6) Nekropolis (kota runtuh) (Khoe Shoe Kim, 1956 dalam Sapari, 1993)

Setiap kota akan mengalami pertumbuhan sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik yang ada dalam masyarakat tersebut. Pada saatnya pula mengalami kehancuran, jika peradaban masyarakat mengalami kehancuran, tidak ada generasi penerus.

Kota pada Abad ke-18

Perkembangan kota di Indonesia merupakan kelanjutan dari tahapan perkembangan sejarah kota sebelumnya, sejak masa pra kolonial, kolonial sampai masa pasca kolonial. Tidak dapat dipungkiri pada pra kolonial, Pulau Jawa mewakili dan menjadi pusat perkembangan kota serta kebudayaan Indonesia. Pada abad ke-18, kota-kota di Jawa tumbuh dan berkembang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota yang lain di Luar Jawa. Hal itu dapat dilihat dari struktur dan susunan kebudayaan masyarakat. Kebudayaan Jawa (Kejawaan/Kejawen) terfokus pada kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, dimana segala sesuatunya diatur dengan model idaman, kesopanan dan budi bahasa (krama). Berdasarkan bagan tata wilayah perkotaan di Jawa yang dihubungkan dengan kebudayaan adalah kutub positif berada di pusat, yakni di Keraton, kutub negatif berada di pinggiran, di daerah pantai (pesisir), yakni pantai utara, termasuk juga daerah pinggiran pedalaman. Dari pusat ke pinggiran mutu Kejawaan itu merosot, cahaya sedikit demi sedikit memudar, dan dari dunia adab orang beralih ke alam buas.

Ibu kota Kerajaan di Jawa dirancang seperti mandala, yakni sejenis maket kosmos. Suatu denah berpedoman pada keempat arah mata angin dan diatur menurut dua poros besar yang saling memotong dengan tegak lurus, yang pada umumnya menghasilkan susunan tapak catur. Di jantung kota, istana yang merupakan intinya karena Raja sebagai poros dunia dan kota hanyalah bungkusnya. Kerajaan Surakarta didirikan oleh Paku Buwono II, pada tahun 1745 sebagai pengganti Kartasura yang telah dinodai pasukan Cina-Jawa yang dipimpin oleh Sunan Kuning dan pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat IV. Proses pendirian kota diceritakan dalam babad Giyanti. Pada awal pendiriannya Raja memanggil para penasihat, para menteri dan para ahlu nujum untuk memindahkan ibu kota yang dihancurkan oleh Cina. Akhirnya dipilih Desa Solo, daerah yang berawa dan berbukit-bukit. Penduduk Desa Solo “wong cilik” dipindahkan dan dimukimkan ke desa yang lain. Desa Solo

sudah berganti nama menjadi ibu kota Surakarta Hadiningrat. Istana Surakarta terletak di Bengawan Solo yang mengalir di sebelah timurnya dan kota berkembang ke arah barat dan barat laut, di sekitar istana Mangkunegaran yang bagaikan suatu pusat tambahan dan di sekitar taman besar Sriwedari. Struktur denah yang berkotak disesuaikan dengan kedua anak sungai Bengawan yang mengalir ke barat laut tenggara, yakni Kali Pepe dan Kali Premulung. Urat nadi kota dapat dijumpai saat ini adalah menjadi jalan Slamet Riyadi yang membentang dari barat ke timur (Lombard,2000).

Pertumbuhan kota di Yogyakarta lebih simetris dibandingkan dengan Surakarta, karena adanya dua aliran sungai besar, yakni Kali Winongo dan Kali Code yang arahnya hampir sejajar dari utara ke selatan, yang satu di sebelah barat dan satunya di sebelah timur. Daerah pemukiman dibangun bersebelahan dengan poros besar utara-selatan, setelah melintasi istana dari ujung ke ujung dan alun-alun utara.

Di daerah-daerah tertentu pada denah kota terdapat pasar untuk perdagangan makanan dan tekstil. Terdapat pula untuk perdagangan dan bekas daerah orang Eropa di dekat benteng kecil yang menampung garnisun Kompeni. Di Yogya ataupun Surakarta, kediaman bangsawan menempati suatu kawasan yang bersisi empat yang luas yang dikelilingi tembok setinggi 3 sampai 6 meter, di Yogya dinamakan beteng dan di Surakarta dinamakan baluwarti. Ruang bertembok itu berada diantara dua alun-alun bujursangkar yang luas, alun-alun utara dan selatan. Masing-masing Keraton diatur sesuai dengan dua poros, yakni sisi utara dan sisi selatan. Poros pertama yang menghubungkan alun-alun utara dan selatan dengan pintu gerbang. Sisi utara dan selatan menentukan ruang umum, resmi, tempat upacara dan sisi barat dan timur, menentukan ruang pribadi, akrab dan keramat. Posisi simetris kedua halaman itu amat menarik dengan kedua alun-alun yang seakan-akan menyelubungi ruang pusatnya. Keraton merupakan citra dunia, yaitu mikrokosmos dan makrokosmos (jagad raya).

Dr. Muryanti, M.A.

Ciri pokok dari Keraton yaitu suasana hijau lingkungannya. Alam melingkupi suasana keraton. Di setiap halaman ditumbuhi sawo dan mangga yang berarti simbolis. Pohon yang berarti keramat yaitu beringin yang berada di alon-alon utara. Posisi ini Pohon beringin ini mengisyaratkan persatuan mistik antara raja dan rakyatnya. (Lombard, 2000). Disamping itu kecintaan raja terhadap alam semesta (lingkungan) sedemikian tinggi. Acara ritual keraton yang masih ada sampai saat ini adalah Gerebeg, untuk memulihkan kepaduan kerajaan. Pada kesempatan itu, para wakil dari provinsi menghaturkan upeti, berupa besar dan hasil bumi lainnya, rakyat bergembira ria. Pada acara tersebut masyarakat berebutan gunungang untuk mendapatkan keselamatan (Lombard, 2000).

Bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual keraton adalah bangunan masjid pada bagan dasar. Di Surakarta ataupun Yogya bangunan masjid terletak di sebelah barat alon-alon utara. Masjid ini terbuka untuk umum dan berada pada wewenang seorang pemuka agama yang relatif mandiri dan biasanya dipilih dari keluarga di daerah kauman, yakni pemukiman kaum muslim yang taat beribadah yang terletak di sekitar masjid. Di dalam masjid, terdapat tempat ibadah bagi raja dan keluarganya (Lombard, 2000).

Dalam dunia konsentris ini, segala-galanya merupakan pantulan, gema, perpadanan, dan setiap orang harus berikhtiar untuk bertindak sesuai, cocok, selaras, seirama dengan teladan istana. Masyarakat yang muncul pada situasi ini adalah masyarakat hierarkis (jaringan sosial disusun secara vertikal, berpola hubungan antara kerajaan dan kawulo, pejabat dan rakyat), adanya kepemimpinan yang totaliter yang merupakan ciri khas kebudayaan agraris pedalaman.

Kota pada Abad-19

Kota-kota tua di pedalaman menunjukkan hubungan mutualisme dengan keraton. Kota tersebut pun selalu berdekatan dengan kaum bangsawan untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan.

Selain itu, kota juga memberikan barang dan jasa untuk keraton, sementara kota-kota menikmati kemegahan yang melimpah dan kemewahan dari istana. Kondisi seperti itu agak berbeda dengan kondisi kota-kota di wilayah pantai yang lebih kosmopolit dibandingkan dengan kota-kota pedalaman. Penghuninya sebagian besar pedagang asing dan pengrajin ahli yang sangat terpengaruh dengan kontak luar. Kenyataan tersebut tidak menunjukkan bahwa kota-kota menjadi borjuis, membentuk kesatuan organis. Hal itu disebabkan karena pengaruh dari kerajaan pesisir sangat besar. Kewenangan diatur secara eksklusif oleh kerajaan tersebut dengan aparatur administrasi dan bala tentaranya.

Salah satu kota pesisir yang sangat terkenal yaitu batavia, ibu kota Hindia Belanda. Batavia oleh J.P.Coen merupakan tiruan dari kota di Belanda di pantai utara Jawa, berikut dengan karakter budaya borjuis Belanda. Batavia menjadi pusat pelabuhan laut Timur pada abad ke 18. Pusat kota pemeritahan adalah istana Gubernur Jenderal. Sebagaimana wilayah kerajaan pelabuhan pantai di Indonesia, berbagai kebangsaan tinggal berkelompok-kelompok di bawah pimpinan mereka sendiri, sehingga mereka mampu mempertahankan cara hidup dalam kelompoknya sendiri.

Lokasi tempat tinggal masyarakat menunjukkan kelas sosial, seiring dengan terjadinya proses akulturasi kebudayaan Belanda dengan Hindia. Budaya perkotaan abad ke 19 ini disebut sebagai budaya mestizo. Budaya ini merupakan refleksi hubungan sosial di kota-kota Hindia. Kelas sosial yang nampak adalah pejabat tinggi yang berpenghasilan besar dengan perumahan mirip villa (disebut juga *loji/loge*), yang memiliki kesamaan dengan bangsawan Jawa. Ukuran rumah-rumah mereka luas dengan halaman luas dan sejuk. Golongan ini tinggal di pinggiran kota. Golongan ini berbeda dengan Belanda borjuis yang cenderung hemat, sederhana dan menyembunyikan gaya hidupnya (Wertheim, 1999). Sementara itu tersembunyi di balik pepohonan terdapat kampung orang Indonesia (pribumi) tinggal. Kampung ini ditemukan menyebar di seluruh

Dr. Muryanti, M.A.

kota, tetapi secara khusus ditemukan di pinggiran sungai-sungai dengan halaman luas yang masih menunjukkan khas pedesaan dengan bercampurnya kelas atas, menengah dan bawah (Kartodirjo, 1993). Orang Indonesia yang lebih miskin tinggal di kota yang lebih gersang dan rendah karena mereka masuk ke kota untuk pekerjaan musiman dan urbanisasi (Wertheim, 1999).

Proses urbanisasi sebagai dampak birokratisasi, komersialisasi dan modernisasi menciptakan konsentrasi penduduk yang membentuk jaringan sosial berdasarkan ikatan komunal dengan berbagai macam penyatuan; keluarga, suku dan pekerjaan. Pada posisi ini, golongan elit administrasi atau birokrasi di kota-kota kabupaten merupakan kedudukan paling tinggi. Inti golongan ini adalah pejabat pangreh praja, dengan bupati sebagai puncak, disusul patih, wedana, asisten wedana, mantri dan juru tulis. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kelas ini disebut sebagai priyayi. Seajar dengan tingkat kepangkatan maka ada perbedaan antara priyayi gedhe dan priyayi cilik. Disamping itu masih terdapat golongan bangsawan (*ndarandara*) yang terdiri dari orang yang masih mempunyai keturunan raja-raja sampai derajat keempat atau kelima. Demikian halnya dengan pelajar-pelajar yang memperoleh kedudukan dalam birokrasi bergaya hidup priyayi dengan status terhormat. Kaum intelektual kelas menengah baru muncul setelah perguruan tinggi mengeluarkan tamatan yang sederajat dengan akademinya tidak termasuk birokrasi, tetapi menjalankan pekerjaan swasta. Dari kalangan inilah muncul pemimpin gerakan nasional. Rakyat pada lapisan paling bawah, termasuk golongan wong cilik (Kartodirjo, 1993)

Pusat kegiatan ekonomi saat itu terjadi di pasar yang berfungsi menampung transaksi dengan daerah sekitarnya. Perdagangan yang terjadi adalah pemasaran hasil pertanian dari pedesaan, barang-barang kebutuhan masyarakat. Dalam satu kompleks pasar terdapat pertokoan yang dikenal dengan pecinan. Perkembangan ekonomi pada abad ini berdampak pada pembangunan infrastruktur komunikasi, transportasi, edukasi, dan birokrasi yang merangsang

urbanisasi. Kota-kota tumbuh sebagai tempat pelayanan, kemudahan perdagangan dan kedudukan penguasa menyebabkan banyaknya pendatang yang menetap di kota.

Perkembangan wilayah perkotaan menunjukkan tidak teratur dan menimbulkan banyak masalah karena penentuan zona (penandaan yang sistematis atas wilayah tertentu untuk tujuan tertentu) kurang efisien. Meningkatnya konsentrasi bangunan di kampung-kampung kota bersamaan dengan pembangunan yang primitif dan semi pedesaan menyebabkan kapling-kapling rumah tersebut rawan kebakaran, sanitasi buruk, suplai air minum tidak cukup, tidak ada tempat rekreasi, banjir dan tidak ada udara segar. Konstruksi jalan raya, pembangunan rel kereta api dan pabrik-pabrik kecil muncul serampangan tidak sesuai dengan rencana tata kota. Lokasi bangunan umum, perkantoran juga tidak teratur. Spekulasi tanah menduduki proporsi sangat besar. Tidak ada peraturan yang mengatur sewa tanah, sehingga menyebabkan struktur sosial kota menjadi semrawut dan terkesan tidak teratur.

Kota pada Orde Lama

Permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh Indonesia pasca pendudukan Jepang dan masa Revolusi sangatlah besar. Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri rusak berat. Produksi beras pada tahun 1956, kurang lebih 26 persen lebih tinggi daripada produksi tahun 1950, tetapi sejumlah beras impor masih diperlukan. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Pada tahun 1950 an sekitar 77,2 juta jiwa, pada tahun 1955 sebanyak 85,4 juta jiwa dan tahun 1961 sejumlah 97,02 juta jiwa. Pertanian banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan ke sejumlah buruh yang jumlahnya meningkat terus. Akan tetapi banyak dari mereka yang urbanisasi ke kota-kota besar. Diperkirakan jumlah penduduk perkotaan sekitar 14,8 persen pada tahun 1961. Urbanisasi yang tinggi di kota-kota

Dr. Muryanti, M.A.

dan kota praja-kota praja semakin membesar karena kota dan kota praja menjadi pusat kegiatan politik, sedangkan wilayah pedesaan diabaikan. Mengingat ibu kota Indonesia di Jawa, yakni Jakarta menyebabkan daerah-daerah di luar Jawa dilupakan pemerintah pusat.

Pertumbuhan ekonomi pada masa ini sangat lambat. Program-program pembangunan infrastruktur pemerintah yang sangat penting (jalan raya, pelabuhan, pengendalian banjir, irigasi dan kehutanan semakin memburuk. inflasi dan revolusi semenjak zaman perang masih berlanjut. Biaya hidup meningkat 100 persen (1950-1957). Hampir semua masyarakat menderita sampai kenaikan harga. kemerdekaan belum memberikan kemakmuran seperti yang diharapkan banyak orang. Pada masa ini, banyak orang yang mencari pekerjaan, termasuk mereka yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan yang semakin banyak, para mantan pejuang gerilya, serta para mantan pejabat federal dan republik. Pada tahun 1960, terdapat 807.000 pegawai negeri (Ricklefs,2005).

Kota pada Orde Baru

Pembangunan ekonomi menjadi agenda utama pada masa ini dengan konsep trilogi pembangunan, yakni; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas sosial yang sehat dan dinamis (BP7,1991) dan melupakan aspek-aspek yang lain. Secara umum pembangunan ekonomi cenderung mendukung wilayah-wilayah tertentu (kota besar) dan mengabaikan wilayah lain yang menyebabkan terjadinya disparitas wilayah. Hal ini disebabkan aktivitas modern berskala besar, bentuk-bentuk infrastruktur sosial dan penentuan kebijakan berada di kota besar.

Gambaran kota tersebut tentu sangat familiar yakni Jakarta. Perkembangan kota ini lebih mendekati, walaupun berbeda dengan

pola sektor (Hyot). Pusat kota menjadi pusat bisnis, jasa dan pemerintahan. Daerah transisi yang mengitari pusat kota menjadi tempat tinggal warga miskin. Kawasan industri (Kawasan Berikat Nusantara) menyebar di beberapa wilayah, secara umum ada di tepi jalan besar, lembah sungai, jalan kereta api dan berbatasan dengan kota besar lain (Rahardjo,1983). Lapisan terluar dari kota menjadi tempat tinggal kelas menengah atas.

Permasalahan yang muncul di Jakarta sebagai gambaran kota-kota besar di Indonesia diantaranya; kemacetan, tidak adanya ruang publik, penggusuran dan kerawanan sosial serta penyimpangan pemanfaatan ruang perkotaan (Supriatna,2000). Kemacetan merupakan ciri buruk dari kota besar yang tidak bisa memberikan pelayanan kota secara manusiawi diakibatkan oleh banyaknya volume kendaraan di kota. Pada tahun 2002, terdapat 4,5 juta kendaraan bermotor pribadi, akan tetapi minim kendaraan umum. Kondisi ini menyebabkan banyaknya konsumsi bahan bakar yang menyebabkan pencemaran lingkungan.

Persoalan yang lain yaitu peningkatan pemukiman penduduk yang tidak terencana akibat pertambahan penduduk dan kemiskinan. Luas kawasan kumuh di Jakarta 15.000 hektar, yang tersebar pada 45 kawasan kumuh di seluruh kecamatan dengan populasi penduduk yang tinggal sebanyak 7,5 juta jiwa (data tahun 2000) (Supriatna, 2000). Selain penduduk, pertumbuhan kota juga tidak tercatat, terencana dan cenderung menyebar. Hal ini tampak dari pembangunan infrastruktur yang tidak utuh, tetapi sendiri-sendiri karena biaya ganti rugi tanah yang mahal dan tidak konsisten terhadap rencana tata ruang kota. Biaya ganti rugi lahan itu terkait pembebasan lahan akibat semakin padatnya pemukiman penduduk.

Pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari modernisasi menyebabkan timbulnya struktur sosial baru yang heterogen di perkotaan dengan basis ekonomi. Dalam piramida struktur sosial, piramida puncak ditempati oleh para saudagar ataupun bangsawan yang memiliki kekuatan kapital. Sementara itu terjadi kebangkitan

Dr. Muryanti, M.A.

kelas menengah secara besar-besaran sebagai akibat diferensiasi pekerjaan, bangkitnya lembaga pendidikan, politik dan ekonomi. Kelas pekerja, buruh dan rakyat jelata menempati kelas paling bawah.

Pada masa ini produksi pangan di Indonesia meningkat secara pesat, sebagian besar karena tersedianya bibit yang bertambah baik dan melimpahnya persediaan pupuk. Anne Both telah berusaha mengukur konsumsi beras per kapita sejak pertengahan abad ke 19. Angka-angka yang dibuatnya menunjukkan bahwa konsumsi beras turun sekitar 106 kg per kapita pada tahun 1850-an menjadi 90 kg pada tahun 1930-an, yang bertambah baik menjadi 95 kg pada tahun 1960-an, menjadi 110 kg lebih pada tahun 1970-an dan menjadi 140 kg lebih pada tahun 1980-an. Impor beras berkurang menjadi hampir nol dan Indonesia menyatakan telah mencapai kemandirian dalam beras (swasembada) (Ricklefs, 2005) dengan melakukan modernisasi pertanian pada masa itu.

KOTA DI ASIA TENGGARA

Negara-negara di Asia Tenggara banyak yang menjadi Negara Industri Baru (NIB) sehingga memiliki daya *surveillance* yang tinggi dengan adanya krisis, gejala politik baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Akan tetapi jika dikaji dari luas keseluruhan negara, modernisme hanya terkonsentrasi pada ibu kota negara atau pusat-pusat regional. Perubahan yang terjadi di kota ditandai dengan adanya demokratisasi dan kebangkitan kelas menengah. Disebabkan salah satunya karena keberhasilan modernisasi yang menerapkan kebijakan yang mengarah pada integrasi Internasional (Evers dan Gerke, 1997). Karakter kota-kota utama menjadi metropolis (memiliki keterkaitan utama dengan dirinya sendiri dan menjadi bagian dari masyarakat metropolis global). Ritme kehidupan kota-kota di Asia Tenggara mengikuti kehidupan kota-kota raksasa di dunia.

Kota utama (*primate cities*) yang biasanya berpusat di ibu kota Provinsi merupakan tempat terartikulasinya globalisasi, integrasi nasional dan lokalisasi yang prosesnya mengakar dan jauh ke luar metropolis dan menimbulkan ambivalensi. Kota-kota besar di Indonesia bukan kota global, bukan kota nasional ataupun lokal, akan tetapi perpaduan antara ketiganya. Kota berfungsi sebagai etalase modernitas global serta perwujudan identitas kebangsaan. Lanskap kota-kota di Asia Tenggara mencerminkan proses globalisasi yang menguat ditandai dengan gedung-gedung tinggi, apartemen, kantor, hotel, pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan restoran cepat saji dengan arsitektur yang baru serta jalan layang, jalan tol yang dibangun oleh perusahaan multinasional dan agen-agen real estate berskala global. Implikasinya yaitu seragamnya wajah-wajah kota di seluruh dunia yang didukung dengan jaringan global. Dengan demikian kota menjadi agen pembangunan ekonomi karena adanya jaringan keuangan dan produksi industri global yang diiringi dengan menguatnya sektor-sektor informal (Castells, 2004). Menguatnya jaringan global di kota yang memiliki dua implikasi : (1) jaringannya yang sangat beragam, mulai dari perusahaan transnasional, kaum migran, budaya dan media (kesamaan dalam keragaman) dan (2) hanya menyentuh bagian-bagian tertentu dari kota.

Terkait dengan upaya membangun negara dan bangsa, bagi masyarakat Asia Tenggara yang mayoritas hidupnya tinggal di desa, ibu kota menjadi tempat pengendalian teritorial untuk menjaga keutuhan sebagai bangsa. Pada situasi ini, ibu kota negara dikembangkan menjadi pusat pemujaan nasionalisme (Mc Gee). Derajat keutamaan kota menjadi meningkat karena pembentukan bangsa. Implikasinya dapat menghambat terbentuknya pusat-pusat yang lain (kota besar lain) karena membahayakan elite yang mempunyai kepentingan terhadap kota, hal ini berdampak pada adanya tuntutan ekonomi daerah. Menguatnya posisi kota, mengakibatkan selalu meningkatnya migrasi untuk mendapatkan akses posisi yang

Dr. Muryanti, M.A.

lebih tinggi dan berpengaruh dalam ekonomi dan birokrasi (Evers 1966 dan Korff 1988).

Integrasi negara yang berbasis di pusat, sementara pusat ini menjadi penghubung integrasi dengan jaringan global dapat menimbulkan konflik-konflik antar kelompok yang memanfaatkan globalisasi sebagai sumber daya politik dengan kelompok yang kontra globalisasi. Misalnya yang terjadi pada tahun 2012 lalu, adanya penolakan kedatangan konser Lady Gaga di Indonesia dikarenakan tarian dan pakaiannya yang seksi, dianggap dapat merusak moralitas anak-anak muda. Kota-kota di Asia Tenggara dihuni oleh berbagai kelompok yang majemuk, dimana masing-masing kelompok mengikuti cara hidup dan budaya mereka sendiri. Kelompok etnis yang membentuk perkampungan sendiri, para perantau dari berbagai macam daerah, kompleks perumahan kelas menengah. Dimana masing-masing kelompok membangun kohesi sosial untuk bisa tetap eksis. Perpaduan antara metropolis yang terintegrasi dengan jaringan global negara bangsa dan lokalitas merupakan keunikan ibu kota di Asia Tenggara yang merupakan simbiosis antara tradisi dan modernitas. Dualitas antara tradisi dan modernitas ini disebabkan oleh wilayah Asia Tenggara yang merupakan titik simpul jaringan perdagangan antar benua atau titik temu arus kebudayaan India dan China, yang berbeda dengan kota di Barat yang dibangun dengan budaya dan ideologi yang sama. Kritik terhadap teori-teori modernisasi digunakan juga untuk menganalisis kota sebagai pusat kemajuan. Kota tidak selalu menjadi pusat modernitas dan tidak selalu menghimpun semua struktur modernitas. Kota di Asia Tenggara merupakan *dual city* (kota ganda) yang didiami oleh orang miskin dan kaya, masyarakat maju dan masyarakat lokal (Castells, 2004). Kota tidak hanya mewakili bentuk masyarakat asli yang otentik, tidak juga mewakili masyarakat modern/ barat yang menyendiri. Kota tidak bisa dikatakan asing dan tidak juga dapat dikatakan sebagai berada dalam kerangka tradisi Asia Tenggara. Tradisi yang muncul merupakan heterogenitas, orientasi ke luar dan

amalgamsi sehingga tantangan utamanya yaitu perubahan yang terintegrasi dengan masyarakat secara keseluruhan.

Apakah kota-kota di Asia Tenggara melarut dalam ekonomi dunia dan menjadi kota-kota dunia? Castells menyatakan bahwa kota masa kini merupakan ruang penghancuran kolektif dan kekerasan individual, yang ditransformasikan oleh berbagai umpan balik menjadi satu aliran yang tidak pernah terhenti dan tidak pernah mulai. Kehidupan menjadi abstraksi, kota menjadi bayang-bayang (Castells,2004). Kota tidak lagi penting bagi komunikasi dan pengambilan keputusan karena bisa dilakukan melalui telepon, jaringan komputer. Tempat dan lokalitas menjadi kuno. Aliran yang semula menuju kota, membentuk sistem kota, kini tidak terkait tempat, sehingga menjadi abstrak. Globalisasi yang berbasis informasi menjadikan ruang dan tempat menjadi sangat abstrak dan lokalitas menjadi komoditas (Palen, 2002). Abstraksi memungkinkan munculnya diferensiasi dan keberagaman yang diabstraksikan dengan kondisi tertentu dan tempat tertentu. Misalnya: pembangunan kuil di Bangkok dengan menggunakan gaya kuil Yunani yang bertema gothik. Fenomena seperti di Bangkok juga menjadi gejala di kota lain di Asia Tenggara.

Proses penciptaan lokalitas berarti membangun saling ketergantungan diantara sesama penghuni lokalitas. Hal ini berarti membangun saling ketergantungan diantara sesama penghuni lokalitas sehingga menghubungkan kembali aspek-aspek sosial, politik, psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Di kota banyak dibangun lokalitas buatan yang diperuntukan bagi kelas atas untuk memuaskan kebutuhan sehari-hari, misalnya: kondominium (pemukiman, pusat belanja, olahraga, kolam renang dan lapangan hijau). Keberagaman dan abstraksi tersebut membentuk gaya hidup yang berbeda-beda, dimana perbedaan tersebut dari segi etnis, agama, sosial menjadi penting, sehingga makna kota menjadi hilang. Demikian halnya dengan pola umum perkembangan kota, yang maknanya beragam dan saling berbenturan. Jika dimaknai bahwa konstruksi emik

Dr. Muryanti, M.A.

merupakan upaya merekonstruksi konstruksi makna-makna yang dimiliki oleh pihak-pihak yang hidup di kota, makna tersebut menjadi terfokus pada kultur dan ekonomi perkotaan.

Dalam konteks ekonomi, sama halnya dengan karakter masyarakat kota secara umum, kota mengalami perubahan secara terus menerus dalam hal standar hidup dan peluang koeksistensi antara grand kapitalisme dengan ekonomi informal dan ekonomi migrant. Modernitas di kota-kota Asia Tenggara mencakup pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan munculnya kawasan gedung tinggi dan perumahan modern dan keterbelakangan, daerah kampung-kampung dan sektor informal (produksi subsisten). Di kota-kota tersebut, adanya paralelisme antara ruang global (bank-bank internasional, hotel-hotel dan pusat-pusat perbelanjaan dengan perdagangan internasional yang diikuti oleh gaya hidup kosmopolitan, ruang nasional (monumen-monumen pemerintah, istana dan rumah-rumah ibadah) dan ruang lokal.

MASYARAKAT DIGITAL DI PERKOTAAN

Perspektif global tentang kota, pada abad ke-21 melekat dengan adanya urbanisasi yang melanda dunia, sebagai penyatuan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari kekuatan global, termasuk pengaruh strukturalis dan kulturalis. Terkait dengan fenomena migrasi dari desa ke kota dengan berbagai macam permasalahannya. Hal ini menjadi kecenderungan sistem ekonomi Internasional.

Menurut Sassen (1996), perkotaan secara tradisional merupakan titik temu antara proses politik dan situasi global, bahwa perubahan yang terjadi secara lokal disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor global. Terdapat hubungan antara kecenderungan kriminal ekspresif dalam berbagai macam bentuk: vandalisme, kecemasan, kemarahan dan kesetaraan yang tajam sebagai akibat proses globalisasi, arogansi kekuasaan korporasi dan kedekatan hubungan dalam ruang kota. Pengaruh global terhadap kota menyebabkan terjadinya revolusi

batas-batas spasial dari kota ditandai dengan adanya *cybercities*, transnasionalisme dan terorisme yang menentukan masyarakat saat ini sebagai *post cities*. *Cybercities* merupakan pemusnahan kota karena hilangnya jarak fisik kota yang meninggalkan era industri dengan lokasi pusat menuju layanan akses sebagai sebuah keniscayaan. Perkembangan pesat dari ICT telah menandai akhir dari urbanisme dan mengurangi kebutuhan dan pengelompokan manusia dari gerakan fisik.

Keruntuhan kota menurut Graham, dapat dilihat dari perasaan futuristik (gembira, romantik, utopis, teologis, *cyberlibertarian* dan anti urban). Kemajuan teknologi menyebabkan kota-kota tumbuh tidak terpusat, tetapi justru dipinggirkan karena akses teknologi bisa dimana pun, tanpa harus di pusat kota. Pengembangan teknologi lebih dilakukan di pinggiran kota karena lebih murah. Konektivitas teknologi dapat dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk perusahaan (administrasi yang rendah, penjualan bisa tinggi dan pengolahan data tidak harus terpusat).

Menurut Sassen (2000), terjadi proses deindustrialisasi, pertumbuhan kota juga semakin ke arah pinggiran kota. Perkembangan teknologi, komunikasi dan kelembagaan menurut Marx merupakan proses restrukturisasi yang melakukan penjarahan dari batas-batas antara negara-bangsa yang berdaulat. Masyarakat baru dengan keragamannya merupakan struktur sosial baru yang disebut masyarakat jaringan (Castells,2000). Kota global bukan dalam arti fisik yang dibatasi oleh negara, akan tetapi tempat-tempat tersebut menyebar ke seluruh dunia, adanya pengelolaan ekonomi dan jaringan informasi global, sehingga ada “perbatasan baru” antara kota dalam persepektif lama dan perspektif kekinian yang terhubung oleh jaringan teknologi dan informasi.

Dr. Muryanti, M.A.

Menurut Castells (2002) dalam *cybercities*, urbanisme dimaknai:

1. **Fungsi;** ruang perkotaan merupakan saluran untuk kegiatan ekonomi global, akan tetapi pada saat yang sama kota juga membingkai orientasi lokal warganya
2. **Pemaknaan;** kota mereproduksi individualism atau *self interest* dan komunalisme yang mengacu pada identitas yang terbagi, proses yang sama-sama ada dalam individu dalam masyarakat yang menimbulkan ketegangan
3. **Bentuk;** Kota menjadi ruang arus (komunitas dan transmisi tanda) dan ruang tempat (orientasi lokal, individu dan kegiatan) yang terjadi secara bersamaan. Hal ini menyebabkan timbulnya tumpang tindih antara kota sebagai sentralitas dan kota sebagai metropolitan baru. Kota-kota dan wilayah metropolitan sedang berubah bentuk, ada yang bertahan dan ada pula yang berubah sesuai dengan proses pertumbuhannya. Fenomena yang muncul diantaranya: kesenjangan digital yang semakin membedakan orang kaya dan orang miskin terkait dengan akses digital. Dalam tahap perkembangan masyarakat, *cyberspace* merupakan fakta yang melingkupi dimensi eksistensi manusia, namun tidak semua orang hidup di dalamnya.

Sisi lain, banyak yang masih mempertahankan kota, karena adanya keterikatan sosial dan emosional kota tertentu karena kota merupakan pusat semua aktivitas masyarakat (ekonomi, sosial dan politik) (Johnson,1996). Perkotaan dalam perspektif baru, menunjukkan adanya transnasionalisme dan globalisme baru yang mengacu pada pola migrasi Internasional sebagai dampak adanya kemudahan sarana transportasi, perkembangan komunikasi sehingga gerakan migrasi menjadi lebih tentative (untuk berpindah atau kembali).

Alejandro Portes (2003), menyatakan bahwa transnasionalisme merupakan fenomena interkoneksi global, yang tingkat perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi pengirim dan masyarakat penerima. Ada migran yang datang memisahkan diri dengan etnik

lokal/nasional, akan tetapi ada juga migran yang mengikatkan diri. Studi Internasionalisme menjadi penting untuk mengkaji perkotaan sehingga muncul istilah “urbanisme Internasional”, yang muncul sebagai efek dari transnasionalisme sosial dan hubungan politik-ekonomi.

Masa depan kota di era global mewujudkan dalam *technology cyber* yang ditandai dengan tingginya kebutuhan teknologi orang kota. Artinya masyarakat kota sudah sangat terhubung dan bergerak kemana pun baik secara material ataupun emosional di seluruh ruang-ruang kota. Kemajuan teknologi tersebut memungkinkan muncul berbagai macam konflik di perkotaan. Artinya kota menjadi arena yang rentan konflik; kota menjadi remote/pengatur kekuatan dunia untuk mengorganisasikan masyarakat; kota dan masyarakat kota menawarkan arena untuk memahami dunia global sebagai pusat tanpa batas.

BAB IV

DILEMA MASYARAKAT TRANSISI

Masyarakat transisi merupakan masyarakat yang sedang mengalami perubahan bentuk dan isi dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Fenomena yang paling sering terjadi dalam konteks masyarakat pedesaan yang mengalami transisi ke arah perkotaan yang ditandai perubahan mata pencaharian. Masyarakat bergeser dari tenaga kerja pertanian menuju tenaga kerja industri yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat secara menyeluruh. Kondisi masyarakat transisi berbeda dengan kondisi masyarakat desa maupun kota karena telah mengalami percampuran antara keduanya. Jika, kehidupan pedesaan dicirikan dengan sikap perhatian dan gotong royong yang kental, tingginya nilai-nilai dan penguatan kepribadian, cenderung menerima nasib, kurang berusaha, ketergantungan terhadap orang lain tinggi serta berkembangnya cerita-cerita dongeng fantasi. Sebaliknya, di wilayah perkotaan akses terhadap informasi mudah diperoleh, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan

Dr. Muryanti, M.A.

Sumber Daya Alam, berorientasi pada masa depan, adanya sistem *reward* bagi siapa pun yang memiliki prestasi dan masyarakat lebih plural atau beragam. Pada masyarakat transisi terjadi instabilitas sosial karena masuknya nilai-nilai baru dalam masyarakat, sehingga mereka harus melakukan adaptasi terhadap nilai baru tersebut. Pada masa ini, indikasi yang terlihat seperti gaya hidup konsumtif, adanya urbanisasi dan migrasi yang tinggi di kalangan anak muda (Agus, 2016).

Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa desa memiliki karakter yang berbeda dengan daerah perkotaan. Misalnya dalam hal mata pencaharian, tingkat kepadatan, ukuran komunitas, diferensiasi sosial dan interaksi sosial. Sedangkan menurut Bergel, desa digambarkan sebagai pemukiman para petani. Namun, ada beberapa desa yang sebagian menjadi petani maupun pedagang. Definisi tentang desa melahirkan pemikiran tentang desa sebagai masyarakat yang masih bersahaja dan kota sebagai gambaran masyarakat yang sudah maju dan lebih modern (Muryanti, 2018). Di beberapa kajian, kota dan desa selalu disandingkan. Dua wilayah ini memiliki perbedaan dasar dan kualitas relasi sosial. Ferdinand Tonnies dan Emile Durkheim membahas mengenai bagaimana relasi sosial di desa cenderung alamiah, intim dan intens. Selain relasi sosial, desa dan kota juga dibedakan dari infrastruktur ekonomi. Ciri perekonomian desa identik dengan ekonomi pertanian, sedangkan kota dengan ekonomi industri (Damsar, 2016).

Masyarakat desa mengutamakan hubungan sosial dan relasi antar kelompok petani (Thomas, 2020). Terkait hubungan sosial ini, Emile Durkheim membagi hubungan masyarakat menjadi dua solidaritas, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik (Bryant, 2007). Masyarakat dengan solidaritas mekanik, dalam kehidupan menjadi satu dan padu karena seluruh orang dalam komunitas memiliki kesamaan. Berdasarkan kebersamaan moral dan sosial, solidaritas mekanik ini diperkuat adanya disiplin suatu komunitas. Ikatan dalam masyarakat terjadi karena mereka terlibat

dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama. Solidaritas mekanik ini merupakan dasar kohesi sosial, dimana kohesi di tingkat perorangan sangatlah rendah. Solidaritas mekanik lahir karena adanya kesamaan-kesamaan dalam masyarakat. Masyarakat dengan karakter solidaritas mekanik sering terjadi di desa. Berbeda dengan masyarakat dengan solidaritas mekanik, masyarakat dalam solidaritas organik didasarkan atas pembagian kerja dalam masyarakat. Solidaritas organik lahir karena adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat perkotaan sebagai dampak dari adanya pembagian kerja. Pada masyarakat transisi, solidaritas mekanik dan organik berubah menjadi abu-abu dan cenderung bercampur. Masyarakat transisi bisa memiliki solidaritas keduanya, yakni tetap memegang teguh gotong royong dan kebersamaan, serta bisa melakukan pembagian kerja pada kelompok tertentu sesuai dengan kepentingannya.

Pada masyarakat transisi, perbedaan karakteristik modernitas pada masyarakat perkotaan dan karakteristik tradisional pada masyarakat desa tersebut bertemu dan mengalami akulturasi, baik dari relasi sosial, politik, budaya, ekonomi, bahkan gaya hidup masyarakat. Masyarakat transisi lahir karena beberapa sebab, *pertama*, secara geografis wilayahnya berdekatan dengan pusat kota sehingga mobilitas masyarakat cenderung tinggi. *Kedua*, terbukanya akses pedesaan yang melahirkan interaksi sosial antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Dalam hal ini, kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang dominan. Misalnya, Undang-undang No 32 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah, adanya kebijakan dana desa dan kebijakan-kebijakan lain memperluas peran wilayah pedesaan dalam pembangunan negara. Kebijakan ini melahirkan inovasi-inovasi seperti lahirnya desa wisata dan lahirnya lapangan pekerjaan baru selain sektor pertanian. *Ketiga*, adanya interaksi sosial antara desa dan kota akibat dari urbanisasi.

Soerjono Soekanto (Soerjono,2017) menjelaskan beberapa ciri-ciri masyarakat yang mengalami transisi. *Pertama*, masyarakat transisi mengalami pergeseran dalam berbagai bidang, misalnya terciptanya peluang pekerjaan lain selain pertanian. *Kedua*, adanya peningkatan dalam bidang pendidikan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. *Ketiga*, masyarakat mulai terbuka dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman. *Keempat*, tingkat mobilitas masyarakatnya tinggi, umumnya pada masyarakat yang sudah memiliki akses ke kota. Kemudahan akses ini membuat masyarakat transisi lebih mudah mengembangkan ilmu pengetahuan, lebih mudah mendapatkan informasi, serta semakin berkembangnya perekonomian masyarakat seiring dengan lahirnya lapangan pekerjaan baru. Di sisi lain, masyarakat transisi juga memiliki tantangan. Kehidupan masyarakat tradisional dan modern yang bercampur mendorong hilangnya kebudayaan dan adat istiadat asli yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Muncul kelompok *okupasional* (orang-orang yang memiliki pekerjaan sejenis sehingga memudahkan fungsi kekerabatan serta lahirnya stratifikasi sosial yang lebih ekstrim).

Banyak aspek perbedaan yang muncul dalam masyarakat transisi, antara lain aspek politik, ekonomi, sosial budaya serta gaya hidup dibandingkan dengan masyarakat desa dan masyarakat kota. Perubahan pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya serta gaya hidup terjadi setelah adanya interaksi antara masyarakat tradisional dan modern. William F. Ogburn dalam teorinya tentang perubahan sosial menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya pengaruh kebudayaan material (*material*) terhadap kebudayaan *immaterial*. Bertemuinya dua budaya dari masyarakat modern dengan tradisional melahirkan berbagai dinamika. Kehidupan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih modern karena lebih dekat dengan perkembangan teknologi. Masyarakat perkotaan yang modern memiliki karakteristik individual, sehingga hubungan sosial didasarkan pada kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Masyarakat perkotaan juga dicirikan dengan

keterbukaan, kemudahan akses, serta memiliki berbagai macam profesi dan keahlian disebabkan kesempatan akses pendidikan yang lebih mudah (Jamaludin, 2015).

ASPEK POLITIK

Masyarakat transisi semakin berkembang di Indonesia bersamaan dengan konsep desentralisasi kebijakan. Sebagai negara berkembang dengan kondisi geografis yang sangat luas, Indonesia seringkali dihadapkan pada masalah pemerataan kebijakan (Haryanto, 2016). Kota-kota besar terutama Jakarta sebagai ibu kota seringkali menjadi tolak ukur pembangunan di semua daerah di Indonesia, yang pada akhirnya sering disebut sebagai Jakartasentris. Masyarakat seringkali menganggap bahwa pembangunan ekonomi terpusat di Jakarta, sehingga banyak dari mereka meninggalkan daerahnya untuk mengadu nasib ke Jakarta. Tidak hanya dalam hal ekonomi, kemajuan pendidikan juga seringkali melekat di kota-kota besar. Akses pendidikan lebih mudah bagi orang yang berada di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Keterbukaan kesempatan pertukaran sosial ini juga diperkuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintah daerah. Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan perubahan-perubahan pada masyarakat yang ada di daerah. Mempermudah pembangunan-pembangunan infrastruktur di semua daerah di Indonesia. Pada akhirnya, maraknya pembangunan dan pertukaran sosial mempertemukan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern yang kemudian menjadi masyarakat transisi.

Kehidupan politik masyarakat transisi tidak memiliki karakteristik spesifik. Pola partisipasi politik pada masyarakat transisi tidak seperti yang digambarkan oleh Emile Durkheim tentang pembagian solidaritas. Kelompok masyarakat transisi tidak terbagi menjadi dua, yakni individual atau komunal. Pada

Dr. Muryanti, M.A.

kasus tertentu, masyarakat transisi dengan kecenderungan budaya modern memiliki solidaritas organik akibat dari pembagian kerja serta ketergantungan yang tinggi. Sedangkan pada kondisi lain, kecenderungan budaya tradisional masih mengakar kuat. Solidaritas mekanik dengan asas gotong royong dan membangun kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama masih sangat kuat. Kondisi ini tergantung pada penyebab lahirnya masyarakat transisi itu sendiri. Bagaimana pertukaran sosial itu terjadi, partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan di wilayahnya, serta bagaimana masyarakat memaknai perubahan-perubahan yang terjadi (Pip, 2018). Teori pertukaran sosial pada masyarakat transisi memiliki perhatian khusus terhadap masalah-masalah; (1) akar dari ambiguitas konseptual, (2) norma dan aturan pertukaran, (3) sifat sumber daya yang dipertukarkan dan (4) hubungan dari pertukaran sosial (Mitchell, 2005).

ASPEK EKONOMI

Konsep sistem ekonomi pada suatu wilayah lahir dari kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sistem ekonomi dibentuk untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi pada wilayah tersebut dikelola (Darwin, 2021). Sistem ekonomi bisa dibentuk melalui peraturan perundang-undangan atau dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Pada masyarakat transisi, sistem ekonomi mengalami akulturasi antara sistem ekonomi tradisional dengan sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi masyarakat transisi dapat dilihat dari adanya perubahan ekonomi masyarakat agraris menuju masyarakat industri, yang diawali dari kebijakan pemerintah daerah No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031. Kebijakan ini mengubah sistem ekonomi masyarakat, sehingga perkembangan industri dengan berdirinya berbagai jenis pabrik-pabrik besar semakin marak. Mata pencaharian masyarakat kemudian tidak hanya sektor pertanian saja, tetapi berkembang, antara lain berdagang, bekerja di pabrik, jasa dan sejenisnya (Alvianto, 2020).

Perubahan sektor ekonomi merupakan salah satu perubahan yang paling nampak pada masyarakat transisi. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian bisa lebih berkembang karena adanya berbagai macam peluang. Termasuk perubahan cara bekerja dan berinteraksi para petani. Petani memiliki peluang untuk mengembangkan lahan dan memasarkan hasil produksi pertaniannya secara lebih luas. Perkembangan teknologi yang pesat di kota juga melahirkan trend jual beli lahan virtual dalam perdagangan pertanian juga terjadi. Secara global, total lahan virtual dalam perdagangan pertanian meningkat dari 128 juta hektar (ha) pada tahun 1986 menjadi 350 juta hektar (ha) pada tahun 2016. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata adalah 5,73% (Qiang, 2013). Masyarakat transisi memiliki peluang lebih luas dalam mengembangkan produksi pertaniannya. Relasi yang lebih luas dan terbuka secara otomatis meningkatkan peluang ekonomi, peluang untuk keluar dari kemiskinan (Mitchell, 2005).

Namun demikian, secara umum pekerjaan petani di wilayah transisi memiliki pendapatan yang kecil, luas lahan yang semakin menyempit, biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual dan peluang pada sektor di luar pertanian semakin banyak. Selain itu generasi muda tidak mau meneruskan pekerjaan sebagai petani dan memilih bekerja di sektor lain. Kapasitas petani yang terbatas dan subsistensi pada kehidupan masyarakat petani mempengaruhi pemilihan pekerjaan baru di luar sektor pertanian. Perkembangan teknologi dan masuknya informasi juga menjadi faktor perubahan cara kerja dan tindakan ekonomi pada kehidupan masyarakat petani. Selain itu ada anggapan bahwa sektor pertanian kurang bergengsi, kotor, kurang terpelajar dan tidak memberikan jaminan di masa depan. Kesempatan kerja masyarakat petani di wilayah transisi ditentukan oleh interaksi dan usaha dalam mencari peluang pekerjaan dari berbagai sumber (Hardika, 2011). Warga pendatang merupakan salah satu sumber peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat petani. Masuknya pendatang ini berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat

Dr. Muryanti, M.A.

untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian. Pendatang menjadi kelompok yang memberikan kontribusi terhadap terbukanya kesempatan belajar dan peluang pekerjaan di wilayah transisi.

Pada awal pembangunan, Indonesia berada pada kondisi menuju transisi dari masa agraris ke masa industrial. Industrialisasi ditandai dengan semakin berkurangnya lahan pertanian karena industri-industri di wilayah perkotaan mengalami perkembangan (Ratuwalu, 2016). Selain pembangunan kawasan industri, lahan pertanian juga mengalami alih fungsi sebagai pemukiman penduduk. Masalah-masalah pertanian seperti cuaca yang tidak menentu, gagal panen, serangan penyakit pada tumbuhan serta daya beli hasil panen yang rendah menyebabkan industri pertanian semakin ditinggalkan. Ditambah lagi, masyarakat yang berusia produktif lebih memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan secara ekonomi.

Migrasi ke kota terjadi bukan tanpa sebab. Petani di wilayah transisi memiliki pendapatan yang kecil, luas lahan yang semakin menyempit, biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual dan terbukanya peluang bekerja di sektor luar pertanian menjadi sebab utama proses migrasi. Selain itu generasi muda enggan meneruskan pekerjaan sebagai petani dan memilih bekerja di luar pertanian. Motivasi pemuda bekerja di luar pertanian dipicu oleh orientasi pendidikan menengah atas Indonesia yang mengarah pada pendidikan vokasi. Ketika masyarakat mengalami masa transisi, khususnya pemuda akan lebih rasional, individual dan sistematis sehingga lebih memilih bermigrasi. Jumlah petani yang terbatas dan kondisi subsistensi yang melanda petani pada masyarakat transisi, mendorong masyarakat memilih pekerjaan baru di luar sektor pertanian. Pemilihan pekerjaan di luar pertanian tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan masuknya informasi. Selain itu ada anggapan bahwa sektor pertanian kurang bergengsi, kotor, kurang terpelajar dan tidak memberikan jaminan di masa depan juga menjadi faktor pendorong. Kesempatan kerja masyarakat

petani di wilayah transisi ditentukan oleh interaksi dan usaha dalam mencari peluang pekerjaan dari berbagai sumber (Hardika, 2011). Banyaknya warga pendatang berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian. Pendatang menjadi kelompok yang memberikan kontribusi terhadap terbukanya kesempatan belajar dan peluang pekerjaan di wilayah transisi.

Banyaknya pendatang ke wilayah transisi menyebabkan terjadi pergeseran makna tentang alih fungsi lahan yang dipengaruhi budaya kota. Di beberapa kondisi, masyarakat transisi lahir karena secara geografis wilayah yang awalnya merupakan kawasan pedesaan berdekatan langsung atau tidak jauh dengan perkotaan. Hal ini membuat mobilitas masyarakat menjadi tinggi. Pengetahuan tentang budaya dan pendidikan masyarakat tidak tunggal. Banyak kesempatan masyarakat untuk mengakses lapangan pekerjaan dan pendidikan. Akses yang mudah dijangkau dari desa ke kota atau sebaliknya membuat pertukaran sosial semakin mudah. Masyarakat pada akhirnya memiliki kesempatan bekerja di sektor pekerjaan lain, selain sebagai petani. Kemudahan akses dengan kota, melahirkan ide-ide baru seperti membuka *home stay*, membuka *coffee shop*, membuka desa wisata, membangun akses jalan, sebagai bagian dari pertukaran sosial antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Timbal balik ini melahirkan dinamika dalam berbagai aspek, baik aspek politik, sosial, ekonomi maupun budaya.

Fitrianatsany dalam penelitiannya (Fitrianatsany, 2017) menjelaskan bagaimana Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul mengalami transisi. Dahulu, wilayah desa ini merupakan wilayah pertanian produktif, namun saat ini berubah menjadi kawasan perumahan elit. Penelitian ini berfokus pada alih fungsi lahan pertanian dari tahun 1990-2015, serta melihat bagaimana perubahan profesi masyarakat pada wilayah tersebut. Terdapat dampak positif maupun dampak negatif yang terjadi di desa. Dampak negatif terlihat dari lahan pertanian yang semakin sedikit, sehingga menyebabkan ber-

Dr. Muryanti, M.A.

kurangnya hasil panen dan jenis tanaman. Menyempitnya lahan pertanian disebabkan adanya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa lahan pertanian diubah menjadi perumahan-perumahan seperti *homestay*, rumah produksi dan ruko. Sedangkan dampak positif pada masyarakat transisi ialah berkembangnya urbanisasi yang membawa kemajuan pada bidang kepemimpinan dan teknologi, tingkat pendidikan dan terciptanya variasi pekerjaan di luar sektor pertanian.

Aspek ekonomi masyarakat transisi, bisa dilihat juga dari interaksi jual beli di pasar. Interaksi jual beli di pasar tradisional masih menggunakan cara manual. Bagi masyarakat desa, pasar bukan hanya sebagai tempat jual beli. Akan tetapi lebih jauh dari itu, pasar merupakan tempat berinteraksi, bersosialisasi dan membangun relasi sosial. Sedangkan pada masyarakat modern, pasar selalu identik dengan kecanggihan teknologi, tempat mewah, bersih dan nyaman. Sehingga ada perbedaan harga barang di pasar tradisional dengan pasar modern. Transaksi jual beli di pasar pada masyarakat transisi cenderung memiliki sistem kolaboratif. Secara fungsi, pasar di masyarakat transisi masih memiliki fungsi lain selain menjadi tempat jual beli. Namun, perkembangan teknologi yang masuk di tengah-tengah masyarakat transisi membuat sistem jual beli mengarah kepada sistem jual beli modern. Dari segi fisik, banyak dijumpai pasar tradisional menyerupai pasar modern. Salah satu wujud revitalisasi tersebut yaitu pemanfaatan teknologi pada pasar tradisional. Pemasangan CCTV di pasar tradisional kategori pasar besar sudah diterapkan oleh pemerintah daerah. Seperti pemasangan CCTV di pasar Tanah Abang- Jakarta, Pasar Bringharjo-Yogyakarta dan Pasar Gede-Surakarta. Pemanfaatan teknologi lainnya yakni pemasangan *billboard* harga barang di dalam pasar (Nur, 2014).

ASPEK SOSIAL

Masyarakat transisi memiliki karakter interaksi sosial tersendiri. Faktor yang mempengaruhi pola interaksi antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berdasarkan pada budaya yang turun-temurun melalui keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain adanya interaksi dengan masyarakat luar. Faktor internal maupun faktor eksternal yang terjadi di masyarakat membentuk sebuah budaya. Kunnashihatul Ummah (Ummah, 2016) dalam penelitiannya tentang budaya masyarakat transisi di Dusun Tajem, menemukan adanya akulturasi budaya yang diterapkan di wilayah ini. Masyarakat memadukan dua budaya belajar, yaitu budaya lama dan budaya baru. Untuk bertahan, masyarakat melakukan adaptasi terhadap perubahan dan lingkungan baru. Meskipun dalam proses melakukan adaptasi, masyarakat masih mempertahankan budaya, mendalami ilmu agama dan melakukan regenerasi.

Perubahan sosial sebagai dampak interaksi sosial oleh kebijakan pembangunan lebih cepat terjadi pada masyarakat yang secara geografis berdekatan dengan lokasi pembangunan. Seperti halnya pada warga yang bermukim di sekitar jalan yang ramai dengan kendaraan, seperti di lingkaran timur Kabupaten Cirebon. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Muhamad (Andri, 2013) menunjukkan bahwa pembangunan jalan lingkaran berpengaruh terhadap peningkatan kepemilikan aset petani yang lahannya terkena dampak pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa petani yang lahannya terkena dampak pembangunan jalan lingkaran cenderung mempergunakan uang hasil ganti rugi lahan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka daripada mempergunakan uang tersebut untuk memulai usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Petani yang mengalami alih fungsi lahan karena pembangunan jalan lebih memilih menggunakan uang ganti rugi untuk membeli sarana komunikasi, informasi, transportasi dan perumahan baik memperbaiki rumah ataupun membangun rumah pribadi mereka. Artinya,

Dr. Muryanti, M.A.

penghasilan dari lahan pertanian berkurang karena mereka tidak lagi memiliki lahan yang luasnya sama dengan lahan sebelum ada pembangunan jalan.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat transisi bersifat dinamis. Seperti halnya nampak pada masyarakat transisi agraris ke industri di Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Mohammad,2015). Perubahan sosial dibagi menjadi dua yaitu perubahan yang terjadi secara cepat dan perubahan yang terjadi secara lambat. Perubahan secara cepat berkaitan dengan lembaga atau unsur-unsur yang ada di masyarakat secara cepat. Peristiwa yang pernah terjadi yaitu demonstrasi di Kelurahan Tanjung. Demonstrasi ini menjadi sebuah reformasi kebebasan berpendapat terhadap proyek pembangunan yang dilakukan oleh PT. GMTD Tbk (*Gowa Makassar Tourism Development*). Sedangkan perubahan yang terjadi secara lambat dapat dilihat dari sebagian besar lahan pertanian yang berubah menjadi kawasan perumahan. Kemudian jika dilihat dari ruang lingkupnya, perubahan juga dibagi menjadi dua yaitu perubahan sosial yang berpengaruh besar dan kecil. Perubahan kecil merupakan perubahan yang tidak berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat, seperti meniru gaya berpakaian masyarakat Barat. Sedangkan perubahan besar dapat dilihat dari bertambahnya penduduk di Kelurahan Tanjung Bunga karena adanya pembangunan perumahan sebagai tempat tinggal dan investasi. Jika dilihat dari perubahan sosial dapat dilihat dari perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki tercermin dari munculnya lembaga *non-profit* seperti LSM yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat yang menjadi korban dari pengusaha yang melakukan penyimpangan. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial yaitu: (1) perubahan struktur pola hubungan sosial; (2) distribusi penduduk; (3) sistem politik dan kekuasaan; (4) hubungan keluarga; dan (5) sistem status sosial.

Kehidupan sosial masyarakat transisi juga bisa dilihat dari adanya proses industrialisasi yang menggeser masyarakat agraris

menjadi industri. Perubahan terjadi pada masyarakat sebelum terjadi dan sesudah industrialisasi. Sebelum terjadi industrialisasi di Mranggen, variasi pekerjaan masyarakat hanya berupa petani, pedagang, buruh bangunan dan pegawai negeri. Jika melihat sistem pertanian, mayoritas petani menerapkan sistem sawah meskipun ada sebagian kecil yang menanam palawija. Selain itu terdapat sistem bagi hasil yang bertujuan sebagai sistem pembayaran, dengan membagi dua hasil panen. Petani tidak perlu membayar dengan uang kepada pemilik tanah sebagai sewa lahan, begitu pun pemilik tanah yang tidak perlu memberikan upah kepada petani. Setelah adanya modernisasi, sistem pertanian pada masyarakat mengalami perubahan terlebih pada penggunaan teknologi. Pemilik sawah lebih memilih menggunakan traktor untuk membajak sawah dan mesin perontok padi. Tindakan tersebut berakibat pada hilangnya pekerjaan masyarakat sebagai pembajak sawah dan petani. Masyarakat juga merasa bahwa biaya produksi dan waktu panen tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Oleh sebab itu, banyak petani yang beralih profesi. Selain sektor pertanian, industrialisasi juga mengubah kehidupan sosial masyarakat seperti berkurangnya rasa kekeluargaan dan gotong royong. Pada sistem kepercayaan-agama, masyarakat masih menganggap agama menjadi alat kontrol sosial. Dalam kehidupan pribadi, agama mengatur perintah-perintah yang diberikan Tuhan, seperti menjalankan sholat, membayar zakat dan melaksanakan puasa. Selain itu, agama menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari acara slametan dan tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat (Ismanto, 2012). Artinya dalam kehidupan masyarakat menerapkan relasi sosial agraris dan industri secara bersamaan.

Perubahan sosial juga nampak dari pola interaksi oleh Ibu-ibu Rumah Tangga di Sukoharjo (Danang, 2016). Wilayah ini menjadi salah satu contoh masyarakat transisi karena adanya beberapa perubahan-perubahan antara lain perubahan pada pola permukiman, sistem mata pencaharian, orientasi pendidikan, serta perubahan

Dr. Muryanti, M.A.

yang terjadi pada masyarakatnya. Dahulu, ibu rumah tangga hanya berperan sebagai pendamping para suaminya lebih spesifik sebagai teman dapur. Konsep ini sering kita jumpai pada masyarakat yang masih memegang penuh nilai-nilai tradisional. Perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga dianggap lebih baik di rumah, mengurus anak, melayani suami dan mengurus urusan domestik keluarga. Seiring perubahan transisi dalam masyarakat, perempuan-perempuan yang menjadi ibu rumah tangga berubah memiliki peran yang lebih luas dalam kelangsungan ekonomi keluarga. Pola komunikasi juga mengalami pengembangan, dalam bentuk komunikasi antar pribadi yang bersifat informal, tidak terduga, tanpa rencana dan spontan pada kelompok primer dan pola komunikasi yang terjadi pada kelompok sekunder lebih bersifat formal yang dipengaruhi oleh perkembangan kawasan menjadi kota Satelit.

Perubahan sosial pada masyarakat transisi dipengaruhi masuknya perkembangan teknologi informasi. Salah satunya ialah perkembangan internet dengan banyaknya penggunaan media sosial dalam masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan dampak positif adanya keterbukaan informasi. Namun sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa perubahan sosial pada masyarakat, terutama nilai-nilai dan norma yang berlaku (Ahmad Rafiq, 2020). Perubahan sosial pada masyarakat transisi bisa dilihat dari bentuk-bentuk solidaritas (Okky, 2017) yang muncul, antara lain: *Pertama*, masih adanya nilai-nilai gotong royong. *Kedua*, bentuk solidaritas masyarakat transisi ialah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. *Ketiga*, faktor pendukung solidaritas sosial yang sudah ada berupa budaya masa lalu dan masyarakat desa, sedangkan faktor penghambat berupa luasnya wilayah dan heterogenitas masyarakat dalam bidang ekonomi.

ASPEK BUDAYA

Aspek budaya yang berkembang dalam masyarakat transisi mengalami percampuran antara budaya tradisional dan modern. Jika pada masyarakat tradisional masih memegang teguh asas gotong royong yang menjadi nilai penting membangun komunitas. Sedangkan pada masyarakat modern, kepentingan individu di atas kepentingan kelompok. Maka masyarakat transisi terjadi percampuran antara komunitas dan modernitas. Sebagaimana halnya pada masyarakat Sulawesi Selatan, nilai-nilai gotong royong tetap dipegang teguh oleh Komunitas Tandara (Ashari, 2021). Sebagai bagian dari masyarakat transisi, mereka juga mengalami pergeseran budaya akibat masuknya budaya luar. Potensi bergesernya nilai gotong royong sebagai bagian dari kehidupan politik juga disebabkan oleh berkembangnya teknologi informasi seperti televisi dan *handphone*. Selain itu, adanya proyek pemerintah pusat melalui dana desa yang mengubah pola pikir masyarakat tentang pembangunan. Dana desa dari pemerintah dianggap sebagai bentuk dukungan materil pembangunan desa, sehingga pembangunan desa tidak lagi dikerjakan oleh masyarakat akan tetapi dikerjakan oleh tenaga kerja upahan. Apabila ada masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa maka mereka menganggap ada insentif yang mereka dapatkan. Pada awalnya, gotong royong dipahami sebagai “*sibali-bali*”, “*sirampo-rampo*”, suatu budaya yang memansuaikan, saling membantu, saling memberi dan saling menunjukkan kebersamaan dalam menjalani kehidupan di pedesaan. Gotong royong merupakan nilai masyarakat pedesaan yang secara politik melahirkan partisipasi komunal, yang kemudian mengalami pergeseran makna.

Selain pergeseran makna, percampuran dua budaya dalam masyarakat transisi melahirkan budaya baru dan lebih kompleks. Dua budaya yang bertemu tidak serta merta melebur menjadi satu budaya yang saling terintegrasi. Lebih jauh dari itu, konflik horizontal justru lahir dari pertemuan kedua budaya dalam masyarakat transisi. Dalam penelitian yang dilakukan Abdurrahman Sidik (Sidik,2021),

Dr. Muryanti, M.A.

konflik horizontal terjadi antar sesama transmigran dari berbagai daerah pada generasi pertama transmigrasi di Desa Mulawarman, sebagai salah satu wilayah transisi. Masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani bertemu dengan masyarakat industri perusahaan batu bara. Masyarakat harus melepaskan mekanisme ikatan sosialnya dengan tanah dan mengubah nilai-nilai tradisi agraris sejak terbitnya izin tambang dan beroperasi perusahaan pertambangan hampir di seluruh wilayah. Desa Mulawarman berubah menjadi area pertambangan batu bara. Dalam proses perjalanannya juga menemui konflik-konflik horizontal ataupun vertikal dengan masyarakat dan pihak perusahaan.

KEMISKINAN DAN GAYA HIDUP

Kemiskinan di wilayah transisi memiliki sifat yang berbeda dengan kemiskinan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut nampak di Kabupaten Sragen, sebagai bagian dari wilayah transisi. Di wilayah ini terdapat 29 Rumah Tangga miskin yang menyatakan kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan 10 tahun lalu, dengan adanya perubahan lingkungan pemukiman dan sosial ekonomi (Prita,2017) sebagai akibat dari perkembangan desa menjadi wilayah transisi. Masalah kemiskinan di wilayah itu disebabkan distribusi dan kemudahan akses fasilitas perkotaan yang sulit dijangkau. Selain itu, rendahnya sarana prasarana di beberapa lingkungan perkotaan semakin menambah kemiskinan. Meskipun terjadi perubahan secara fisik, namun tidak dibarengi dengan kesempatan kerja yang sejalan dengan terbatasnya kompetensi yang dimiliki karena masyarakat masih berorientasi pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Oleh karena itu, urbanisasi perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan. Selain itu pembuatan kebijakan perkotaan harusnya tidak hanya fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana dan optimalisasi aset untuk peningkatan usaha.

Kajian mengenai kemiskinan selalu berkaitan dengan gaya hidup masyarakat. Pada masyarakat transisi, gaya hidup bercampur dari gaya hidup masyarakat modern (masyarakat perkotaan) dengan gaya hidup masyarakat tradisional (masyarakat pedesaan). Gaya hidup masyarakat perkotaan banyak dipengaruhi oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Masyarakat kota cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif, hedonis dan metarialis. Masyarakat perkotaan sangat dekat dengan hidup *glamour* (hidup mewah). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat (Wahyu,2021) salah satu simbol gaya hidup masyarakat perkotaan ialah melakukan berbagai aktivitas di warung kopi (*coffee*). Mengunjungi warung kopi menjadi salah satu simbol gaya hidup masyarakat perkotaan seiring dengan layanan warung kopi (*coffee*) yang ditawarkan. Di pusat kota, keberadaan warung kopi bukan hanya sebagai tempat bersosialisasi dan penghilang rasa kantuk, namun juga menjadi tempat kerja, bisnis, ruang literasi, ruang diskursus, serta sebagai ruang hiburan. Sebagai masyarakat modern, warung kopi di pusat perkotaan juga menjadi tempat yang bisa ditunjukkan di media sosial sekaligus menjadi simbol kelas sosial. Hal ini berbanding terbalik dengan gaya hidup masyarakat tradisional yang lebih sederhana dan mengutamakan semangat gotong royong.

Perubahan gaya hidup pun juga terjadi pada masyarakat di Desa Kubangwungu, Jawa Tengah. Pada Tahun 1969 sampai 1980-an perekonomian masyarakatnya berbasis pada sektor pertanian dengan mata pencaharian utama sebagai petani atau buruh tani. Di desa ini terdapat banyak tenaga kerja, karena lahan garapan yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Setelah itu perkembangan industri semakin massif dilakukan. Barang produk industri yang dikembangkan yaitu pabrik tali tambang dengan sasaran dari produksinya nelayan yang memiliki kapal besar. Hasil produksi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan gaya hidup di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan adanya pergeseran kebutuhan dari kebutuhan

Dr. Muryanti, M.A.

primer ke sekunder kemudian tersier. Artinya, ada perubahan dari penggunaan barang-barang konsumsi dalam masyarakat.

Perubahan gaya hidup pada masyarakat tradisional akibat dari masuknya modernisasi juga terjadi di Pekon Hujung Lampung Barat (Eka, 2018). Terdapat dua pengaruh adanya modernisasi di desa yakni pengaruh negatif dan pengaruh positif. Masyarakat desa menjadi lebih rasional dan ilmiah terutama dalam bidang pendidikan. Sedangkan pengaruh negatifnya, masyarakat mengubah gaya hidupnya menjadi lebih konsumtif. Kepentingan memenuhi kebutuhan pada masyarakat konsumtif didasarkan pada keinginan untuk menunjukkan status sosial kepada orang lain. Gaya hidup masyarakat modern yang cenderung konsumtif juga berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan kemudahan dalam mengakses sesuatu. Pemenuhan kepuasan terlihat dari pemilihan barang bermerk untuk terlihat eksis di lingkungan sosialnya (Noor, 2020). Pada kondisi masyarakat transisi, gaya hidup berjalan beriringan dengan perubahan wilayah menjadi transisi, sekaligus kemiskinan yang melingkupinya terkait akses dan kepemilikan sarana dan prasarana. Gaya hidup seringkali tidak sesuai dengan kondisi ekonomi, sehingga mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga.

Gaya hidup merupakan perilaku individu yang ditunjukkan dalam aktivitas dan minat yang mencerminkan kelompok sosialnya. Gaya hidup merupakan bagian dari citra diri dan bentuk dari refleksi status sosial. Grafita Ohy, Evelin J. R. Kawung dan Jhon D. Zakarias dalam penelitiannya (Grafita, 2020) melihat bahwa globalisasi membawa perubahan gaya hidup tidak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan. Perubahan ini bisa dilihat dari perspektif ekonomi, khususnya pada pola hidup konsumtif. Perubahan gaya hidup bagi petani dalam berinteraksi dapat tercermin melalui sikap, emosi, motif, perilaku, cara mengkonsumsi barang maupun jasa, kepemilikan, status, sistem dan gengsi. Dimana, motivasi membeli sesuatu tidak berdasar pada kebutuhan pokok namun keinginan untuk diakui oleh

lingkungan sosialnya. Perubahan gaya hidup masyarakat tradisional juga bisa dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Reza Laverian (Reza, 2021) yang menunjukkan adanya transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Perubahan ini membawa dampak negatif terhadap tradisi budaya asli masyarakat yang semakin ditinggalkan. Perubahan sosial yang terjadi tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.

Menurut Chaney (Chaney, 2004) gaya hidup masyarakat modern menunjukkan pendefinisian mengenai sikap, nilai-nilai, kekayaan, serta posisi sosial masyarakat. Istilah ini dalam masyarakat modern memiliki makna mengenai individualisme, eksistensi diri dan gengsi untuk bergaya. Gaya hidup masyarakat transisi misalnya ditunjukkan oleh masyarakat di Tuban (Pythag, 2021) yang berbondong-bondong membeli mobil hasil dari menjual tanah akibat dari adanya kilang minyak yang melibatkan Pertamina-Rosneft, perusahaan asal Australia. Tanah yang semula merupakan lahan pertanian kemudian hilang dan masyarakat (pemilik tanah) menggunakan uang ganti rugi bukan untuk membelikan tanah dengan luas lahan yang sama, namun membeli mobil sebagai bagian dari gaya hidup. Namun satu tahun kemudian, pada tahun 2022 warga mulai menyesali keputusannya (Rachmawati, 2022). Masyarakat terlihat menyesal dan melakukan aksi unjuk rasa karena mereka kehilangan lahan pertanian yang sekaligus menjadi mata pencaharian mereka. Mobil yang dibelinya 1 tahun lalu hanyalah ekspresi gaya hidup, bukan bagian dari kebutuhan pokok. Sementara itu, dengan menjual tanahnya, secara tidak langsung masyarakat setempat kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. Gaya hidup konsumtif ini menjadi dilema bagi masyarakat transisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo S (2007), *Etika Lingkungan, Modul Kuliah Ekologi Manusia*, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Bogor, IPB.
- Agus, A. Aco (2016), *Keluarga Masyarakat Pedesaan Dalam Kondisi Transisi Kehidupan Masyarakat Tradisional Menuju Masyarakat Modern*, Makassar, Grand Clarion Hotel.
- Agustia, Reza Laverian Dwi (2021), *Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Samin Dalam Era Modern (Studi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ainiyah, Roisatul, Shokiful Burhan, M Firman Ardiansyah, dan Dhyhan Putri Fidanti (2021), *Pengembangan Desa Digital Sebagai Upaya Mengangkat Potensi Lokal Desa Karangrejo*, 2, November, 6. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jadm>.
- Anderson, Benedict (1991), *Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, London and New York.
- Aningtyas, E. H, H. H (2016), *Dampak Migrasi Penduduk pada Gaya Hidup Penduduk di Indonesia (The impact of population migration on the Lifestyle of Population in Indonesia)*, July, 1–23.
- Ariyani, Nur Indah dan Okta Nurcahyono (2014), *Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial*, Jurnal Analisa Sosiologi, 3.1, 1–12.

Dr. Muryanti, M.A.

Baudrilard, Jean (2004), *Masyarakat Konsumsi*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.

Beriansyah, Alva (2021), *Pendampingan Pengembangan Desa Digital Melalui Komunitas Pemuda di Desa Pematang Jering Kabupaten Muaro Jambi*, 2, No. 1, Januari, 7. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.913>.

Bintarto, R (1983), *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia.

Boeke, J.H (1983), *The Interest of The Voiceles Far East: Introduction to Oriental Economics diterjemahkan D.Projosiswoyo*, Prapitalisme di Asia, Jakarta, Penerbit Sinar Harapan.

BP7 (1991), Indonesia, *Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

Bryant, Clifton D, Dennis L Peck, Patty M Bryant, Harold R Kerbo, J David Knottnerus, Rosalind A Sydie, and others (2007), *21st_Century_Sociology_vol.1_Traditional_&_Core_Areas*, ed. by Dennis L. Peck Clifton D. Bryant, First, United Kingdom: Sage Publications, Inc.

Buchari (2012), *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*, Jakarta, Gramedia.

Cahya, A (2016), *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Migrasi Penduduk Jawa Akibat Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi*, July, 1–23.

Castells, Imanuel (2002), *The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society*, UK, OxfordUniversity Press.

Chaney, David (2004). *Lifestyle Sebuah Pengantar Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Cropanzano, Russell, Marie S. Mitchell (2005), *Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review*, Journal of Management, 31.6, 874–900.
- Damanik, Darwin, Pawan Darasa Panjaitan, Dkk (2021), *Sistem Ekonomi Indonesia*, ed. by Abdul Karim, Journal of Chemical Information and Modeling, Indonesia: Yayasan Kita Menulis, LIII.
- Damsar dan Indrayani (2016), *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Pertama, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Danang Arya Yudanta (2016), *Pola Komunikasi Masyarakat Transisi Dampak Pengembangan Kawasan Solo Baru (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pola Komunikasi Ibu-Ibu Rumah Tangga Desa Madegondo Kecamatan Grogol Sukoharjo)*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Debolina Kundu dan Arvind Kumar Pandey (2020), *World Urbanisation: Trends and Patterns*, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-3738-7_2#:~:text=The%20growth%20trend%20of%20global,global%20north%20to%20global%20south.
- Evers, Hans Dieter (1980), *Sociology of South East Asia: Readings on Social Change and Development*, Kuala Lumpur, Oxford University Press.
- Evers, Hans Dieter dan Rudger Korf (2002), *Urbanisme di Asia Tenggara (Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Fardani, Irland, Gina Puspitasari Rochman, Lely Syiddatul Akliyah, dan Hani Burhanuddin (2022), *Digitalisasi Desa di Desa Cikole Lembang*, RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat 5, no. 2, 5 Januari, 181. <https://doi.org/10.35906/resona.v5i2.806>.

Dr. Muryanti, M.A.

Fatmawati, Noor (2020), *Gaya Hidup Mahasiswa Akibat Adanya Online Shop*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 29, 1, 29–38.

Fauzi, Noer (1999), *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.

Fitrianatsany (2017), *Urban Desa Proses Transisi Desa Menjadi Kota*, Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, 11, 2, 185–208.

Flanagan, William G (2010), *Urban Sociology: Images And Structure*, Rowman and Littlefield Publisher, Maryland.

Geertz, Clifford (1976), *Agriculture Involution diterjemahkan oleh Ir.Suleiman Krisnandhi M.Sc*, Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Jakarta, Bharata K.A.

Granovetter, Mark dan Richard Swedberg, *The Sociology of Economic Life*, Published in United States of America by Westview Press, Inc., 5500 Central Avenue, Boulder, Colorado 80301-2847.

Harahap, Fitri Ramdhani (2013), *Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia*, Jurnal Society, I(1), 35–45.

Hardika, H (2011), *Transformasi Pola Matapecaharian Petani: Strategi dan Perilaku Belajar Petani di Kawasan Transisi dalam Mengembangkan Kehidupan*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, 18,1 81–89.

Harris, John (1988), *Politicising Demokrasi: The New Local Politics of Democratisation*, New York, Palgrave MacMillan.

Harris, Nathanal dan Elizabeth Graham (2007), *Maya Kuno (Arkeologi menguak Rabasia Masa Lampau)*, National Geographic, Washington DC.

Haryanto (2016), *Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9,2, 111–24.

- Henry, Khairil (2020), *Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)*, Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 19, 62–90.
- Hidayat, Wahyu (2021), *Gaya Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus Terhadap Pelanggan Warung Kopi di Kota Makassar)*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar).
- Husken, Frans (1998), *Een Dorp op Java: Sociale Differentiatie in Een Boerengemeenschap, 1830-1980 diterjemahkan Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*, Jakarta, Grasindo.
- Indonesia, Pemerintah Pusat Republik (2014), *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014*, JDIH BPK RI.
- Ismail, Ashari (2021), *Memupuk Conscience Gotong Royong Pada Masyarakat Transisi Tandara, Kaili Luwu Sulawesi Selatan*, Humanis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 20,2, 14–18.
- Ismanto, Kuat, Misbahul Huda dan Chusna Maulida (2012), *Transformasi Masyarakat Petani Mranggen Menuju Masyarakat Industri*, Jurnal Penelitian, 9,1, Mei 2012
- Jamaludin, Adon Nasrullah (2015), *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Sosiologi Perkotaan, Bandung: CV Pustaka Setia, II.
- Jayapalan, N (2002), *Rural Sociology*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors.
- Johnson, Doyle Paul (1972), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, University of South Florida Jilid I, diIndonesiakan oleh Robert M.Z.Lawang Jilid I, Jakarta, Gramedia.
- Kancana, Okky Rusyandi Cahya (2017), *Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Transisi: Studi Pada Masyarakat Transisi di Kelurahan Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung*, Fakultas Pendidikan

Dr. Muryanti, M.A.

Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia
Bandung.

Kantor Pos Indonesia, yang membuat kode pos desa-desa di
Indonesia.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo (1991), *Sejarah Perkebunan
di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Aditya Media.

Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro dan
Nugroho Notosutanto (1977), *Sejarah Nasional Indonesia*,
Jakarta, Balai Pustaka.

Kompas (2007), *Teropong Ekonomi*, 8 Desember.

Kurniati, Pythag (2021), *Fakta Warga Desa di Tuban Ramai-Ramai
Beli Mobil Baru, Ada Yang Punya 3 Mobil Sekaligus*, Kompas.com,
Tuban, Jawa Timur, 16 Februari.

Lombard, Denys (2005), *Nusa Dua : Silang Budaya Kajian Sejarah
Terpadu, Warisan Sejarah-Sejarah Konsentris*, Jakarta, Gramedia
Pustaka Tama.

Mahendra, Gede Surya (2021), *Pelatihan Perangkat Desa dalam
Penggunaan Sistem Pengaduan Online Berbasis Web (Ec-Resolver)
Untuk Menuju Desa Digital*, Vol. 5, No. 3: 12. [https://doi.
org/10.31764/jmm.v5i3.4481](https://doi.org/10.31764/jmm.v5i3.4481).

Manoby, Worry Mambusy, Afriyanni Afriyanni, Suci Emilia Fitri,
Melati Ayuning Pranasari, Eny Setyaningsih, Rosidah Rosidah,
dan Herie Saksono (2021), *Digital Village: The Importance of
Strengthening Village Resilience in the Digital Age*, Jurnal Bina Praja,
30 April, 53–63, <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.53-63>.

Massey, Douglas S (2003), *Patterns and Processes of International
Migration in the 21st Century*, Conference on African Migration
in Comparative Perspective, Johannesburg, South Africa, 4-7,
June.

- Mulyadi, Mohammad, *Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*.
- Muryanti (2010), *Demokrasi dan Partisipasi dalam M.Iryad Thamrin*, Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum.
- Muryanti (2018), *Pedesaan dalam Putaran Zaman (Kajian Sosiologis Petani, Pertanian dan Pedesaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nas P.J.M (1979), *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota dalam tiga bagian*, Jakarta, Perpustakaan RI.
- Nurchim dan Nofikasari, Indah (2018), *Pemodelan Adopsi Teknologi Digital Guna Mewujudkan Desa Pintar*.
- Oh, Grafita, Evelin J. R. Kawung dan Jhon D. Zakarias (2020), *Perubahan Gaya Hidup Sosial Masyarakat Pedesaan Akibat Globalisasi di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara*, *Holistik: Journal of Social and Culture*, 13, 3, 1–16.
- Palen, J.John (2002), *The Urban World*, US: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Pangemanan, Anando Archie Alexander, Stanley D S Karouw dan Yaulie Deo Y Rindengan (2021), *Digital Village Development Planning In Kauditan I*, no. 4, Desember: 8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika>.
- Permana, Aji Fany (2021), *Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1,1, 13–27.
- Pip Jones (2010), *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, Cetakan Kedua, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pontoh, Nia K dan Iwan Kustiwan (2008), *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, Bandung, ITB.

Dr. Muryanti, M.A.

Popkin, Samuel L (1986), *Petani Rasional*, Jakarta, Yayasan Padamu Negeri.

Portes, Alejandro (2003), *Conclusion: Theoretical Convergencies and Empirical Evidence in the Study of Immigrant Transnationalism*, International Migration Review, September 1.

Purwanto, Bambang (2000), *Jejak Seribu Tangan*, Yogyakarta: Rumpun Tjoet Njak Dien.

Putri, Nike Regina, Wawa Wikusna dan M Kom (2020), *DESAGI (Desa Digital) - Aplikasi Berbasis Web Desa Digital Bandung Juara Pada Modul Informasi Publik*, Vol.6, No.2: 7.

Qiang, Wenli, Aimin Liu, Shengkui Cheng, Thomas Kastner dan Gaodi Xie (2013), *Agricultural Trade and Virtual Land Use: The Case of China's Crop Trade*, Land Use Policy, 33, 141–50.

Rachmawati (2022), *Kisah Kampung Miliader Tuban, Sempat Viral Karena Borong Mobil Baru, Kini Warga Menyesal Jual Tanahnya*, Kompas.com, Tuban, Jawa Timur, 26 Januari, pp. 1–23.

Rafiq, Ahmad (2020), *Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*, Global Komunika, 1.1, 18–29.

Rahardjo (1995), *Sosiologi Perkotaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Rahardjo (2004), *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ramadani, Prita dan Fadjar Hari M (2017), *Penilaian Kemiskinan Partisipatif Pada Kawasan Transisi Perdesaan Ke Perkotaan di Kabupaten Sragen*, Journal of Regional and Rural Development Planning, 1.1, 28.

Ratuwalu, Barnabas (2016), *Transisi Masyarakat Agraris Menuju Masyarakat Industrial Indonesia*, Journal of Industrial Engineering, 1.2, 1–9.

- Rhamdani, Andri Muhamad (2013), *Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Timur Cianjur Terhadap Perubahan Orientasi Mata Pencabarian Petani di Kabupaten Cianjur*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ricklefs M.C (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi.
- Ritzer, George dan Douglas J.Goodman (2004), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Kencana.
- Rusli, Said (2012), *Ilmu Kependudukan*, Bogor, IPB.
- Rusli, Said (2012), *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta, LP3ES.
- Sajogya & Pudjiwati Sajogja (2005), *Sosiologi Pedesaan (Kumpulan Bacaan)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Samodra, Joko, Andreas Syah Pahlevi, dan Yon Ade Lose Hermanto (2019), *Pasar Desa Digital Berbasis Web Sebagai Media Promosi Bagi UMKM*, Jurnal KARINOV 2, no. 3, 25 November, 177. <https://doi.org/10.17977/um045v2i3p177-180>.
- Sapari, Imam Asy'ari (1993), *Sosiologi Desa dan Kota*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Sassen, Saskia (2000), *The Global City: Strategic Site/New Frontier*, American Studies.
- Scotts, James C (1981), *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.
- Sharma, Rajendra Kumar (2004), *Rural Sociology*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors.
- Sidik, Abdurrahman (2021), *Studi Perubahan Mode Produksi dari Era Pertanian ke Era Pertambangan Batubara*, EJournal Sosiatri-Sosiologi, 9.1, 170–84.
- Sihaloho, Martua, Ekawati Sri Wahyuni, Rilus A. Kinseng dan Sediono MP. Tjondronegoro (2016), *Perubahan Struktur Agraria*,

Dr. Muryanti, M.A.

Kemiskinan, dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis,
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, April, 48-60.

Soekanto, Soerjono (1990), *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto (2017), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi,
Jakarta: Rajawali Pers.

Somantri, Gumilar R (2008), *Sosiologi Perkotaan*, Jakarta, Universitas
Terbuka.

Sudibia, Dayuh Rimbawan, Adnyana, *Pola Migrasi dan Karakteristik
Migran Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 di Provinsi Bali*,
Jurnal Piramida Vol.VIII No.2, 59 – 75.

Supriatna T (2000), *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta,
Rineka Cipta.

Supriyanto, Agus dan Kharis Fadlullah Hana (2020), *Strategi
Pengembangan Desa Digital untuk Meningkatkan Produktivitas
UMKM*, 8, no. 2: 18. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v8i2.8640>.

-----*The Number of Working – Age Adults Available To Support
An Older Person Is Declining Globally But Still Varies Substantially
From Country To Country*, Population Reference Bureau (PRB)
2010 World Population Data Sheet. hlm.3.

The World Bank (2005), *Menciptakan Peluang Keadilan: Laporan atas
Studi “Village Justice in Indonesia dan Terobosan dalam Penegakan
Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum dan Tingkat Lokal”*,
Jakarta, The world Bank.

Thomas, Emma, Mark Riley dan Jack Spees (2020), *Knowledge Flows:
Farmers, Social Relations and Knowledge Sharing Practices in Catchment
Sensitive Farming*, Land Use Policy, 90.August 2019, 104254.

Tjondonegoro, SMP (2008), *Ranah Kajian Sosiologi Pedesaan*, Bogor,
KPM.

- Ummah, Kunnashihatul (2016), *Budaya Belajar Masyarakat Transisi di Dusun Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta*, Jurnal Kebijakan Pendidikan, 1–5, 1–7.
- UN Population Division Departemen of Economic and Social Affairs (2010), *World Population Prospects*.
- Utomo, Alvianto Wahyudi (2020), *Transisi Agraris Ke Industri (Studi Sosiologis Perubahan Sosial: Transisi Masyarakat Agraris ke Industri di Dusun Timang, Wonokerto, Kabupaten Wonogiri)*, Jurnal Cakrawala, 7.2, 205–30.
- UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Virosordjono, Soetjipto (1985), *Pengertian, Batasan dan Masalah Sektor Informal*, Prisma 3.
- Vol. 41, No. 2/3 (2000), *Globalization, Transnationalism, and The End of the American Century*, Summer/Fall, pp. 79-95.
- Wertheim W.F (1999), *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Wijaya, Holi Bina (2016), *Urbanisasi Kawasan Perdesaan: Perkembangan Industri Pengolahan Kayu di Kabupaten Temanggung*, Semarang.
- Xing Gaoa, Mengqiu Caoab, Yuerong Zhang, Yuqi Liu, Huan Tonge dan Qing Yaof (2019), *Towards Sustainability: An Assessment of an Urbanisation Bubble in China Using a Hierarchical - Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis- Choquet Integral Method*, Journal of Cleaner Production, Volume 279, 10 Januari.
- Yurida, Eka (2018), *Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belau Kabupaten Lampung Barat)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dr. Muryanti, M.A.

Sumber Online

http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_penduduk, akses minggu 7 Oktober 2012 jam 15.56

<http://lipi.go.id/publikasi/model-gravitasi-migrasi-ravenstein/27079>

<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/464441/> akses jam 21.07 tanggal 2/10/2012

<https://sp2010.bps.go.id/>, *Hasil Sensus Penduduk 2010*.

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/740489/indonesia-sedang-menikmati-bonus-demografi>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, *Hasil Sensus Penduduk 2020*.

<https://www.bps.go.id/publication/2016/11/30/63daa471092bb2cb7c1fada6/profil-penduduk-indonesia-hasil-supas-2015.html>, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*.

<https://www.bps.go.id/statictable/2014/02/18/1276/persentase-penduduk-daerah-perkotaan-hasil-proyeksi-penduduk-menurut-provinsi-2015---2035.html>, *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan Hasil Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2015-2035*.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721941/ragam-masalah-kependudukan-di-indonesia-dan-cara-mengatasinya>, *Ragam Masalah Kependudukan Indonesia dan Cara Mengatasinya*, diakses pada 16 Januari 2022.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/urbanisasi-38223>, *Mengenal Urbanisasi: Dampak, Faktor, dan Cara Mencegah* | Rumah.com, diakses pada 16 Januari 2022.

TENTANG PENULIS



Dr. Muryanti, M.A. merupakan Sosiolog dengan fokus studi kajian pedesaan dan perkotaan, terutama kajian ekonomi. Beberapa publikasi, diantaranya: *Pedesaan dalam Putaran Zaman: Kajian Petani, Pertanian dan Pedesaan (2018)*; *The Role of the Entrepreneurship Mindset and Spirit in Building a Tourism Business in Indonesia Post COVID-19 (2022)*; *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Covid-19 (2022)*; *Perempuan Pedesaan: Kajian Sosiologis Pekerja Rumah Tangga; Teori Konflik dan Konflik Agraria di Pedesaan (2013)*. Selain mengajar dan publikasi penelitian juga aktif di berbagai kegiatan ilmiah dan anggota *Rural Sociological Society*(*).